

2017

# LAPORAN KINERJA



**DIREKTORAT JENDERAL KSDAE**



Burung Cekakak Tunggir-hijau,  
Sulawesi



Orang Utan, Kalimantan



Burung  
Cendrawasih, Papua

Jakarta, Februari 2018

# KATA PENGANTAR

Sebagai institusi yang memiliki komitmen menjadi institusi yang akuntabel, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) telah melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan. Komitmen kerja yang harus dicapai Direktorat Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017, dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Tahun 2017.



Sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal atas pelaksanaan tugas selama satu tahun, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun Laporan Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi sehingga ke depan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal KSDAE serta mitra kerja, dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Jakarta, 5 Februari 2018  
DIREKTUR JENDERAL KSDAE,

  
Ir. WIRATNO, M.Sc.  
NIP. 19620328 198903 1 003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal KSDAE berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja) Tahun KSDAE, dan Perjanjian Kinerja (PK).

Menghadapi berbagai isu pembangunan sumber daya alam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2017 berupaya untuk memberikan kontribusi dengan berbagai pelaksanaan kegiatan melalui Program **Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**. Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
- b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu :

- 1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
- 2) Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 3) Konservasi Spesies dan Genetik
- 4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
- 5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial
- 6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
- 7) Pengelolaan Taman Nasional
- 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Pelaksanaan atas program dan kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2017 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Ditjen KSDAE tahun 2017. Laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian sasaran Ditjen KSDAE sebagaimana telah diamanatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2017.

1. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 2017 adalah sebesar **121,26%**, meningkat 11,07% jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 (109,16%). Capaian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke kawasan konservasi	2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar	6.168.857 orang atau Rp 159,40 Milyar	150 (246,75)
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi	30 unit atau Rp. 3,7 Milyar	113 unit	150 (313,89)
		Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	Rp. 10 Milyar	Rp. 25,5 Milyar	150 (254,98)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting	Rp. 5,3 Trilyun	Rp. 7,09 Trilyun	133,87
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)	17 unit KK	38 unit KK	150 (223,53)
		Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)	30 unit TN	2 unit TN	6,67
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>	2%	5,56%	150 (278)
		Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7 paket data	6 paket data	85,71
		Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	300.000 Ha dalam 13 unit KEE	63.957,9 Ha dalam 14 unit KEE	107,70
		Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi	10 unit	35 unit	150 (350)
		Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	20.000 Ha	25.728,79 Ha	128,64
		Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran	551 unit KK	552 unit KK	100,18
		<b>Rata-rata capaian kinerja</b>			

- Secara umum pada tahun 2017 Ditjen KSDAE telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang tertuang dalam PK Direktur Jenderal KSDAE tahun 2017, dari dua belas indikator kinerja program terdapat sepuluh indikator yang realisasi kinerjanya melebihi target, dan dua indikator lainnya belum tercapai kinerjanya sesuai target yaitu Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik) (6,67%) dan Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) (85,71%). IKK Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik) tidak tercapai karena IKK ini sebenarnya lebih fokus pada pencapaian nilai METT kawasan konservasi non taman nasional, akan tetapi karena mengakomodir kegiatan Pengelolaan Taman Nasional pada Satker Balai Besar/Balai Taman Nasional, maka pada tahun 2017 ditetapkan IKK ini, sehingga capaian IKK ini kurang optimal. Sedangkan pada IKK Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik, baru terealisasi sebanyak 6 paket data (85,71%) dari target 7 paket data. Pada IKK ini, yang belum dapat terealisasi adalah pada wilayah Maluku. Untuk wilayah Maluku direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018.
- Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2017, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE sebesar **Rp. 1.825.868.794.000,-**, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 1.687.895.930.765,-** atau **92,44%**. Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain pada tahun 2017, realisasi anggaran tidak dapat optimal, penyebabnya antara lain penyerapan anggaran melalui sumber dana PNBPN yang ditetapkan melalui Maksimal Pencairan (MP) PNBPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mencapai 100% dari

total pagu sumber dana PNBP dan Surat Edaran MP PNBP ke VI baru terbit pada bulan Desember 2017.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah perlu dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya.

Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.

\*\*\*\*\*

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B KELEMBAGAAN</b> .....	<b>2</b>
1. Kedudukan .....	2
2. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi .....	3
<b>C SUMBERDAYA DAN SARANA PENDUKUNG</b> .....	<b>4</b>
1. Kawasan Konservasi.....	4
2. Sumber Daya Manusia.....	4
3. Sarana Dan Prasarana .....	7
<b>II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
<b>A RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019</b> .....	<b>9</b>
1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis .....	10
2. Program dan Kegiatan Ditjen KSDAE.....	12
<b>B TARGET JANGKA MENENGAH</b> .....	<b>14</b>
<b>C TARGET TAHUNAN</b> .....	<b>15</b>
1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 .....	15
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 .....	23
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>25</b>
<b>A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	<b>25</b>
1. Reviu Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan .....	28
2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Sesuai PK Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2017 .....	26
<b>B PAGU DAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	<b>108</b>
1. Pagu Anggaran 2017 .....	108
2. Realisasi Anggaran 2017.....	110
<b>IV PENUTUP</b> .....	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi .....	4
Tabel 2	Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017 .....	4
Tabel 3	Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 .....	5
Tabel 4	Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2017 .....	6
Tabel 5	Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2017 .....	7
Tabel 6	Aset Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017 .....	8
Tabel 7	Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 .....	13
Tabel 8	IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 .....	14
Tabel 9	Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 .....	15
Tabel 10	Anggaran Per Jenis Belanja Ditjen KSDAE Tahun 2017 .....	22
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017 .....	23
Tabel 12	Capaian Indikator Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017 .....	28
Tabel 13	Capaian IKK Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Domestik ke Kawasan Konservasi .....	30
Tabel 14	Capaian IKK Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik ke Kawasan Konservasi Berdasarkan Target Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 .....	30
Tabel 15	Penerimaan PNBP dari Pengunjung Wisatawan Manca Negara dan Domestik Tahun 2017 .....	31
Tabel 16	Perbandingan Data Wisatawan Tahun 2013-2017 .....	32
Tabel 17	Capaian IKK Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit atau Rp. 3,7 Milyar .....	35
Tabel 18	Capaian IKK Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013 .....	35
Tabel 19	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir .....	36
Tabel 20	Capaian IKK Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit .....	41
Tabel 21	Perbandingan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017 .....	42
Tabel 22	Capaian IKK Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit ..	44
Tabel 23	Perbandingan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017 .....	45
Tabel 24	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit ...	49
Tabel 25	Perbandingan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2017 .....	50
Tabel 26	Capaian IKK Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dengan target Rp. 10 Milyar .....	52
Tabel 27	Data PNBP Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2014 - 2017 .....	53
Tabel 28	PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2013-2017 .....	53
Tabel 29	Capaian IKK Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting dengan target Rp. 5,3 Trilyun .....	55
Tabel 30	Data Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> tahun 2014 - 2017 .....	55

Tabel 31	Capaian IKK Jumlah TN dan Non TN Memperoleh Nilai Indeks METT Minimal 70% (Kategori Baik) .....	57
Tabel 32	Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektivitas Pengelolaan .....	59
Tabel 33	Tabel Kawasan Konservasi Mencapai Nilai METT 70% Tahun 2017 .....	59
Tabel 34	Capaian IKK Persentase Peningkatan Populasi 25 Jenis Satwa Terancam Punah Prioritas Sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 2% .....	64
Tabel 35	Capaian Peningkatan Populasi 25 Satwa Prioritas Tahun 2015-2017 .....	64
Tabel 36	Daftar 25 Satwa Terancam Punah Prioritas .....	65
Tabel 37	Capaian Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) .....	68
Tabel 38	Data Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik .....	68
Tabel 39	Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik .....	73
Tabel 40	Capaian IKK Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial dengan target 300.000 Ha dalam 13 unit KEE .....	76
Tabel 41	Perbandingan Capaian IKK Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial Tahun 2015-2017.....	82
Tabel 42	Capaian IKK Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi dengan target 10 unit .....	86
Tabel 43	Daftar KPHK Operasional Tahun 2017 .....	87
Tabel 44	Capaian IKK Luas Kawasan Hutan Konservasi Pada Zona Tradisional Yang Dikelola Melalui Kemitraan Dengan Masyarakat Dengan Target 20.000 Ha .....	91
Tabel 45	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Zona Tradisional Melalui Kemitraan.....	91
Tabel 46	Rencana Pelaksanaan IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat dengan target 20.000 Ha.....	92
Tabel 47	Capaian IKK Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK .....	99
Tabel 48	Luas Kebakaran Kawasan Konservasi Tahun 2015.....	101
Tabel 49	Luas Kebakaran Kawasan Konservasi Tahun 2016.....	102
Tabel 50	Luas Kebakaran Kawasan Konservasi Tahun 2017 .....	104
Tabel 51	Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Kegiatan Tahun 2017.....	108
Tabel 52	Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Satker.....	109
Tabel 53	Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDA Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja .....	109
Tabel 54	Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDA Tahun 2017 Berdasarkan Sumber Dana.....	110
Tabel 55	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja .....	110
Tabel 56	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja .....	110
Tabel 57	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Satker ....	111
Tabel 58	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja .....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	3
Gambar 2	Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2017.....	4
Gambar 3	Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017 .....	5
Gambar 4	Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2017	6
Gambar 5	Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2017 .....	7
Gambar 6	Perbandingan Jumlah Aset Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017 .....	8
Gambar 7	Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita .....	11
Gambar 8	Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE .....	12
Gambar 9	Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2017 .....	23
Gambar 10	Grafik Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2017	32
Gambar 11	Perkembangan Data Wisatawan Tahun 2013-2017 .....	33
Gambar 12	Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta pada Event Deep & Extreme Indonesia 2017.....	33
Gambar 13	Bahan Promosi Dan Publikasi Yang Dicitak Dalam Rangka Peningkatan Kunjungan Ke Kawasan Konservasi.....	33
Gambar 14	Wisatawan Malaysia Yang Kembali Dalam Pendakian Di Gunung Rinjani Melewati Jalur Senaru	34
Gambar 15	Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017	37
Gambar 16	Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pemanfaatan dan Pengusahaan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Bandung	39
Gambar 17	Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) Air Terjun Coban Jodo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.....	40
Gambar 18	Pusat Informasi di Taman Nasional Tanjung Puting.....	40
Gambar 19	Pembinaan dan Uji Kompetensi Usaha Jasa Pemandu Wisata Alam di Taman Nasional Gunung Ciremai .....	40
Gambar 20	Pusat Ekologi Kupu-Kupu di TWA Gunung Tunak, BKSDA Nusa Tenggara Barat .....	40
Gambar 21	Sarana Prasarana yang Dibangun oleh Pemegang IUPSWA (PT. Plengkung Indah Wisata) di TN Alas Purwo .....	40
Gambar 22	Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017	42
Gambar 23	Pemanfaatan Air Oleh Masyarakat dari TN Gunung Merbabu, Jawa Tengah .....	44
Gambar 24	Pembahasan RPPA PDAM Tirta Jati Kab. Cirebon, Pengusahaan Air di TN Gunung Ciremai .....	44
Gambar 25	Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017 .....	45
Gambar 26	Kegiatan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Pemanfaatan Energi Air di Padang, Sumatera Barat.....	47
Gambar 27	Pelatihan Pengembangan PLTMH .....	47
Gambar 28	PLTM Lapopu di TN Matalawa.....	47
Gambar 29	Peninjauan Rencana Lokasi PLTM di TWA Gunung Baung, BBKSDA Jawa Timur.....	47
Gambar 30	PT. Indonesia Power di TN Gunung Halimun Salak .....	51
Gambar 31	Star Energy Geothermal Darajat II di CA Papandayan, BBKSDA Jawa Barat.....	51
Gambar 32	Data PNBPN TSL Tahun 2014-2017 (Rupiah)	53
Gambar 33	Perbandingan Data PNBPN Berdasarkan Jenis PNBPN Tahun 2015-2017 .....	54
Gambar 34	Data Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> tahun 2014 - 2017.....	56
Gambar 35	Perkembangan Jumlah KK yang Mencapai Nilai METT 70% Tahun 2015-2017	61
Gambar 36	Nilai Efektivitas Pengelolaan Masing-Masing Fungsi Kawasan	62
Gambar 37	Histogram Distribusi Normal Rata-Rata Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia Tahun 2017 .....	62

Gambar 38	Owa Jawa ( <i>Hylobates moloch</i> ) di Site Monitoring BKSDA Jawa Tengah .....	65
Gambar 39	Banteng ( <i>Bos javanicus</i> ) di Site Monitoring BTN Kayan Mentarang	65
Gambar 40	Cenderawasih ( <i>Paradisea minor</i> ) di Site Monitoring BBKSDA Papua .....	66
Gambar 41	Kegiatan Pemasangan <i>Camera Trap</i> monitoring Anoa BKSDA Sulawesi Utara ..	67
Gambar 42	Penjelajahan Jalur Pengamatan dan Monitoring Satwa di BBKSDA Jawa Barat.....	67
Gambar 43	Perbandingan Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Genetik Tahun 2015-2017 .....	74
Gambar 44	Identifikasi Tanaman Obat Di Demplot Pengembangan Tanaman Obat TN Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi .....	74
Gambar 45	Data dan Informasi Tanaman Obat di TN Gunung Rinjani .....	75
Gambar 46	Kawasan mangrove Torosiaje, Provinsi Gorontalo .....	80
Gambar 47	Mangrove di Kawasan Mangrove Lembar.....	80
Gambar 48	Luas KEE Tahun 2015 – 2017 .....	83
Gambar 49	Peta Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2017.....	84
Gambar 50	Perkembangan Jumlah KPHK Tahun 2015-2017.....	88
Gambar 51	Gerbang Masuk dan Pos Jaga di TWA Gunung Tunak.....	89
Gambar 52	Pembangunan Gedung Serbaguna	89
Gambar 53	Kelompok PAAP di TN Takabonerate.....	93
Gambar 54	Penandatanganan PKS dan Lokasi PAAP di TNKJ (doc. BTNKJ) .....	94
Gambar 55	Perkembangan luas kawasan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat tahun 2015-2017.....	94
Gambar 56	Madu produksi BTNBKDS (ki) dan Ekspose Role Model Pengelolaan Zona Tradisional di TN Bukit Tiga Puluh (ka).....	95
Gambar 57	Workshop pemberian akses dalam pemanfaatan zona/blok tradisional di KPA.....	98
Gambar 58	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran di SM Rawa Singkil.....	106
Gambar 59	Upaya Pemadaman oleh Bridalkarhut dan MPA .....	106
Gambar 60	Grafik Trend Kejadian Kebakaran di Kawasan Konservasi.....	106
Gambar 61	Perkembangan Pagu Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017.....	108

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Target Kinerja dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 .....	115
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2017 .....	120
Lampiran 3	Jumlah Wisatawan Pada Kawasan Konservasi tahun 2017 .....	123
Lampiran 4	Data Peningkatan Populasi 25 Satwa Terancam Punah Prioritas tahun 2017 .....	129
Lampiran 5	Daftar Kawasan Konservasi yang dapat Dilindungi Dari Ancaman Kebakaran Hutan tahun 2017 .....	133
Lampiran 6	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Satker Ditjen KSDAE Tahun 2017 .....	143
Lampiran 7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2015-2017 .....	117

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merupakan bagian dari institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas penting dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor: 5 Tahun 1990, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, yang dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam upaya pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Ditjen KSDAE melaksanakan Program **Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebagaimana telah dituangkan pula dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen KSDAE disusunlah Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja disusun setelah tahun anggaran berakhir, yang berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE. Laporan Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2017 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Ditjen KSDAE sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang terdapat dalam Rencana Strategis Ditjen KSDAE Tahun 2015 - 2019 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

## BAB I PENDAHULUAN

### B. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut.

#### 1. Kedudukan

Direktorat Jenderal KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal KSDAE dipimpin oleh Direktur Jenderal.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; serta;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## BAB I PENDAHULUAN

### 3. Struktur Organisasi

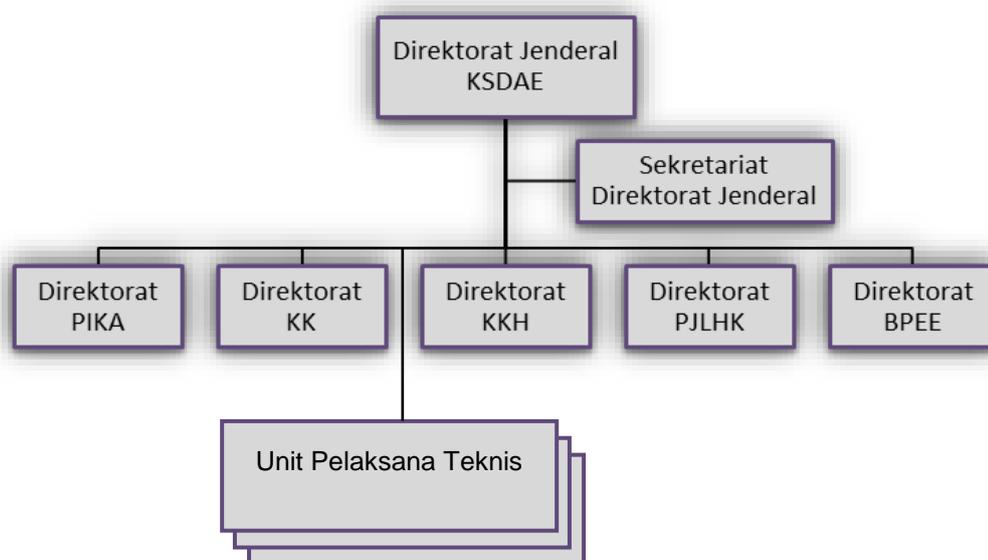
Dalam pelaksanaan kegiatan, Ditjen KSDAE dibantu oleh enam Eselon II Pusat, yaitu :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- c. Direktorat Kawasan Konservasi;
- d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
- f. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II) dan Balai (setingkat Eselon III), yaitu sebagai berikut:

- a. Balai Besar KSDA : 8 UPT
- b. Balai Besar Taman Nasional : 8 UPT
- c. Balai KSDA : 18 UPT
- d. Balai Taman Nasional : 40 UPT

Selengkapnya Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

## BAB I PENDAHULUAN

### C. SUMBER DAYA DAN SARANA PENDUKUNG

#### 1. Kawasan Konservasi

Luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai **27.140.384,04** Ha yang terbagi dalam 552 unit kawasan konservasi. Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi**

No	Fungsi	Jumlah	Luas (Ha)
1	Cagar Alam	214	4.248.131,78
2	Suaka Margasatwa	79	4.982.406,13
3	Taman Wisata Alam	131	829.276,66
4	Taman Buru	11	171.250,00
5	Taman Hutan Raya	34	371.124,39
6	Taman Nasional	54	16.232.132,17
7	KSA/KPA	29	306.062,92
	<b>TOTAL</b>	<b>552</b>	<b>27.140.384,05</b>

Sumber: Direktorat PIKA, 2017

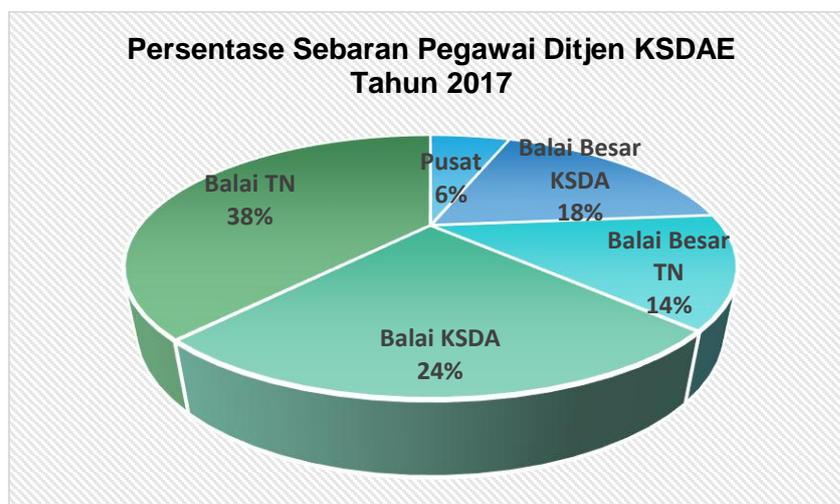
#### 2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2017 Ditjen KSDAE didukung pegawai sebanyak **6.829 orang**. Sebaran pegawai pada Ditjen KSDAE adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017**

No	Satker	Jumlah Pegawai (orang)	%
1	Pusat	389	5,70
2	Balai Besar KSDA	1.223	17,91
3	Balai Besar TN	933	13,66
4	Balai KSDA	1.667	24,41
5	Balai TN	2.617	38,32
	Total	<b>6.829</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, 2017

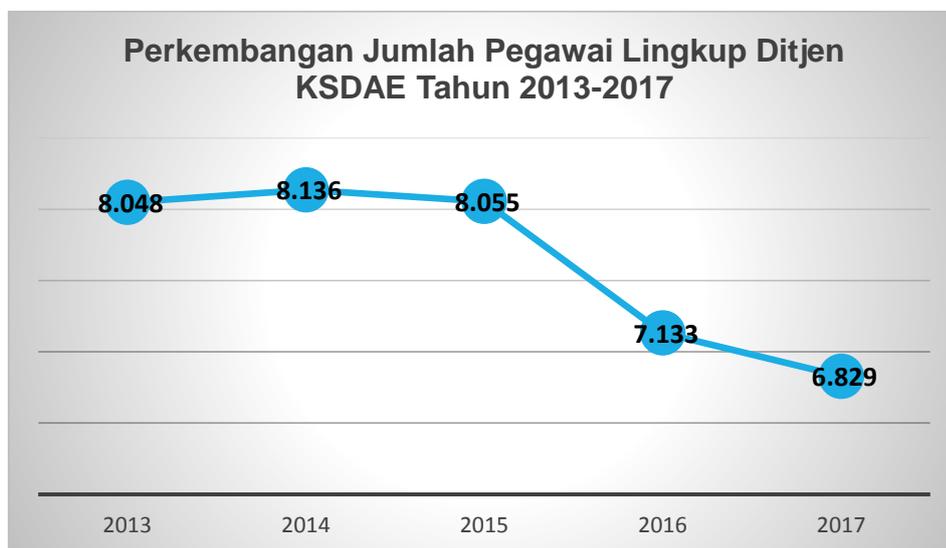


**Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2017**

## BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebaran pegawai terbanyak pada satker Balai Taman Nasional (38,32%), terbanyak kedua pada satker Balai KSDA (24,41%), dan yang terendah pada satker pusat (5,70%). Hal ini dikarenakan jumlah satker yang banyak pada Balai TN (40 satker) dan Balai KSDA (18 satker) sehingga jumlah pegawainya juga banyak. Sedangkan di pusat hanya terdiri dari 6 satker sehingga jumlah pegawainya lebih sedikit.

Perkembangan pegawai dalam lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 3. Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017**

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Jumlah tertinggi selama 5 tahun terakhir pada tahun 2014 sebanyak 8.136 orang. Selanjutnya menurun selama 3 tahun berikutnya. Jumlah pegawai Ditjen KSDAE pada tahun 2016 mengalami penurunan 11,45% dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 terdapat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana pada Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dipecah menjadi tiga Eselon I yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK). Sehingga pegawai dari Ditjen PHKA dipecah juga pada tiga Eselon I tersebut, yang mengakibatkan turunnya jumlah pegawai pada Ditjen KSDAE. Pada tahun 2017, jumlah pegawai Ditjen KSDAE juga menurun 4,25% dibandingkan tahun 2016. Hal ini disebabkan banyak pegawai yang pensiun dan juga pindah ke Eselon I lain.

Kondisi kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

Satker	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA/D1/D2	SLTP	SD	Jumlah
Pusat	5	106	131	43	95	6	3	389
UPT	12	470	1.772	404	3.569	120	93	6.440
Jumlah	17	576	1.903	447	3.664	126	96	6.829
%	0,25	8,43	27,87	6,55	53,65	1,85	1,41	100

Sumber: Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, 2017

## BAB I PENDAHULUAN

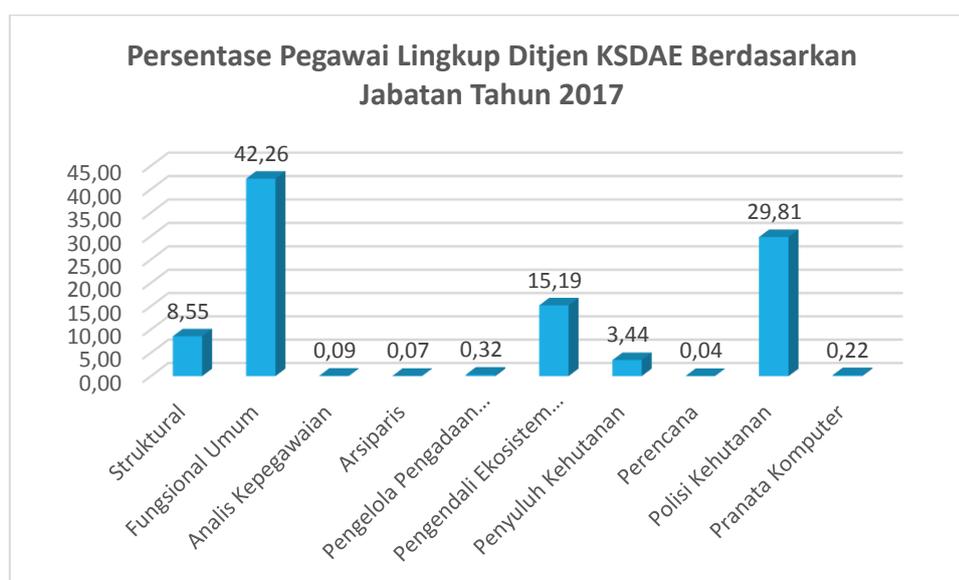
Berdasarkan tabel di atas, pegawai lingkup Ditjen KSDAE didominasi dari lulusan SLTA/D1/D2 sebanyak 3.664 orang (53,65%), terbanyak kedua adalah lulusan S1/D4 sebanyak 1.903 orang (27,87%), sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit adalah pendidikan S3 sebanyak 17 orang (0,25%).

Apabila dilihat dari segi jabatannya, komposisi terbesar adalah untuk jabatan fungsional umum yang mencapai 42.886 orang (42,26%) diikuti Polisi Hutan sebesar 2.036 orang (29,81%). Besarnya jumlah Polisi Hutan dapat dipahami mengingat banyaknya kawasan yang harus dijaga dan permasalahan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang sangat kompleks sehingga menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk ditempatkan di lapangan dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Untuk jabatan Calon Fungsional Tertentu (Calon PEH, Calon Polhut, Calon Penyuluh, Calon Analisis Kepegawaian, Calon Statistisi, Calon Arsiparis, dan Calon Pranata Komputer) masih termasuk dalam golongan jabatan Fungsional Umum, karena Surat Keputusan (SK) Fungsional Tertentu belum terbit, sehingga dalam aplikasi SIMPEG belum bisa dimasukkan ke dalam jabatan Fungsional Tertentu. Gambaran selengkapnya komposisi pegawai lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan jabatannya adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2017**

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Struktural	584	8,55
2	Fungsional Umum	2.886	42,26
3	Analisis Kepegawaian	6	0,09
4	Arsiparis	5	0,07
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	22	0,32
6	Pengendali Ekosistem Hutan	1.037	15,19
7	Penyuluh Kehutanan	235	3,44
8	Perencana	3	0,04
9	Polisi Kehutanan	2.036	29,81
10	Pranata Komputer	15	0,22
	<b>Jumlah</b>	<b>6.829</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, 2017



**Gambar 4. Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2017**

## BAB I PENDAHULUAN

Dilihat dari komposisi umur, komposisi tertinggi jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE adalah pada umur 51 - 56 tahun sejumlah 1.375 orang (20,13%). Sedangkan komposisi terendah ada pada umur 21 - 26 tahun sejumlah 59 orang (0,89%). Berdasarkan komposisi umur, kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE disajikan sebagaimana tabel dan gambar berikut.

**Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2017**

Satker	≥ 56 < 60	≥ 51 < 56	≥ 46 < 51	≥ 41 < 46	≥ 36 < 41	≥ 31 < 36	≥ 26 < 31	≥ 21 < 26	Jumlah
Pusat	46	109	33	56	57	69	17	2	389
UPT	455	1.266	754	1.171	1.071	1.301	363	59	6.440
Jumlah	501	1.375	787	1.227	1.128	1.370	380	61	6.829

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, 2017

Sebaran pegawai Ditjen KSDAE berdasarkan umur disajikan dalam Gambar 5.



**Gambar 5. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2017**

### 3. Sarana dan Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 sebesar **Rp. 3.000.549.099.502,-**. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 terdiri atas :

#### a. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 sebesar **Rp. 2.957.734.062.897,-**.

#### b. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 15.678.093.765,-**.

## BAB I PENDAHULUAN

### c. Aset Lainnya

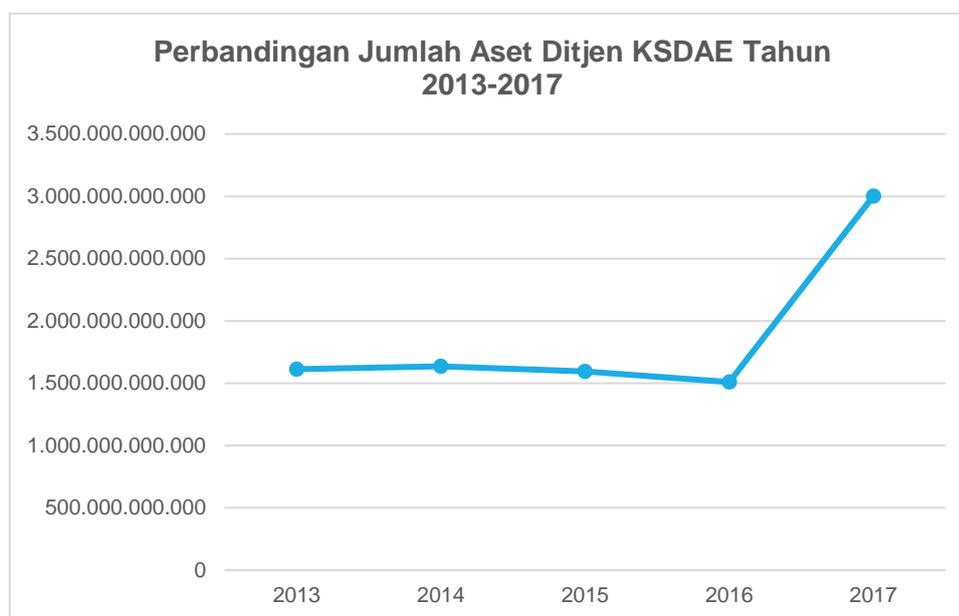
Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 27.136.942.840,-**.

Nilai aset yang dikelola Ditjen KSDAE selama tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 6. Aset Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017**

Tahun	Aset Tetap (Rp.)	Aset Lancar (Rp.)	Aset Lainnya (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2013	1.572.956.197.178	23.364.689.829	15.882.519.783	1.612.203.406.790
2014	1.595.824.750.913	14.781.005.558	24.320.165.935	1.634.925.922.406
2015	1.554.477.806.458	17.111.488.820	23.906.911.590	1.595.496.206.868
2016	1.465.333.359.230	16.987.316.802	27.602.113.380	1.509.922.789.412
2017	2.957.734.062.897	15.678.093.765	27.136.942.840	3.000.549.099.502

Sumber : Setditjen KSDAE, 2017



**Gambar 6. Perbandingan Jumlah Aset Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017**

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017 jumlah aset Ditjen KSDAE mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat sebesar 98,72% dibandingkan dengan aset tahun 2016. Hal ini karena pada tahun 2017 dilaksanakan proses revaluasi (penilaian kembali) terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan, yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Tahun 2017.

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE untuk pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi selama lima tahun.

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh Kementerian dan/atau Lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam Gambar 7. Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.



**Gambar 7. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita**

### **Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :**

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

### **Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :**

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan nasional, dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

pendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksud, yaitu :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; serta
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan, sebagaimana Gambar 8. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. **Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.**



**Gambar 8. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari tiga sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu : (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

Sehingga, **sasaran program Ditjen KSDAE** dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati;
- b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

### 2. Program dan Kegiatan Ditjen KSDAE

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan **Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**. Program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui **delapan kegiatan**, yaitu :

- 1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- 2) Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 3) Konservasi Spesies dan Genetik;
- 4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
- 5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial;
- 6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
- 7) Pengelolaan Taman Nasional;
- 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 7. Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019

Program	Tujuan	Sasaran ( <i>Outcome</i> atau Hasil Yang diinginkan)	<i>Impact</i> (Dampak)	Indikator Kinerja Program
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</li> <li>2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)</li> <li>2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit</li> <li>3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013</li> </ol>
		Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun</li> <li>5. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara</li> <li>6. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara</li> <li>7. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara</li> <li>8. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit</li> <li>9. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)</li> </ol>

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### B. TARGET JANGKA MENENGAH

Tahapan pencapaian IKP selama tahun 2015-2019 dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 8. IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019**

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Sasaran 1 : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati</b>						
1.	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50	100	150	200	260
2.	Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20	100	100	100	100
3.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> ) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
4.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13	26	39	43	48
5.	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7	7	7	7	7
<b>Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati</b>						
6.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun	5	10	15	20	25
7.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,25	1,5
8.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
9.	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan <i>Geothermal</i> sebanyak 5 Unit)	25	51	77	103	130

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen KSDAE dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yang menggambarkan kegiatan dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah). Masing-masing kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2015-2019.

Rincian dari proses pencapaian target kinerja kegiatan (komponen) pelaksanaan kinerja secara indikatif dari Program KSDAE sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 diuraikan dalam Lampiran 1. Komponen atau proses dari tahapan pencapaian target IKK (keluaran/*output*), yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dibedakan antara proses yang dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat pusat dengan satuan kerja tingkat UPT. Proses yang dilaksanakan di tingkat pusat merupakan jabaran dari level operasional tugas dan fungsi satuan kerja di tingkat pusat, sedangkan proses yang dilaksanakan oleh UPT merupakan jabaran dari level teknis operasional di tingkat tapak.

Untuk keseragaman proses dari tahapan pencapaian target IKK di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, maka komponen dari setiap IKK telah diupayakan untuk distandarkan. Adapun dalam pelaksanaannya, komponen dimaksud bersifat opsional di setiap satuan kerja, mengingat adanya kondisi-kondisi yang spesifik di masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diperlukan pedoman pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagai penjelasan lebih lanjut atas Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

### C. TARGET TAHUNAN

#### 1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

##### a. Rencana Kerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja (*performance*) dan akuntabilitas (*accountability*) penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE pada seluruh Satker, Ditjen KSDAE menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Renja Ditjen KSDAE Tahun 2017 telah disusun sebagai Suplemen Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.4/KSDAE/Set/Ren.0/9/2016 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017. Matrik Renja Ditjen KSDAE tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017**

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi (Juta Rupiah)
<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>					<b>1.980.941,00</b>
1	<b>Konservasi Spesies dan Genetik</b>				<b>13.500,00</b>
		Meningkatnya TSL dan Bioprospecting	Nilai ekspor TSL dan <i>Bioprospecting</i>	5,3 Trilyun	1.500,00
		Mewujudkan keamanan hayati, keamanan pangan, dan/atau pakan PRG bagi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip kesehatan serta pengelolaan sumberdaya hayati dan perlindungan konsumen dari perdagangan internasional yang tidak adil	Jumlah hasil <i>assessment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 Produk Rekayasa Genetika (PRG)	1.200,00
		Mengimplementasikan ketentuan dalam Protokol Nagoya dalam rangka memfasilitasi akses dan menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang.	Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	4 Prior Informed Consent (PIC)	1.600,00
		Peningkatan kertas posisi Indonesia dalam Pertemuan Konvensi Internasional bidang perundingan perdagangan internasional berbasis keanekaragaman hayati	Jumlah kertas posisi Indonesia di Perundingan Perdagangan Internasional berbasis Keanekaragaman Hayati	4 Kerpos	800
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	1.700,00
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati pada lembaga konservasi	Jumlah penambahan jenis satwa liar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 spesies	700
		Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 unit	10 unit	1.600,00

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi (Juta Rupiah)
		Meningkatnya PNPB dari hasil pemanfaatan TSL	Besara PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp. 50 M	Rp. 10 M	500
		Tersedianya data dan informasi sebarab keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 wilayah biogeografi	1.700,00
		Tersedianya sistem basis data balai kliring nasional	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik ditingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 unit	600
		Tercapai dan beroperasinya Suaka Satwa (Sanctuary) species terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa ( <i>sanctuary</i> ) species terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	6 unit	1.600,00
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>				<b>9.500,00</b>
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di Pesisir dan Laut	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di pesisir dan laut	30 dokumen RP	1.300,00
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	30 unit	1.700,00
		Terpilihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	20.000ha	1.600,00
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 desa	1.000,00
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	20.000 ha	1.200,00
		Beroperasinya KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 unit	1.100,00
		Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 provinsi	1.600,00
<b>3</b>	<b>Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>				<b>10.000,00</b>
		Terintegrasinya zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 ( <i>One Map Policy</i> ) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	Jumlah data spasial zonasi/ blok pengelolaan kawasan konservasi yang terverifikasi dan terintegrasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 ( <i>One Map Policy</i> ) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	551 Kawasan Konservasi di 34 Provinsi	1.900,00
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	110 unit	1.500,00
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 paket data	2.200,00
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	800
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	1.400,00

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi (Juta Rupiah)
		Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit	2.200,00
<b>4</b>	<b>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</b>				<b>11.500,00</b>
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional dan taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	2.500.000 orang	3.200,00
		Meningkatnya kontribusi kawasan konservasi dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	1.500 Kwatt	1.500,00
		Meningkatnya kontribusi Kawasan Konservasi non Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	5 Unit	1.700,00
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	1.600,00
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi kawasan konservasi minimal 25 unit	5 unit	900
		Registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 unit KK	2 KK	2.600,00
<b>5</b>	<b>Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial</b>				<b>6.500,00</b>
		Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	6 kawasan mangrove di 2 Ekoregion (Sumatera dan Jawa)	4.600
			Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE	13 KEE	200
		Tersedianya paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 paket data	14 paket data	150
		Terbentuknya rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direview sebanyak 48 dokumen	14 Dokumen	300
		Terbentuknya kawasan ekosistem karst yang ditetapkan pengelolaannya	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan	2 kawasan	150
		Tersedianya koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasi	Jumlah koleksi spesies lokal/endemik/langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 spesies	60 spesies	100
<b>6</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem</b>				<b>61.900,00</b>
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77,5 poin	77,5	61.900,00
<b>7</b>	<b>Konservasi Sumber Daya Alam Hayati</b>				<b>839.849,00</b>
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	1.000.000 orang	18.000,00

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi (Juta Rupiah)
		Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa ( <i>Sanctuary</i> ) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di KK non TN	Jumlah <i>sanctuary</i> yang terbangun dan beroperasi di kawasan konservasi non taman nasional untuk menjadi objek wisata	6 unit	30.000,00
		Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional	Jumlah desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di kawasan konservasi non taman nasional	10 Kawasan Konservasi	5.000,00
		Keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi non taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan	Luas hutan di kawasan konservasi non taman nasional yang terbakar maksimal 10.908 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi maksimum tahun 2015 seluas 12.120 Ha)	Maksimum 10.908 Ha	30.000,00
		Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan TWA	Panjang jalan akses wisata dalam kawasan TWA	125 km	12.500,00
		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TWA	Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge, MCK, tempat pengolahan sampah, pondok pemandu dll) di kawasan konservasi yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional	10 paket (dibreakdown per paket)	46.000,00
		Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan konservasi laut non taman nasional	Jumlah unit kawasan konservasi non taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	18 Unit Kawasan Konservasi	18.480,00
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (CA Laut, SM Laut dan TWA Laut) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	10 unit	5.000,00
		Meningkatnya kontribusi TWA dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari TWA	500 Kwatt	25.000,00
		Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	35 unit	225
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut	Peningkatan populasi penyu, dan keanekaragaman jenis ikan di kawasan konservasi non taman nasional pesisir dan laut	2%	915
		Meningkatnya kontribusi Kawasan Konservasi non Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di Kawasan Konservasi non Taman Nasional	5 Unit	5.444,00
		Tersedianya arahan pengelolaan/ pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi non TN (blok pengelolaan) sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	Jumlah penataan blok pengelolaan kawasan konservasi non TN sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	413 Kawasan Konservasi Non- Taman Nasional	8.776,00
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi non TN	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi non TN yang memiliki usaha ekonomi produktif	27 desa	29.600,00
		Menurunnya gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional	Prosentase gangguan pada kawasan konservasi non taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 149 kejadian	Maksimum 125 kejadian	37.500,00

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi (Juta Rupiah)
		Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	26 unit	2.000
		Meningkatnya TSL dan Bioprospecting	Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke Luar Negeri bersertifikat	30 unit	3.000,00
		Tersedianya bahan baku untuk industri berbasis tumbuhan dan satwa liar (TSL)/ <i>bioresources</i>	Produksi hasil penangkaran TSL dari kelas: a) Anthozoa 2.500.000 pcs; b) Mamalia 4500 ekor; c) Herpetofauna 3.500.000 ekor	6004500 ekor/pcs	11.000,00
			Produksi hasil pemanfaatan TSL dari alam, kelas: a) Mamalia 5.030 ekor; b) Reptil 1.848.916 ekor ; c) Amphibia 83.839.375 ekor; d) Burung 7.695 ekor ; e) Arthropoda 70.435 ekor; f) Anthozoa 1.979.750 pcs; g) Pisces 10.000 ekor; h) Tumbuhan 975.103 pcs	6004500 ekor/pcs	13.200,00
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013		5.000
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati pada lembaga konservasi	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013		1.500
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	300
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	240
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	160
		Terbentuknya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	80 Unit	0
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	150
		Terpilihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya seluas 100.000 Ha	1.000 Ha	10.200
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen RP	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	1.500
		Meningkatnya PNBP dari hasil pemanfaatan TSL	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	1.000
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	500
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit	1.200

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi (Juta Rupiah)
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 unit	1.000
		Terbentuknya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	600
		Terbentuk dan beroperasinya KPHK non taman nasional di pesisir dan laut (Renja Aplikasi)	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	35	105.000
		Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	6 unit	400
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77.5 poin	77,5	409.459
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Taman Nasional</b>				<b>1.028.192,00</b>
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan taman nasional	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik	1.500.000 orang	147.000,00
		Terbangun dan beroperasinya Suaka satwa ( <i>Sanctuary</i> ) spesies terancam punah prioritas sebagai daya tarik wisata di TN	Jumlah <i>sanctuary</i> yang terbangun dan beroperasi di taman nasional untuk menjadi objek wisata	6 unit	30.000,00
		Tersusunnya desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di taman nasional	Jumlah desain tapak untuk pembangunan sarpras wisata alam di taman nasional	14 TN	7.000,00
		Keanekaragaman hayati di dalam taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan	Luas hutan di taman nasional yang terbakar maksimal 39.524 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi maksimum tahun 2015 seluas 43.915 Ha)	Maksimum 39.524 Ha	48.000,00
		Pembangunan jalan akses wisata dalam kawasan Taman Nasional	Panjang jalan akses wisata dalam kawasan TN	165.8 km	16.580,00
		Pemenuhan sarpras wisata alam yang layak dan memadai di TN Prioritas Nasional destinasi wisata	Jumlah sarana prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge dll) di taman nasional yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional destinasi wisata	4 paket (TN Komodo, TN Wakatobi, TN Kep. Seribu, TN. Bromo Tengger Semeru)	47.600,00
		Meningkatnya kontribusi Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis air (mini/mikro hidro)	Energi yang dihasilkan dari mini/mikro hidro dari Taman Nasional	1000 Kwatt	12.500,00
		Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan taman nasional laut	Jumlah unit kawasan taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	15 Unit	17.989,00
		Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati	Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	20 Taman Nasional	15.000,00
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di taman nasional pesisir dan laut	Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	2%	35.000,00
		Meningkatnya kontribusi Taman Nasional dalam penyediaan energi berbasis panas bumi	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di Taman Nasional	5 Unit	3.323,00

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi (Juta Rupiah)
		Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar TN	Jumlah desa di daerah penyangga TN yang memiliki usaha ekonomi produktif	51 desa	46.100,00
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN	Luas zona tradisional pada taman nasional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	250.000 ha (47 desa)	33.500,00
		Tersedianya arahan pengelolaan/ pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi TN (zonasi) sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	Jumlah penataan zonasi pengelolaan kawasan taman nasional sebagai informasi bagi masyarakat desa/adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi tepat guna	3 TN	3.100,00
		Menurunnya gangguan pada kawasan taman nasional	Persentase gangguan pada kawasan taman nasional berkurang sebesar 15% per tahun dari baseline data tahun 2014 sebanyak 142 kejadian	Maksimum 124 kejadian	90.000,00
		Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya	51 unit	5.000
		Terpulihkannya kawasan konservasi yang terdegradasi	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	1.000 Ha	10.100
		Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	10 Dokumen	200
		Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	250
		Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	500
		Terwujudnya kerjasama pembangunan dan penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	200
		Terbentuknya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen RP	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	300
		Meningkatnya populasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	2.000
		Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	700
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan pariwisata alam di KK	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	500
		Tersedianya unit usaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan air di KK	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	750

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Alokasi (Juta Rupiah)
		Terbentuknya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	1.200
		Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 minimal 77.5 poin	77,5	453.800

### b. Pembiayaan

Pagu indikatif Ditjen KSDAE Tahun 2017 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan). Sesuai dengan RKP 2017, pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp. 1.980.940,834.000,-. Indikasi anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

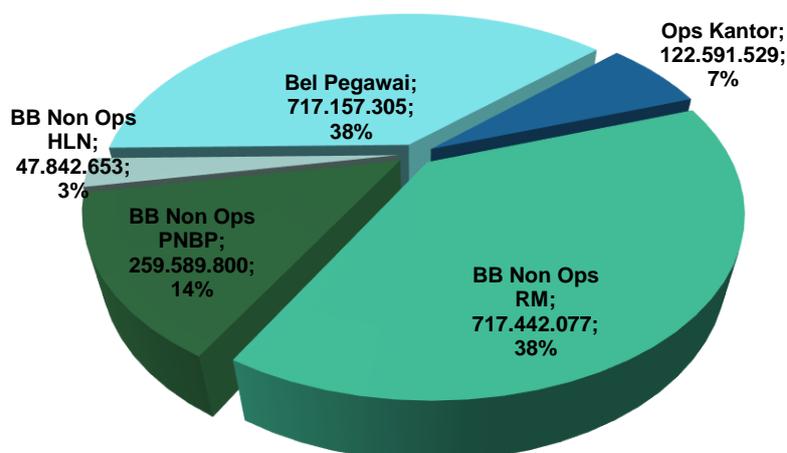
Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi **money follow program** yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja. Sesuai dengan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga diharapkan pengelolaan kawasan konservasi dapat lebih optimal dibandingkan tahun 2016 dimana anggaran tahun 2016 banyak mengalami penghematan anggaran sehingga menyulitkan satker UPT dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut. Untuk tahun 2017, sesuai dengan trilateral meeting pagu indikatif Ditjen KSDAE sebesar Rp. 1.980.940.834.000,- namun dengan kebijakan penghematan anggaran maka pagunya menjadi Rp. 1.864.623.364.000 dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut.

**Tabel 10. Anggaran Per Jenis Belanja Ditjen KSDAE Tahun 2017**

No	Jenis Belanja	RM	PNBP	HLN	Jumlah	%
1	Belanja Pegawai	717.157.305	-	-	717.157.305	38
2	Belanja Operasional	122.591.529	-	-	122.591.529	7
3	Belanja Non Ops/Modal	717.442.077	259.589.800	47.842.653	1.024874.530	55
	Total	1.557.190.911	259.589.800	47.842.653	1.864.623.364	100
	% Sumber Dana	83	14	3	100	

## BAB II PERENCANAAN KINERJA



Gambar 9. Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2017

### 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke kawasan konservasi	2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi	30 unit atau Rp. 3,7 Milyar
		Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	Rp. 10 Milyar
		Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting	Rp. 5,3 Trilyun
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keaneekaragaman Hayati	Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)	17 unit KK
		Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)	30 unit TN
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>	2%
		Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keaneekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa,	7 paket data

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	
		Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	300.000 Ha dalam 13 unit KEE
		Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi	10 unit
		Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	20.000 Ha
		Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran	551 unit KK

Pernyataan PK Ditjen KSDAE Tahun 2017 yang telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal KSDAE selengkapnya disampaikan dalam Lampiran 2.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. Reviu Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Pada tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 lingkup Ditjen KSDAE. Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Eselon I Ditjen KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 70,26 dengan kategori BB (sangat baik), yang artinya bahwa Ditjen KSDAE dalam pelaksanaan manajemen kinerja telah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai 21,20;
- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai 19,36;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai 12,13;
- d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai 6,97;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai 10,60.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen KSDAE yang merupakan gabungan dari Sekretariat Ditjen, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK), Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPÉE), Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), dan Direktorat Kawasan Konservasi (KK), dengan rincian sebagai berikut.

#### a. Perencanaan Kinerja (bobot 30%), dengan nilai 21,20 yang terdiri dari:

- 1) Perencanaan Strategis (bobot 10%) dengan nilai 7,30 yaitu:
  - a) Pemenuhan Renstra (bobot 2%) dengan nilai 1,80;
  - b) Kualitas Renstra (bobot 5%) dengan nilai 3,18. Kelemahannya yaitu:
    - (1) Indikator Kinerja Program (IKP) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time Based*, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, sesuai dengan kurun waktu tertentu), antara lain:
      - (a) Peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT).
      - (b) Peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.
    - (2) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
  - c) Implementasi Renstra (bobot 3%) dengan nilai 2,32. Kelemahannya yaitu Renstra telah direviu, namun hasil reviu belum ditindaklanjuti dengan revisi Renstra.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan (bobot 20%) dengan nilai 13,90 yaitu:
  - a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (bobot 4%) dengan nilai 3,36. Kelemahannya yaitu:
    - (1) Dalam Rencana Aksi (RA) belum ada langkah nyata untuk mencapai kinerja program, antara lain:
      - (a) Nilai ekspor satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting*;
      - (b) Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi;
      - (c) Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Treatedened Species);
      - (d) Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
    - (2) IKP dalam Perjanjian Kinerja (PK) belum sepenuhnya SMART.
  - b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (bobot 10%) dengan nilai 6,44. Kelemahannya yaitu indikator kinerja dan target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
  - c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (bobot 6%) dengan nilai 4,10.

**b. Pengukuran Kinerja** (bobot 25%) dengan nilai 19,36 yang terdiri dari:

- 1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja (bobot 5%) dengan nilai 4,42. Kelemahannya yaitu SOP pengukuran kinerja ada, namun belum ada prosedur kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, dan prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan pengukuran data.
- 2) Kualitas Pengukuran Kinerja (bobot 12,5%) dengan nilai 10,06. Kelemahannya yaitu:
  - (a) IKP peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah belum relevan dan realistis karena baseline data yang digunakan adalah data tahun 2013. Pengukuran prosentase peningkatan populasi diukur per tahun, sedangkan periode pengukuran peningkatan populasi tidak dapat dibuat per tahun (berdasarkan hasil rapat koordinasi dan sosialisasi evaluasi kinerja tanggal 31 Mei s.d. Juni 2016. Prosentase target 2% tidak dapat dipertanggungjawabkan secara scientific.
  - (b) Angka peningkatan populasi 25 satwa terancam punah belum mencerminkan pengukuran yang obyektif, karena:
    - (1) Angka tersebut diperoleh dari rata-rata prosentase peningkatan/penurunan tiap spesies dari berbagai site monitoring sedangkan tiap spesies memiliki metode pengukuran yang berbeda dengan periode pengukuran yang berbeda juga.
    - (2) Periode yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah periode satu tahun yang pasti berakhir di akhir tahun sehingga periode pengukuran populasi tiap spesies dipaksakan menggunakan periode sebagaimana dipakai dalam pengukuran kinerja.
  - (c) pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dimana masih terdapat satker-satker yang tidak menyampaikan data kinerja sebagai bahan pengukuran kinerja Eselon I;
- 3) Implementasi Pengukuran Kinerja (bobot 7,5%) dengan nilai 4,88. Kelemahannya yaitu IKP peningkatan populasi 25 spesies terancam punah telah direviu dan ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan.

**c. Pelaporan Kinerja** (bobot 15%) dengan nilai 12,13. Kelemahannya yaitu:

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Pemenuhan pelaporan (bobot 3%) dengan nilai 2,83.
- 2) Penyajian informasi kinerja (bobot 4,5%) dengan nilai 3,19. Kelemahannya yaitu informasi kinerja dalam LKj belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan peningkatan kinerja. Beberapa indikator kinerja seperti Jumlah KPHK, Kawasan Ekosistem Esensial, dan ketersediaan paket data dan informasi pada tahun 2016 tetap menurun (target tidak tercapai).

**d. Evaluasi Kinerja** (bobot 10%) dengan nilai 6,87 terdiri dari:

- 1) Pemenuhan evaluasi (bobot 2%) dengan nilai 1,70. Kelemahannya yaitu belum ada laporan hasil evaluasi yang menggambarkan capaian dan hambatan.
- 2) Kualitas evaluasi (bobot 5%) dengan nilai 2,92. Kelemahannya yaitu dalam evaluasi triwulan, rekomendasi yang diberikan masih bersifat normatif, kurang konstruktif untuk memperbaiki capaian kinerja.
- 3) Pemanfaatan evaluasi (bobot 3%) dengan nilai 2,35. Kelemahannya yaitu hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja, misalnya dalam capaian peningkatan populasi satwa.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi** (bobot 20%) dengan nilai 10,60 yaitu:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (*output*) (bobot 5%) dengan nilai skor 3,73. Kelemahannya yaitu target IKK pada Eselon II tidak seluruhnya tercapai, antara lain di Direktorat KK, dari 7 IKK, hanya 2 IKK (IKK 2 dan 4) yang tercapai sesuai targetnya, 5 IKK lainnya tidak tercapai.
- 2) Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (bobot 10%) dengan nilai 5,60. Kelemahannya yaitu target kinerja (*outcome*) belum sepenuhnya tercapai, antara lain: jumlah KPHK non TN, jumlah kawasan ekosistem esensial terbentuk, dan ketersediaan paket data dan informasi.
- 3) Kinerja lainnya (bobot 5%) dengan nilai 1,27. Kelemahannya yaitu belum ada capaian kinerja lainnya seperti kinerja transparansi, dan kinerja dari penilaian instansi pemerintah lainnya (ombusman, standar mutu, dll).

Terhadap permasalahan di atas, terdapat rekomendasi untuk saran perbaikan, yaitu,

**a. Terhadap komponen perencanaan kinerja** agar :

- 1) Dalam menetapkan target kinerja agar mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per tahun;
- 2) Rencana Aksi yang telah dibuat agar diikuti langkah nyata untuk mencapai kinerja program dan disusun rencana monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala.

**b. Terhadap komponen pengukuran kinerja :**

- 1) SOP pengukuran kinerja yang ada agar dilengkapi dengan prosedur kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, dan prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan pengukuran data;
- 2) IKP dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- 3) IKP yang telah direviu, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja.

**c. Terhadap komponen pelaporan kinerja** agar informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

**d. Terhadap komponen evaluasi kinerja** agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja;

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- e. Terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja yang menurun untuk mengetahui hambatan dan penyelesaiannya serta lebih cermat dalam menetapkan IKP.

### 2. Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja Sesuai PK Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2017

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar **150%** dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017. Terdapat dua sasaran dan 12 indikator kinerja yang diemban oleh Ditjen KSDAE yang tertuang dalam dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja indikator kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke kawasan konservasi	2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar	6.168.857 orang atau Rp 159,40 Milyar	150 (246,75)
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi	30 unit atau Rp. 3,7 Milyar	113 unit	150 (376,67)
		Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	Rp. 10 Milyar	Rp. 24,6 Milyar	150 (245,99)
		Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting	Rp. 5,3 Trilyun	Rp. 7,09 Trilyun	133,87
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)	17 unit KK	38 unit KK	150 (223,53)
		Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)	30 unit TN	2 unit TN	6,67

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i>	2%	5,56%	150 (278)
		Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7 paket data	6 paket data	85,71
		Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	300.000 Ha dalam 13 unit KEE	63.957,9 Ha dalam 14 unit KEE	107,70
		Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi	10 unit	35 unit	150 (350)
		Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	20.000 Ha	25.728,79 Ha	128,64
		Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran	551 unit KK	552 unit KK	100,18
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>121,26</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2017 dapat dicapai sesuai target, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **121,26%**. Akan tetapi terdapat dua IKK yang belum dapat tercapai sesuai target yaitu “Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)” dan “Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang *valid* dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)”. Penjelasan atas capaian indikator kinerja disampaikan sebagai berikut.

**Sasaran 1 :  
Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati**

Sasaran 1 ini dicapai melalui 4 indikator kinerja kegiatan yaitu :

1. Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke kawasan konservasi dengan target 2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar;
2. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit atau Rp. 3,7 Milyar;
3. Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dengan target Rp. 10 Milyar;
4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* dengan target Rp. 5,3 Trilyun.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja disampaikan sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Kegiatan:  
Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke kawasan konservasi dengan target 2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar**

Hasil pencapaian kinerja tahun 2017 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 13. Capaian IKK Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Domestik ke Kawasan Konservasi**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke kawasan konservasi dengan target 2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar	Orang	2.500.000	6.168.857	150 (246,75)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan domestik yang datang ke kawasan konservasi dengan jumlah target wisman tahun 2017 sebanyak 2.500.000 orang. Sampai akhir tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 6.168.857 orang terdiri dari **414.989 orang wisatawan mancanegara dan 5.753.868 orang wisatawan domestik**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar **246,75%**. Karena terdapat pembatasan terhadap capaian kinerja, maka capaian kinerja IKK ini menjadi sebesar **150%**.

Target IKK ini pada Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE berbeda dengan target pada Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019. Pada Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019, target pada jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara tahun 2017 sebanyak 4.300.000 orang, terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 4.000.000 orang dan wisatawan manca negara sebanyak 300.000 orang. Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target tahun 2017 pada Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 14. Capaian IKK Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik ke Kawasan Konservasi Berdasarkan Target Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke kawasan konservasi dengan target 1,5 juta orang selama 5 tahun	Orang	300.000	414.989	138,33
Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke kawasan konservasi dengan target 20 juta orang selama 5 tahun	Orang	4.000.000	5.753.868	143,85
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>4.300.000</b>	<b>6.168.857</b>	<b>143,46</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE ; dan Laporan Keuangan.

*Outcome* yang diperoleh dari pencapaian IKK ini antara lain manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan manfaat tidak langsung berupa *multiplier effect* dari kunjungan wisman berupa pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ditandai salah satunya dengan tumbuhnya unit usaha pemanfaatan jasa wisata alam. Kontribusi PNBP dari Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA) wisman dan wisnus pada tahun 2017 sebesar Rp. 156.324.582.457,-.Capaian kinerja jika berdasarkan jumlah PNBP yang masuk yaitu sebagai berikut.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 15. Penerimaan PNBP dari Pengunjung Wisatawan Manca Negara dan Domestik Tahun 2017**

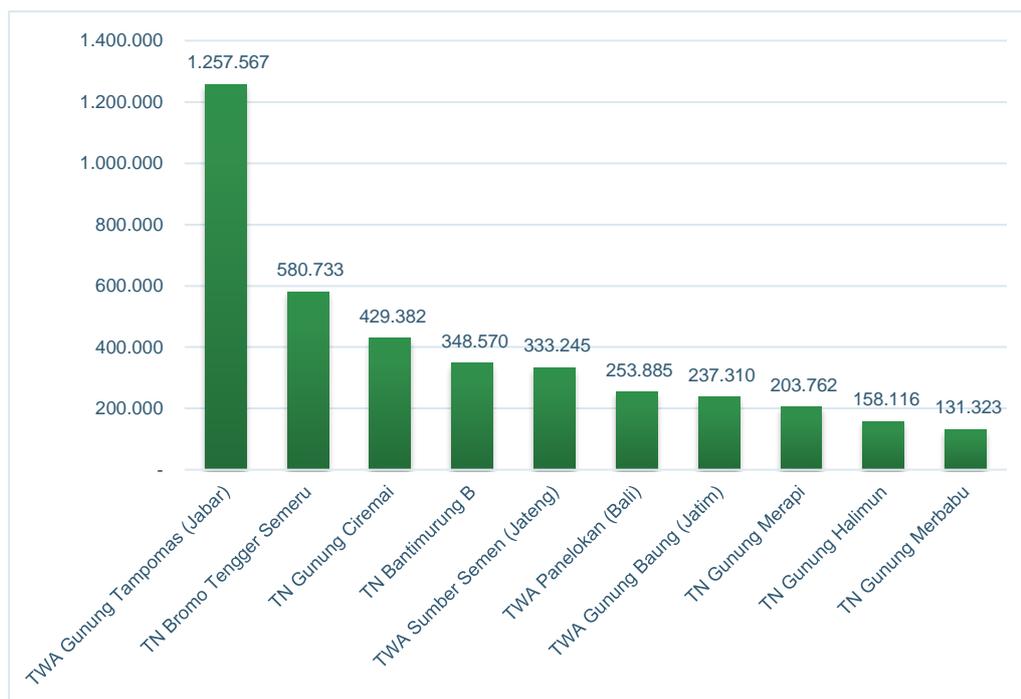
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Penerimaan PNBP dari pengunjung wisatawan manca negara dan domestik	Milyar Rupiah	90,80	156	172,16

Berdasarkan data pada tabel 13 dan tabel 14 di atas, bahwa kinerja telah dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan, baik itu target pada PK dan Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2017 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas berdasarkan Renstra pada TN Karimunjawa, TN Gunung Gede Pangrango, TN Alas Purwo, TN Kerinci Seblat, TN Berbak, TN Teso Nilo, TN Sembilang, TN Gunung Palung, TWA Pulau Weh, TWA Kepulauan Banyak, TWA Sibolangit, TWA Kepulauan Padamaran, TWA Gunung Baung, TWA Mangolo, TWA Gunung Guntur, TWA Wera dan TWA Telogo Warno Telogo Pengilon. Selain itu juga target lokasi yang menjadi prioritas nasional yaitu 4 UPT (BTN Kepulauan Seribu, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Wakatobi dan BTN Komodo) dan 8 UPT (BTN Gunung Rinjani, BKSDA NTB, BTN Bali Barat, BTN Gunung Tambora, BKSDA Sumatera Utara, BTN Gunung Merapi, BTN Gunung Merapi dan BKSDA Jawa Tengah).

Wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2017 tersebar pada 52 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 118 taman wisata alam dan 11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisatawan dan sebagian lainnya dikunjungi wisatawan dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisatawan terbesar berturut turut adalah TWA Gunung Tampomas (Jawa Barat), TN Bromo Tengger Semeru, TN Ciremai, TN Bantimurung Bulusaraung, TWA Sumber seemen (Jawa Tengah), TWA Panelokan (Bali), TWA Gunung Baung (Jawa Timur), TN Gunung Merapi, TN Halimun, dan TN Merbabu. Gambaran jumlah wisatawan dapat dilihat pada grafik berikut.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



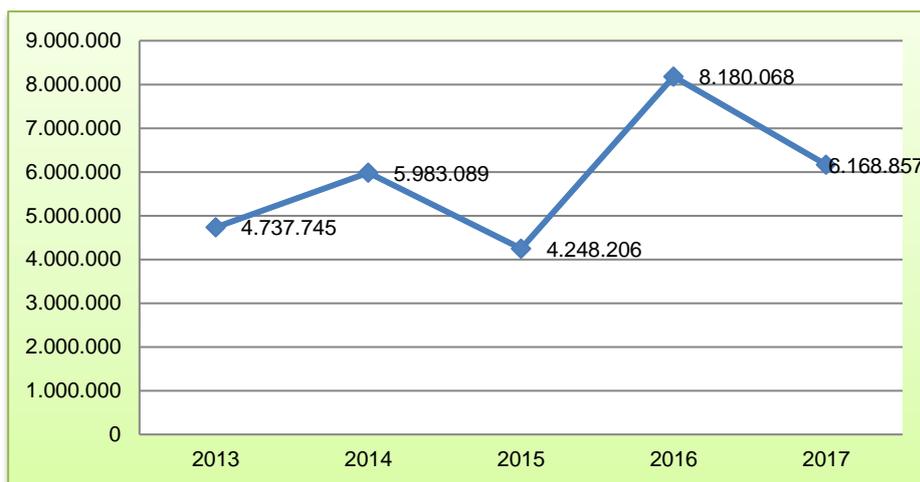
**Gambar 10. Grafik Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisatawan pada Tahun 2017**

**Tabel 16. Perbandingan Data Wisatawan Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Wisman (Orang)	Jumlah Wisnus (Orang)	Jumlah Wisman dan Wisnus (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2013	481.255	4.256.490	4.737.745	33,16
2014	515.216	5.467.873	5.983.089	7,06
2015	210.136	4.038.070	4.248.206	-59,21
2016	481.518	7.698.550	8.180.068	129,15
2017	414.989	5.753.868	6.168.857	-24,59
<b>Jumlah</b>	<b>2.103.114</b>	<b>27.214.851</b>	<b>29.317.965</b>	<b>139,83</b>
<b>Rata-rata/tahun</b>			<b>5.863.593</b>	<b>27,97</b>

Rata-rata jumlah wisman dan wisnus ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir adalah 5.863.593, sedangkan rata-rata pertumbuhan wisman dan wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 27,97% per tahun. Jumlah kunjungan wisata tahun 2017 menurun sebesar 24,59% dari tahun 2016 karena adanya bencana alam seperti erupsi gunung berapi dan banjir di beberapa daerah di Indonesia, sehingga mengurangi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rincian jumlah wisatawan pada masing-masing kawasan sebagaimana Lampiran 3.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Gambar 11. Perkembangan Data Wisatawan Tahun 2013-2017



Gambar 12. Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta pada Event Deep & Extreme Indonesia 2017



Gambar 13. Bahan Promosi Dan Publikasi Yang Dicitak Dalam Rangka Peningkatan Kunjungan Ke Kawasan Konservasi

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 14. Wisatawan Malaysia Yang Kembali Dalam Pendakian Di Gunung Rinjani Melewati Jalur Senaru**

Kinerja jumlah pengunjung ini dapat dicapai dengan baik, beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain :

1. Trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*),
2. Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial dan media elektronik terutama dimotori oleh kaum muda,
3. Lebih gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan P JLHK.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain:

1. Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur traking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, canopy bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya,
2. Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak,
3. Kunjungan wisatawan tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sehingga diduga beberapa kawasan konservasi telah melampaui daya dukung,
4. Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung pengunjung,
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa:

1. Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain;
2. Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada beberapa kawasan konservasi destinasi wisata alam sekitar danau toba, Borobudur dan mandalika;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor: NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 dan Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: PK.91/KS.001/DPDIP/KEMENPAR/2015 & PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015;
4. Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada empat destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan
5. Penyusunan *Master Plan* mengembangkan wisata alam di kawasan konservasi.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit atau Rp. 3,7 Milyar

Capaian IKK Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit atau Rp. 3,7 Milyar, terdiri dari 4 IKK yaitu sebagai berikut.

**Tabel 17. Capaian IKK Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit atau Rp. 3,7 Milyar**

No	IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20	58	150,00 (290,00)
2	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5	40	150,00 (800,00)
3	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	10	14	140,00
4	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	1	1	100,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>113</b>	<b>150 (313,88)</b>

Penjelasan atas capaian kinerja pada 4 IKK tersebut sebagai berikut.

- Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 dengan target sebanyak 20 Unit.**

**Tabel 18. Capaian IKK Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20	58	150,00 (290%)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang diterbitkan di tahun 2017 dengan jumlah target tahun 2017 sebanyak 20 unit. Tahun 2017 jumlah IUPSWA dan IUPJWA sebanyak 58 unit terdiri dari 4 unit IUPSWA dan 54 unit IUPJWA. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 290,00%. Dikarenakan capaian kerjanya melebihi 150%, maka capaian kinerja dibatasi menjadi sebesar 150%.

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN. Karimunjawa, TN Gunung Gede Pangrango, TN Alas Purwo, TN Kerinci Seblat, TN Berbak, TN Tesso Nilo, TN Sembilang, TN Gunung Palung, TWA Pulau Weh, TWA Kepulauan Banyak, TWA Sibolangit, TWA Kepulauan Padamaran, TN Bali Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Wakatobi, TN

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manusela, TWA Gunung Baung, TWA Mangolo, TWA Gunung Guntur, TWA Wera dan TWA Telogo Warno Telogo Pengilon.

Pada tahun 2017 realisasi untuk jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 58 unit yang terdiri dari 4 unit IUPSWA dan 54 unit IUPJWA. Empat unit IUPSWA yang menjadi capaian realisasi adalah:

1. PT. Joben Everegreen di TN Gunung Rinjani.
2. PT. Alam Indah Bonbin Lestari di Telogo Warno Telogo Pengilon, BKSDA Jawa Tengah.
3. PT. Oisin Eire di TWA Tanjung Tumpa, BKSDA NTB.
4. PT. Labengki Nirwana Resort di TWA Teluk Lasolo BKSDA Sulawesi Tenggara.

Sedangkan untuk 54 unit IUPJWA terbagi atas:

1. Perseorangan
  - a. 1 unit IUPJWA di TN Wakatobi.
  - b. 2 unit IUPJWA di TN Kepulauan Seribu.
  - c. 45 unit IUPJWA di TN Gunung Ciremai.
  - d. 1 unit IUPJWA di TN Alas Purwo
  - e. 1 unit IUPJWA di TN Gunung Gede Pangrango
2. Badan Usaha Milik Swasta
  - a. 2 unit IUPJWA (PT. Bumi Cangkuang Lestari) di TN Gunung Halimun Salak.
  - b. 1 unit IUPJWA (PT. Jhon Petualangan Rinjani) di TN Gunung Rinjani.
3. Koperasi unit IUPJWA (Koperasi Agung Lestari) di TN Gunung Ciremai sebanyak 1 unit.

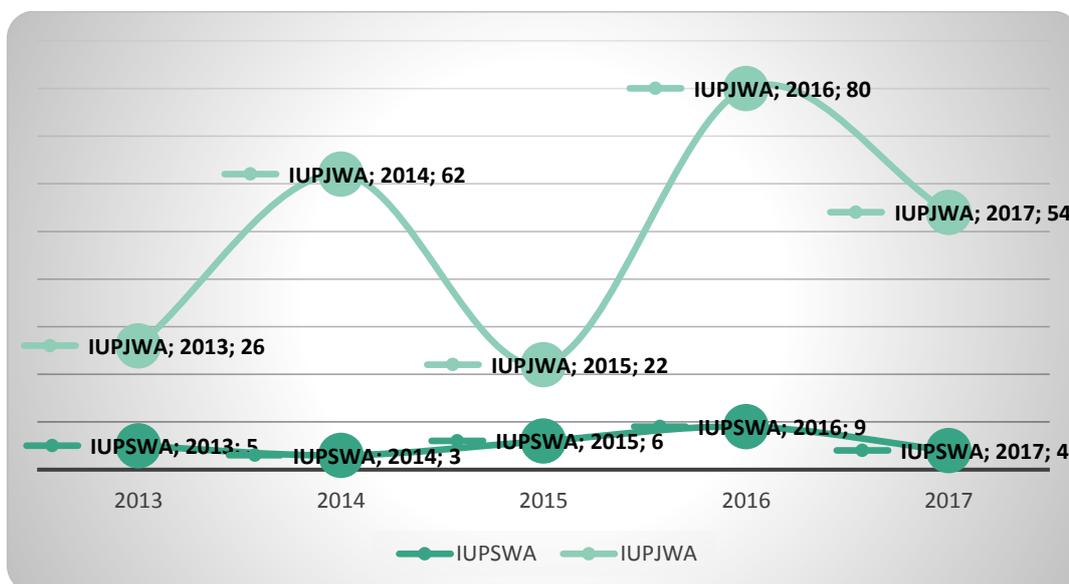
Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di kawasan konservasi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 31 unit atau 34,83% dimana terjadi penurunan IUPSWA sebanyak 5 unit dan IUPJWA sebanyak 26 unit. Perbandingan jumlah IUPSWA dan IUPJWA 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Penurunan tersebut antara lain karena penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA belum terkoordinir secara baik dan permasalahan administrasi dalam proses penerbitan IUPSWA.

**Tabel 19. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir**

Tahun	Jumlah IUPSWA dan IUPJWA (Unit)	% Kenaikan / Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2013	31	+ 210,00
2014	65	+ 109,78
2015	28	- 56,92
2016	89	+ 217,86
2017	58	- 34,83
Jumlah	271	445,89
Rata-rata/Thn	54	89,18

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Rata-rata perkembangan (kenaikan atau penurunan) IUPSWA dan IUPJWA per tahun selama 5 tahun terakhir adalah sebanyak 54 unit per tahun.



**Gambar 15. Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017**

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah tercapai kinerja sebesar 175 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 75 unit atau telah tercapai sebesar 175%.

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait perusahaan pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2010.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengeanaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- i. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.12/IV-Set/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- j. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.11/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam.
- k. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.6/IV-Set/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- l. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen PHKA Nomor: P.5/IV-Set/2015.
- m. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.02/IV-Set/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- n. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Tama Wisata Alam.
- o. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.01/IV-Set/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2017, untuk jenis usaha IUPJWA dan jenis usaha IUPSWA, disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- a. Peran aktif seluruh UPT KSDAE dalam mempersiapkan pra kondisi kawasan seperti Rencana Pengelolaan, Penataan Zonasi/Bloking dan Desain Tapak sehingga kawasan tersebut siap untuk dipromosikan kepada para investor untuk melakukan investasi di kawasan dengan pengembangan pengusahaan pariwisata alam baik sarana untuk perusahaan dan jasa untuk masyarakat.
- b. Upaya pihak UPT/Pusat dalam memberikan pelayanan dan informasi terkait perizinan jasa di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Hal ini perlu ditingkatkan kembali dengan dibuatnya forum jasa wisata alam oleh pihak UPT.
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat serta
- d. Meningkatnya minat investor dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata alam dikarenakan melihat *trend* pariwisata alam yang semakin berpotensi besar khususnya di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Namun, terkadang masih terdapat investor yang kurang optimalnya penyelesaian kewajiban pengajuan perizinan pihak perusahaan, yang memperlambat proses penerbitan izin dan atau penolakan izin. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya penjelasan pihak UPT dan monitoring pihak pusat dalam mengevaluasi dan memonitoring perizinan khususnya jenis usaha IUPSWA.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Namun, disamping keberhasilan pencapaian di tahun 2017 ada beberapa hambatan yang perlu dijadikan perhatian dalam pencapaian kinerja mendatang yaitu

- a. Penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA belum terkoordinir secara baik;
- b. permasalahan administrasi dalam proses penerbitan IUPSWA.

Solusi pemecahan atas hambatan tersebut adalah

- a. Perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan UPT; dan
- b. perlu adanya penataan lebih lanjut administrasi maupun teknis dilapangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pencapaian kinerja yang diperoleh memberikan *outcome* diantaranya efektifitas pengelolaan meningkat karena ada pemegang IUPSWA dan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan adanya pemegang IUPJWA sehingga masyarakat ikut dalam menjaga kawasan. Selain itu juga dengan adanya pemegang IUPSWA dan IUPJWA dapat meningkatkan PNBPN, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi dan perekonomian masyarakat. Penyerapan tenaga kerja dari IUPSWA sebanyak 1.564 tenaga kerja, sedangkan IUPJWA sebanyak 63 tenaga kerja. Pencapaian kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) memberikan kontribusi PNBPN kepada Negara sebesar Rp. 2.392.942.405,- yang terdiri dari :

- Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) sebesar Rp. 1.321.330.000,-.
- Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) sebesar Rp. 795.372.405,-
- Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam (PHUJWA) sebesar Rp. 233.240.000,-
- Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA) sebesar Rp. 43.000.000,-.



**Gambar 16. Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pemanfaatan dan Pengusahaan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Bandung**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 17. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) Air Terjun Coban Jodo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**



**Gambar 18. Pusat Informasi di Taman Nasional Tanjung Puting**



**Gambar 19. Pembinaan dan Uji Kompetensi Usaha Jasa Pemandu Wisata Alam di Taman Nasional Gunung Ciremai**



**Gambar 20. Pusat Ekologi Kupu-Kupu di TWA Gunung Tunak, BKSDA Nusa Tenggara Barat**



**Gambar 21. Sarana Prasarana yang Dibangun oleh Pemegang IUPSWA (PT. Plengkung Indah Wisata) di TN Alas Purwo**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 2. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit sebanyak 5 Unit

**Tabel 20. Capaian IKK Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5	40	150,00

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Pemanfaatan Air (IPA) yang diterbitkan di tahun 2017 dengan jumlah target tahun 2017 sebanyak 5 unit. Sampai akhir tahun 2017 jumlah IUPA dan IPA yang telah dikeluarkan sebanyak 40 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 800%, tetapi karena adanya pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kinerjanya sebesar 150,00%.

Sampai Desember 2017, Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE berjumlah 26 (dua puluh enam) lokasi. Terdiri dari 7 (enam) lokasi di Taman Wisata Alam (TWA) yaitu TWA Gunung Baung (Balai Besar KSDA Jawa Timur), TWA Wera (Balai KSDA Sulawesi Tengah), TWA Kerandangan (Balai KSDA NTB), TWA Bukit Tangkiling (Balai KSDA Kalimantan Tengah), TWA Mangolo (Balai KSDA Sulawesi Tenggara), TWA Danau Matano (BBKSDA Sulawesi Selatan) dan BBKSDA Nusa Tenggara Timur (TWA Camplong, TWA Baumata dan TWA Ruteng). Sedangkan 19 (sembilan belas) lokasi berada di Taman Nasional (TN) yaitu TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Merbabu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Lore Lindu, TN Laiwangiwanggameti, TN Gunung Palung, TN Maupeu Tanah Daru, TN Bukit Tiga Puluh, TN Meru Betiri, TN Bali Barat dan TN Gunung Merapi. Sedangkan dalam proses pengusulan penetapan Areal Pemanfaatan Air adalah TN Ujung Kulon.

Berdasarkan penetapan lokasi tersebut, telah ditetapkan lokasi target untuk pencapaian IKK tahun 2017 yaitu TN Gunung Leuser, TN Gunung Palung, Taman Nasional Gunung Rinjani dan SM Pulau Bawean.

Pemberian izin terhadap pemanfaatan air baru dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Kinerja pada tahun 2017, pada IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi telah dikeluarkan 40 Izin pemanfaatan yaitu IUPA sebanyak 4 unit dan IPA sebanyak 36 unit. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebanyak 4 unit yaitu : di TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Bromo Tengger Semeru, KSDA Sulawesi tenggara dan TN Gunung Ciremai. Sedangkan Izin Pemanfaatan Air (IPA) sebanyak 36 unit yaitu di TN Bukit Tiga Puluh (1 Unit), TN Bogani Nani Wartabone (1 Unit), TN Gunung Halimun Salak (2 Unit), TWA Wera KSDA Sulawesi Tenggara (1 Unit), TN BBS (17 Unit), TN Bromo Tengger Semeru (4 Unit), TN Gunung Rinjani (1 Unit), TN

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

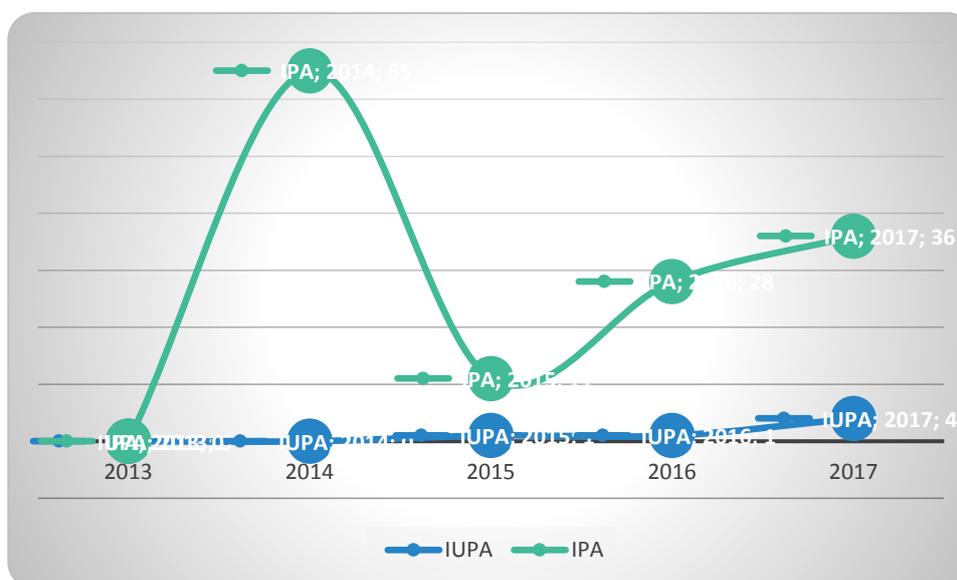
Babul (1 Unit), TN Kelimutu (1 Unit), TN Gunung Merbabu (4 Unit), TN Gunung Merapi (3 Unit).

Pencapaian kinerja tahun 2017 capaian IUPA apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2016 sebanyak 1 (satu) izin mengalami peningkatan menjadi 4 (empat) izin, sedangkan untuk IPA terjadi penambahan sebesar 16,12% sebanyak 36 (tiga puluh enam) izin. Perbandingan Pencapaian Kinerja IKK ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada tabel 17 dan gambar 30.

**Tabel 21. Perbandingan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah IUPA dan IPA (Unit)	% Kenaikan / Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2013	0	0
2014	65	+ 560
2015	12	- 81,54
2016	29	+ 141,67
2017	40	+ 37,93
<b>Jumlah</b>	<b>146</b>	<b>658,06</b>
<b>Rata-rata/Thn</b>	<b>29</b>	<b>131,612</b>

Rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) IUPA dan IPA di kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 29 unit per tahun.



**Gambar 22. Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017**

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah tercapai kinerja sebesar 81 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (25 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 56 unit atau telah tercapai sebesar 324%.

Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Aturan turunan yang telah ditetapkan adalah Perdirjen PHKA Nomor: P.06/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor: P.07/IV-SET/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta Hutan Lindung; Perdirjen PHKA Nomor: P.19/IV-SET/2014 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor: P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan, seperti halnya bimbingan teknis dimana telah dilakukan sosialisasi mengenai peraturan P.64 dan tata cara dalam proses ijin pemanfaatan air dikawasan SM, TN, Tahura dan TWA kepada para pemanfaat maupun calon pemanfaat jasa lingkungan air. Sinergisitas antar anggota forum pemanfaat air dengan UPT juga tercipta dengan baik melalui kegiatan penguatan kelembagaan. Kegiatan pertemuan teknis merupakan jembatan yang menghubungkan antara Direktorat PJLHK dengan instansi-instansi yang terkait didalam bidang pemanfaatan air. Kegiatan pembahasan/penilaian pengusahaan PJA Air juga turut membantu didalam mempercepat proses perijinan dimana diberikan penilaian dan arahan mengenai proses perijinan sehingga waktu penyelesaian proses perijinan lebih efektif. Evaluasi dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan air di UPT, penyempurnaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam guna mempermudah pemanfaatan air di kawasan konservasi telah disampaikan ke Sekjen KLHK.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari permasalahan, antara lain :

- a. Prakondisi kawasan konservasi terkait inventarisasi potensi dan penetapan areal pemanfaatan air masih terbatas hanya beberapa UPT (baru 26 UPT dari 74 UPT). Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat PJLHK telah intensif melakukan bimbingan teknis terhadap UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air dan membuat surat edaran ke UPT terkait hal tersebut;
- b. Adanya usaha pemanfaatan air yang sudah eksisting di kawasan konservasi dalam mengajukan izin, prosesnya disamakan dengan yang baru akan mengajukan usaha pemanfaatan air, sebaiknya dibedakan. Untuk mengatasi masalah ini akan diakomodir dalam revisi Permenhut No. 64 tahun 2013.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan jumlah Kepala Keluarga yang terpenuhinya kebutuhan air kurang lebih 88.092 KK dan jumlah tenaga yang diserap dalam rangka usaha pemanfaatan air di kawasan konservasi kurang lebih 714 orang. Pencapaian kinerja kegiatan ini telah memberikan kontribusi PNBP kepada Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air sebesar Rp. 325.968.000,-.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 23. Pemanfaatan Air Oleh Masyarakat dari TN Gunung Merbabu, Jawa Tengah**

**Gambar 24. Pembahasan RPPA PDAM Tirta Jati Kab. Cirebon, Pengusahaan Air di TN Gunung Ciremai**



3. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit dengan target sebanyak 10 Unit

**Tabel 22. Capaian IKK Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	10	14	140,00

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) yang diterbitkan di tahun 2017 dengan jumlah target tahun 2017 sebanyak 10 unit. Sampai akhir tahun 2017 jumlah IUPEA dan IPEA sebanyak 14 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 140%.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

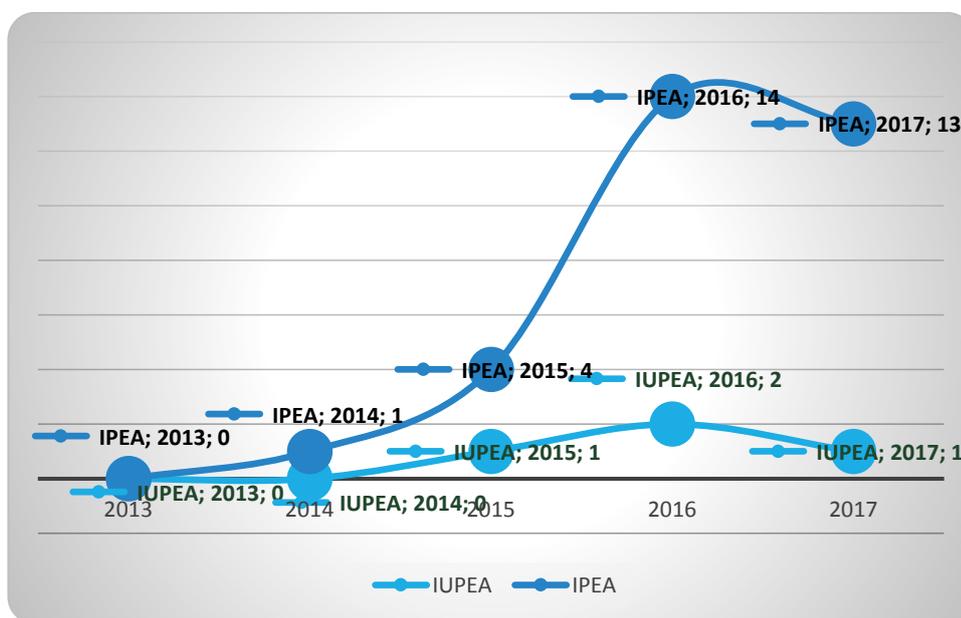
Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, TN Kerinci Seblat, TN Laiwangi Wanggameti, TN Manupeu Tanadaru dan TWA Gunung Baung.

Pencapaian kinerja pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant tahun 2017 adalah 14 unit terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) sebanyak 1 unit dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) sebanyak 13 unit. IPEA berlokasi di TN Bantimurung Bulusaraung (1 Unit) dan TN Bukit Barisan Selatan (12 Unit), sedangkan IUPEA berlokasi di TN Gunung Halimun Salak (1 unit).

**Tabel 23. Perbandingan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah IUPEA dan IPEA (Unit)	% Kenaikan / Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2013	0	0
2014	1	+ 100
2015	5	+ 400
2016	16	+ 220
2017	14	- 12,50
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>707,50</b>
<b>Rata-rata/Thn</b>	<b>7</b>	<b>141,5</b>

Rata-rata pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) jumlah IUPEA dan IPEA kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 7 unit per tahun.



**Gambar 25. Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2017**

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah tercapai kinerja sebesar 35 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 50 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (50 unit), maka target tersebut sudah tercapai sebesar 70%.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemanfaatan energi air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Aturan turunan yang telah ditetapkan adalah Perdirjen PHKA Nomor: P.06/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor: P.07/IV-SET/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta Hutan Lindung; Perdirjen PHKA Nomor: P.19/IV-SET/2014 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor: P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Bimbingan teknis yang intensif terhadap setiap UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air;
- b. Melakukan FGD dan pertemuan teknis untuk mencari solusi atas kendala untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis saat mengajukan izin pemanfaatan air;
- c. Penguatan kelembagaan kelompok pemanfaat air di UPT;
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Jasa Lingkungan Air bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM di UPT yang mendukung program nasional ketahanan energi;
- e. Melakukan evaluasi dan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air di UPT.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, selain dapat memberikan manfaat kepada Negara berupa PNBPN, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energi air. Outcome dari kegiatan pemanfaatan energi air ini adalah jumlah Kwh yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 23 Mw. Pencapaian kinerja kegiatan ini telah memberikan kontribusi PNBPN kepada Negara dari Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air sebesar Rp. 482.566.746,-.



**Gambar 26. Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Pemanfaatan Energi Air di Padang, Sumatera Barat**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 27. Pelatihan Pengembangan PLTMH**

**Gambar 28. PLTM Lapopu di TN Matalawa**



**Gambar 29. Peninjauan Rencana Lokasi PLTM di TWA Gunung Baung, BBKSDA Jawa Timur**



#### **4. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit dengan target sebanyak 1 unit**

Kebutuhan manusia akan energi terutama listrik dari hari kehari makin meningkat, sehingga pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan serta sumber penyedia energi nasional. Salah satu sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia adalah panas bumi. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi tetapi belum dimanfaatkan secara optimal termasuk panas bumi yang berada di kawasan konservasi. Tenaga panas bumi dianggap sebagai sumber energi baru terbarukan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut data Kementerian ESDM (2014) Potensi panas bumi yang berada di kawasan konservasi saat ini yang sudah teridentifikasi sebesar 6.157 mega watt. Potensi tersebut tersebar di berbagai fungsi kawasan konservasi, antara lain :

- a. Taman Nasional (TN): TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Batang Gadis, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gn Halimun Salak, TN Gn Gede Pangrango, TN Gn Ciremai, TN Gn Rinjani, TN Bogani Nani Wartabone, TN Lore Lindu, dan TN Kelimutu;
- b. Taman Hutan Raya (Tahura): Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Wan Abdur Rahman, Tahura GPAA Mangkunegara I, dan Tahura R Soeryo;
- c. Taman Wisata Alam (TWA): TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Danau Tes, TWA Bukit Kaba, TWA Gn Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu, TWA Kamojang, TWA Gn Guntur, TWA Telaga Bodas, TWA Gn Tampomas, TWA Telaga Patengan, TWA Gn Pancar, TWA Telaga Warna, TWA Telogo Warno Pengilon, TWA Guci, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Buyan Tamblingan, TWA Gn Ambang, TWA Ruteng, dan TWA Wera;
- d. Cagar Alam (CA): CA Dolok Sipirok, CA Dolok Sibual-Buali, CA Tinggi Raja, CA Tinggi Raja, CA Danau Menghijau, CA Pagar Gunung I, CA Talang Ulu I, CA Talang Ulu II, CA Gn Tukung Gede, CA Rawa Danau, CA Gn Tangkuban Perahu, CA Gn Simpang, CA Gn Tilu, CA Cigenteng Cipanji, CA Malabar, CA Papandayan, CA Kamojang, CA Telaga Bodas, CA Telaga Patengan, CA Telogo Dringo, CA Gn Tunggungan, CA Sepakung, CA Gebungan, CA Sungai Kolbu, CA Picis, CA Sigogor, CA Batu Kahu I-II-III, dan CA Gn Sibelia;
- e. Suaka Margasatwa (SM): SM Barumun, SM Malampah Alahan Panjang, SM Isau-Isau Pasemah, SM Gn Raya Gn Danau, SM Gn Sawal, dan SM Dataran Tinggi Yang.

Keseluruhan kawasan konservasi yang memiliki potensi panas bumi, telah masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) sebanyak 46 WKP yang ditetapkan Kementerian ESDM.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat PJLHK, terutama dalam pengelolaan panas bumi di kawasan konservasi, hasil pencapaian kinerja tahun 2017 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	Unit	1	1	100,00

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di kawasan konservasi yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan jumlah target tahun 2017 sebanyak 1 unit. Sampai akhir tahun 2017 jumlah IPJLPB yang telah terbit sebanyak 1 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%.

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN Gunung Halimun Salak, TN Ciremai, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan dan TN Gunung Rinjani.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

IPJLPB yang telah diterbitkan adalah IPJLPB Nomor: 1/IPJLPB/PMDN/2017 tanggal 17 Januari 2017 An. PT. Indonesia Power di TN Gunung Halimun Salak dengan kapasitas listrik terpasang dari energi panas bumi sebesar 180 MW.

Selain lokasi target tersebut diatas, saat ini masih terdapat 2 (dua) pengembang panas bumi yang telah beroperasi (eksisting) di kawasan konservasi yaitu: PT. Pertamina Geothermal Energy di CA Kamojang dengan kapasitas terpasang 235 MW, dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (sekarang bernama Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd.) di CA Papandayan dengan kapasitas terpasang 271 MW. Terhadap 2 (dua) pengembang tersebut di atas, belum dapat diproses IPJLPB dikarenakan status/fungsi kawasan yang diperkenankan untuk mendapatkan IPJLPB hanya di kawasan TN, TWA dan TAHURA. Terhadap permasalahan ini, saat ini Tim Terpadu telah selesai melakukan kajian perubahan fungsi sebagian kawasan CA tersebut menjadi TWA. Apabila sebagian kawasan CA tersebut sudah ditetapkan menjadi TWA, selanjutnya BBKSDA Jawa Barat diharapkan segera menyusun dokumen penataan Blok dan Rencana Pengelolaan sehingga dapat diproses izinnya menjadi Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB).

Selain itu, di kawasan TWA Gunung Ambang yang masuk WKP Kotamobagu terdapat potensi Panas Bumi sekitar 225 MW. Pemegang izin kuasa WKP Kotamobagu yaitu PT. Pertamina Geothermal Energy tertarik untuk berinvestasi lokasi tersebut. Untuk itu BKSDA Sulawesi Utara diharapkan segera mempersiapkan pra kondisi kawasan (menyusun Bloking dan Rencana Pengelolaan). Namun proses Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di lokasi ini sarankan menunggu selesainya Revisi UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

Pencapaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016, maka capaian IPJLPB sama sebanyak 1 unit. Kinerja kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi baru dilakukan tahun 2015, dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada tugas pokok dan fungsi terkait pencapaian kinerja ini. Perbandingan capaian kinerja jumlah IPJLPB di kawasan konservasi tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 25. Perbandingan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2017**

Tahun	Jumlah IPJLPB (Unit)	% Kenaikan / Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	0	0
2016	1	+ 100
2017	1	0

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah tercapai kinerja sebesar 2 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 5 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai yaitu sebanyak 2 unit atau sebesar 40%.

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kesiapan UPT dalam mempersiapkan dokumen penataan Zona/ Blok dan Rencana Pengusahaan yang merupakan salah satu persyaratan dalam memproses izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi, disamping itu masih diperlukan Bimbingan Teknis, fasilitasi, Sinkronisasi/Koordinasi dan *Focus Group Discussion* Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan Panas Bumi yang intensif kepada UPT dan/atau pemegang izin dan/atau stakeholder terkait untuk mempercepat proses pemanfaatan panas bumi.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBP kepada Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.



**Gambar 30. PT. Indonesia Power di TN Gunung Halimun Salak**

**Gambar 31. Star Energy Geothermal Darajat II di CA Papandayan, BBKSDA Jawa Barat**



**Indikator Kinerja Kegiatan:  
Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dengan target  
Rp. 10 Milyar**

Capaian kinerja IKK ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 26. Capaian IKK Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dengan target Rp. 10 Milyar**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp. 50 M	Rupiah	10.000.000.000	24.599.221.999	245,99

Realisasi PNBP dari Pemanfaatan TSL tahun 2017 sebesar Rp. 24.599.221.999,- atau sebesar 245,99% dari target. Nilai tersebut diperoleh dari iuran pemanfaatan TSL dalam negeri dan luar negeri antara lain: iuran pengedar luar negeri, izin penangkaran, izin lembaga konservasi, izin pengambilan sampel penelitian, pungutan perdagangan TSL ke luar negeri, pungutan administrasi pemanfaatan TSL serta PNBP yang berasal dari pungutan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun Taman Nasional.

PNBP pemanfaatan jenis TSL tahun 2017 sebesar Rp.24.599.221.999,- terdiri dari:

1. PNBP pemanfaatan TSL ke luar negeri : Rp. 19.334.165.292,-
2. PNBP pemanfaatan TSL dalam negeri : Rp. 5.265.056.707,-

Kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan di wilayah kerja Direktorat Jenderal KSDAE di seluruh Indonesia baik pusat maupun BBKSDA/BKSDA.

Tahapan kegiatan meliputi pelaksanaan pungutan PNBP sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan yaitu :

1. Iuran izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar
2. Pungutan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar
3. Denda administrasi berupa penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha tumbuhan dan satwa liar, penyimpangan terhadap izin usaha, dan pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan

Pelaksanaan pungutan PNBP tersebut dilakukan sepanjang tahun terhadap kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pihak yang terlibat dalam mencapai target PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam antara lain:

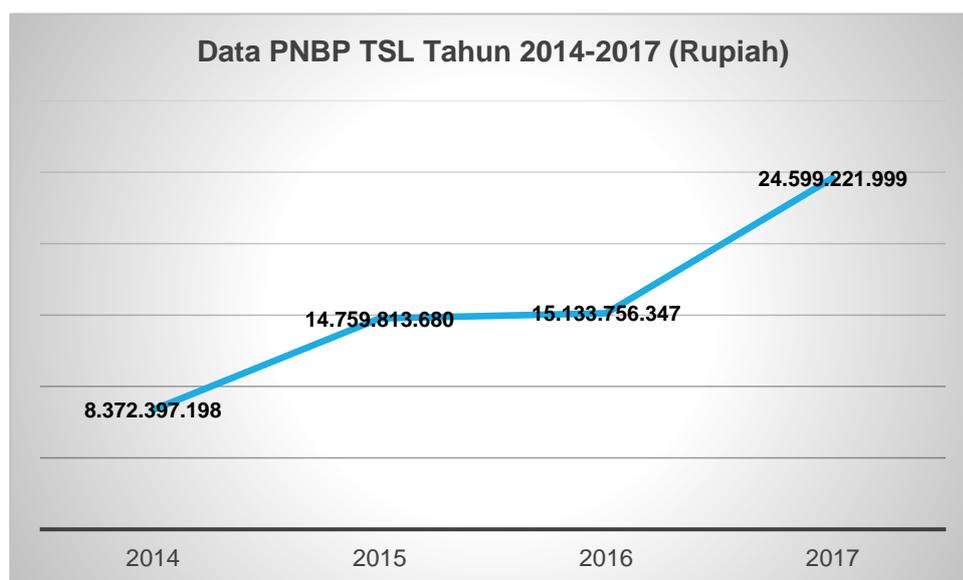
1. Direktorat KKH
2. BBKSDA/BKSDA
3. Pemegang izin usaha pengedar TSL dalam negeri dan luar negeri
4. Pemegang izin penangkaran
5. Lembaga konservasi
6. Peneliti
7. Masyarakat

Peran UPT BBKSDA/BKSDA dalam pencapaian target PNBP yaitu melakukan pungutan PNBP dan melakukan pengendalian pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dalam negeri.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 27. Data PNBP Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2014 - 2017

No	Tahun	Capaian PNBP TSL (Rp.)
1	2014	8.372.397.198
2	2015	14.759.813.680
3	2016	15.133.756.347
4	2017	24.599.221.999



Gambar 32. Data PNBP TSL Tahun 2014-2017 (Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa PNBP TSL selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. PNBP TSL tahun 2017 meningkat sebanyak 62,55% dibandingkan tahun 2016.

Peningkatan PNBP TSL disebabkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan yang menyebabkan PNBP Perdagangan TSL ke Luar Negeri meningkat serta pada tahun 2016 terjadi peningkatan harga patokan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 22 November 2016 yang menyebabkan terjadinya peningkatan pencapaian PNBP Perdagangan TSL Ke Luar Negeri.

Tahun 2017 terdapat penambahan jenis yang dimanfaatkan seperti sonokeling, lipan, ikan sapu-sapu zebra, ikan pari air tawar dan cangkang kima, yang menyebabkan peningkatan pencapaian PNBP Perdagangan TSL ke Luar Negeri.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, IKK Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp. 50 Milyar dalam periode tahun 2015 s.d 2019 atau 10 Milyar per tahun dapat tercapai dengan realisasi sebesar 245,99%.

Secara umum tidak terdapat permasalahan/hambatan dalam pencapaian target PNBP tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari capaian sebesar 245,99% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa hal yang berpotensi menjadi masalah/hambatan dalam pencapaian IKK kedepan yaitu :

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Pemahaman pelaku usaha terkait regulasi pemanfaatan jenis.
- 2) Koordinasi/kerjasama Otoritas Pengelola CITES Indonesia dengan institusi lainnya.
- 3) Sistem manajemen dan sumber daya (SDM dan Sarpras) pelayanan publik.

Upaya tindak lanjut yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasi potensi permasalahan/hambatan yang ada yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada Asosiasi pemanfaat TSL dan pelaku usaha serta UPT Ditjen KSDAE terkait dalam hal regulasi pemanfaatan jenis TSL.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait (Kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelola Portal INSW, LIPI, Ditjen Penegakan Hukum LHK, dan lain-lain).
- 3) Mengembangkan sistem pelayanan publik secara online dan menguatkan sumber daya yang dimiliki baik kuantitas maupun kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung.

Berdasarkan data capaian pada 4 indikator pada sasaran 1 di atas, dapat disampaikan bahwa seluruhnya tercapai melebihi target. *Outcome* yang diperoleh adalah meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang berdampak pada meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi diperoleh melalui:

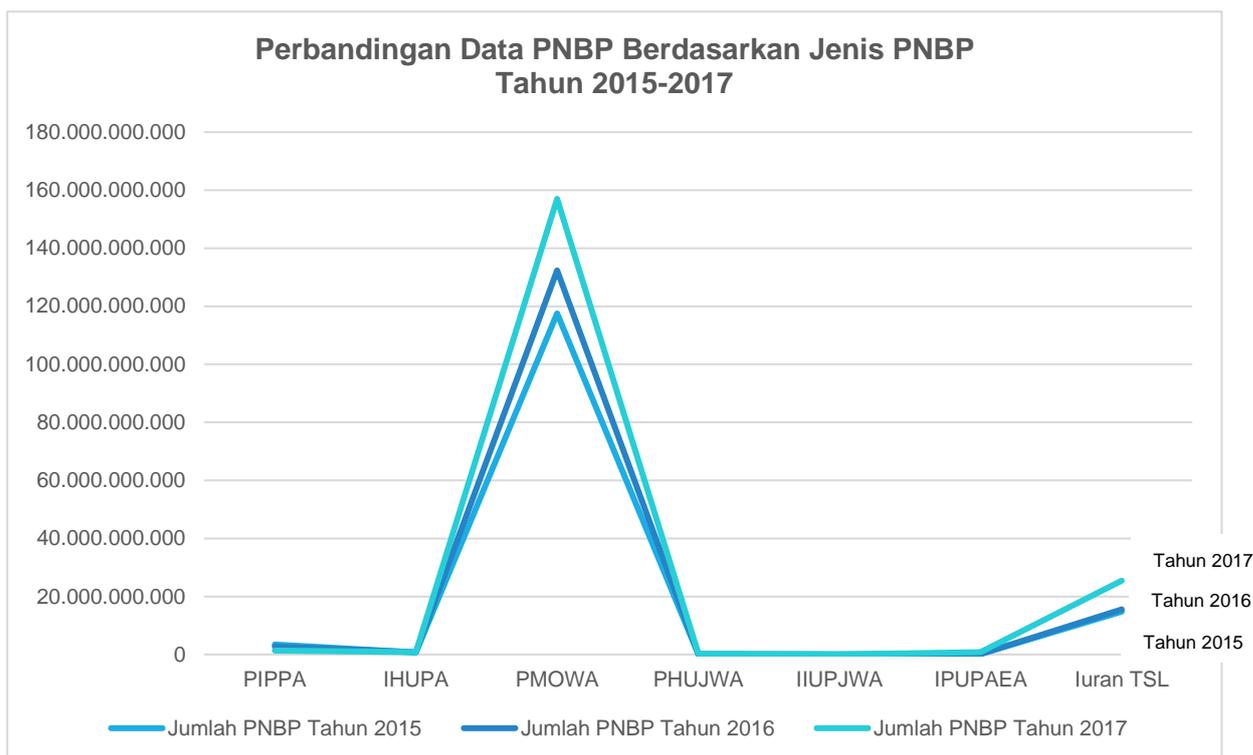
1. Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air (IPUPAEA),
2. Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA),
3. Pungutan Masuk Objek Wisata Alam (PMOWA),
4. Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA),
5. Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam (PHUJWA), dan
6. Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IIUPJWA).

Sedangkan untuk PNBP keanekaragaman hayati berasal dari Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar (Iuran TSL). Sampai dengan akhir tahun 2017, PNBP yang diterima dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut.

**Tabel 28. PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2013-2017**

No.	Jenis PNBP	Jumlah PNBP Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PIPPA	55.788.000	6.540.410.000	3.471.265.000	2.799.639.691	1.321.330.000
2	IHUPA	241.623.598	257.082.092	657.813.729	858.049.998	795.372.405
3	PMOWA	36.073.742.293	61.363.436.962	117.520.539.716	132.348.120.112	157.004.164.182
4	PHUJWA	N/A	N/A	60.350.000	169.095.000	233.240.000
5	IIUPJWA	N/A	N/A	19.000.000	27.000.000	43.000.000
6	IPUPAEA	N/A	N/A	100.850.000	159.055.750	808.534.746
7	Iuran TSL	6.887.573.334	12.823.091.487	14.759.813.680	15.506.181.256	25.498.378.834
<b>Jumlah (Rp.)</b>		<b>43.258.727.225</b>	<b>80.984.020.541</b>	<b>136.589.632.125</b>	<b>151.867.141.807</b>	<b>185.704.020.167</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 33. Perbandingan Data PNBП Berdasarkan Jenis PNBП Tahun 2015-2017**

Berdasarkan data di atas, PNBП tertinggi adalah dari Pungutan MOWA atau karcis masuk, disusul dari Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar, sedangkan yang terendah adalah PNBП dari Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IIUPJWA).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting dengan target Rp. 5,3 Trilyun

Capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 29. Capaian IKK Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting dengan target Rp. 5,3 Trilyun**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun	Rupiah	5.000.000.000.000	7.094.863.348.477	141,88

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.094.863.348.477,- atau sebesar 141,88% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 5 Trilyun.

Kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan di wilayah kerja Direktorat Jenderal KSDAE di seluruh Indonesia baik pusat maupun BBKSDA/BKSDA. Tahapan kegiatan meliputi pelaksanaan ekspor dan impor tumbuhan dan satwa liar sebagai berikut :

1. Proses penerbitan izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri
2. Proses penerbitan SATS-LN (CITES Permit)
3. Ekspor dan Impor

Izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri berlaku selama 5 (lima) tahun sedangkan SATS-LN diterbitkan setiap kali pemegang izin edar melakukan kegiatan ekspor/impor dan dokumen dimaksud menyertai spesimen yang dikirim.

Pihak yang terlibat dalam mencapai target devisa negara dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam antara lain :

- a. Direktorat KKH
- b. BBKSDA/BKSDA
- c. Pemegang izin usaha pengedar TSL dalam negeri dan luar negeri
- d. Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai)
- e. Kementerian Perdagangan
- f. Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian)

Peran UPT BBKSDA/BKSDA dalam pencapaian target devisa negara yaitu melakukan pengendalian pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dalam negeri, memberikan rekomendasi teknis dalam hal penerbitan izin usaha pengedar luar negeri oleh Direktur Jenderal KSDAE, dan memberikan rekomendasi teknis dalam hal penerbitan SATS-LN oleh Otoritas Pengelola CITES Indonesia (Direktorat Keanekaragaman Hayati).

**Tabel 30. Data Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* tahun 2014 - 2017**

No	Tahun	Jumlah Devisa (Rp)
1	2014	743.281.616.734
2	2015	5.307.448.015.075
3	2016	6.547.512.373.876
4	2017	7.094.863.348.477



**Gambar 34. Data Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* tahun 2014 - 2017**

Berdasarkan data realisasi ekspor yang dilaporkan oleh pemegang izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri dapat disimpulkan bahwa IKK Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* sebesar Rp. 25 trilyun selama periode tahun 2015 s.d 2019 atau sebesar Rp. 5 trilyun per tahun dapat tercapai dengan baik pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 141,90%.

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam mencapai target devisa negara dari pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar antara lain sebagai berikut :

- 1) Tertib administrasi pelaporan realisasi ekspor oleh pemegang izin edar
- 2) Penyederhanaan regulasi dalam negeri untuk meningkatkan devisa negara

Upaya tindak lanjut yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi yaitu :

- 1) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara intensif terkait tertib administrasi pelaporan realisasi ekspor oleh pemegang izin edar.
- 2) Bersama-sama dengan instansi terkait merumuskan sistem penyederhanaan regulasi dalam negeri terkait tata cara/prosedur ekspor dan impor.

### Sasaran 2 : Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati

Sasaran 2 ini dicapai melalui 8 indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik) dengan target 17 unit KK,
2. Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik) dengan target 30 unit TN,
3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* dengan target 2%,
4. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) dengan target 7 paket data,
5. Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial dengan target 13 unit KEE (300.000 Ha),
6. Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi dengan target 10 unit,
7. Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat dengan target 20.000 Ha,
8. Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja disampaikan sebagai berikut:

#### Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik) dengan target 17 unit KK
2. Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik) dengan target 30 unit TN

Pada dokumen Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, IKK ini tidak terpisah antara nilai METT kawasan non TN dan TN. Kalimat IKK pada Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 yaitu “Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia”, dengan target pada tahun 2017 adalah sebesar 50 unit. Sedangkan pada dokumen PK Direktur Jenderal KSDAE tahun 2017, IKK ini dibedakan antara TN dan non TN, hal ini mengakomodir kegiatan yang ada pada UPT Ditjen KSDAE yaitu kegiatan Pengelolaan TN dan KSDA. Capaian IKK ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 31. Capaian IKK Jumlah TN dan Non TN Memperoleh Nilai Indeks METT Minimal 70% (Kategori Baik)**

No	IKK	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)	Unit KK	17	38	150 (223,53)
2	Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)	Unit TN	30	2	6,67
	<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, kawasan konservasi berperan besar dalam kegiatan mitigasi sebagai penyimpan karbon dan mendukung kegiatan adaptasi perubahan iklim melalui penyediaan jasa lingkungan.

Sejak tahun 1980-an, pengelolaan KK (CA, SM dan TWA) di tingkat tapak dilakukan Unit Pelaksana Teknis KSDA, sedangkan untuk pengelolaan Tahura dilakukan oleh UPTD/SKPD/Dinas yang bergerak dibidang Kehutanan. Pengelola KK dimaksud didukung sepenuhnya oleh Ditjen KSDAE dan para mitra berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Upaya tersebut juga selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam tataran global untuk mendukung *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan pencapaian *Aichi Target*.

Efektivitas pengelolaan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan utama perlindungan kawasan-kawasan penting tersebut seperti yang dimandatkan sejak pendeklarasian (penunjukan) kawasan yang ada dan kemudian diterjemahkan dalam dokumen rencana pengelolaan. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sebuah kawasan diharapkan dapat memberi panduan penggunaan sumberdaya secara efektif, sebagai pertanggungjawaban menggunakan dana publik secara akuntabel dan transparan, serta dalam rangka meningkatkan kepedulian dan dukungan para pihak.

Direktorat Jenderal KSDAE melalui Direktorat Kawasan Konservasi sesuai Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 memfasilitasi penilaian efektifitas pengelolaan KK dengan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini telah diadopsi secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.15/KSDAE-SET/2015. Berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019, minimal 260 unit KK harus memiliki nilai indeks METT minimal 70% sampai dengan 2019, yaitu **“Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia”**.

Lokasi dan fokus pada IKK ini adalah semula pada 283 unit kawasan konservasi sesuai SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016 tanggal 29 Mei 2016, namun dalam rangka percepatan pencapaian jumlah KK yang mempunyai indeks nilai METT 70% sebanyak 260 unit KK pada tahun 2019, maka Direktorat KK membuat strategi baru dengan menambah jumlah KK yang dinilai semula 283 unit KK menjadi 383 unit KK yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.506/KSDAE /SET/KSA.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan yaitu:

- a. Pemahaman akan **konteks** dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan para pihak yang terlibat.
- b. **Perencanaan** terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi, tujuan, dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan.
- c. Alokasi sumberdaya (**input**), yang meliputi personil/staf, alokasi anggaran yang tersedia, dan peralatan pendukung pengelolaan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- d. Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (**proses**).
- e. Produk dan jasa (**output**) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan.
- f. Dampak atau **outcome** yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Jika dilihat dari struktur elemen utama siklus pengelolaan tersebut maka, pencapaian kinerja peningkatan efektivitas pengelolaan KK berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE merupakan resultante dari capaian kinerja dari seluruh unsur dan bagian di dalam Ditjen KSDAE, sehingga nilai akhir METT dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur dan bagian Ditjen KSDAE mulai dari pusat sampai Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan kriteria dan indikator sesuai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tanggal 18 Desember 2015, tahapan kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan KK seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 32. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektivitas Pengelolaan**

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan dan Penetapan NSPK	Pusat					
2	Penetapan 260 KK yang akan ditingkatkan	Pusat dan UPT BKSDA / BTN					
3	Penetapan nilai awal METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN					
4	Penilaian METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN					
5	Upaya Peningkatan Efektivitas	Pusat dan UPT BKSDA / BTN					

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian METT dilakukan pada tahun 2015, 2017 dan tahun 2019, sehingga pada tahun 2016 dan tahun 2018 difokuskan pada kegiatan-kegiatan **prakondisi** dan kegiatan **intervensi** dalam upaya peningkatan efektivitas baik di pusat maupun di UPT.

Berdasarkan tabel 30. yaitu capaian penilaian METT, terdapat 40 unit kawasan konservasi telah memenuhi persyaratan minimal 70% nilai indeks METT yaitu berkisar antara 70% - 80% adalah sesuai tabel di bawah ini.

**Tabel 33. Tabel Kawasan Konservasi Mencapai Nilai METT 70% Tahun 2017**

No	Fungsi	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
1	CA	Danau Dusun Besar Reg.61	Bengkulu	70
2	CA	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	70
3	CA	Gunung Tilu	Jawa Barat	72
4	CA	Tangkuban Prahur Pelabuhan ratu	Jawa Barat	70
5	CA	Pager Wunung Darupono	Jawa Tengah	73
6	CA	Karang Bolong	Jawa Tengah	72
7	CA	Cabak	Jawa Tengah	71
8	CA	Gunung Celering	Jawa Tengah	71
9	CA	Pringombo I	Jawa Tengah	70
10	CA	Keling II/III	Jawa Tengah	70

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

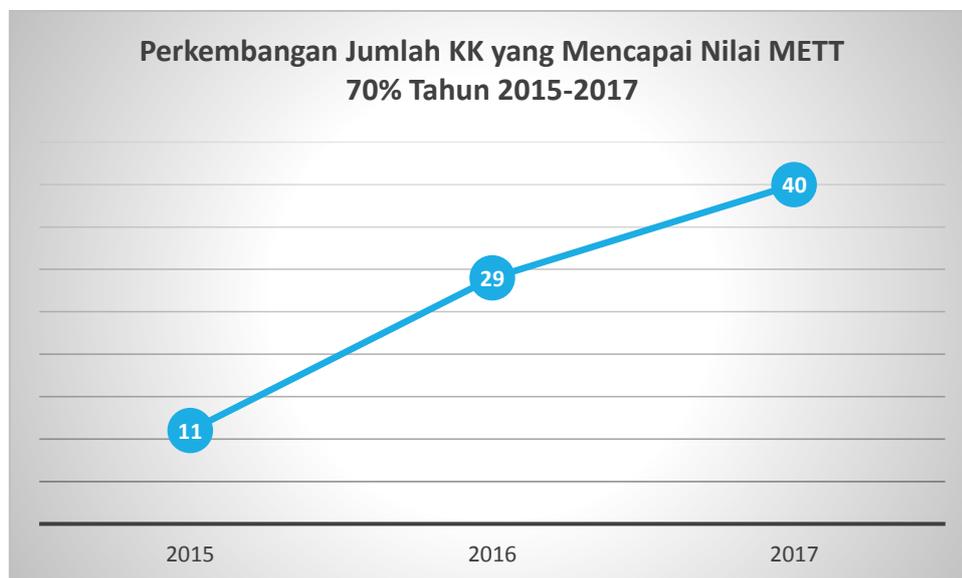
No	Fungsi	Nama Kawasan Konservasi	Provinsi	Nilai METT
11	CA	Gunung Picis	Jawa Timur	76
12	CA	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur	72
13	CA	Gunung Sigogor	Jawa Timur	70
14	CA	Pulau Nusa Barung	Jawa Timur	70
15	CA	Kepulauan Krakatau	Lampung	75
16	CA	Waigeo Barat	Papua Barat	71
17	CA	Ponda-ponda	Sulawesi Selatan	77
18	CA	Kalaena	Sulawesi Selatan	74
19	CA	Lamedae	Sulawesi Tenggara	71
20	CA	Telaga Warna	Jawa Barat	70
21	SM	Paliyan	DI Yogyakarta	70
22	SM	Sermo	DI Yogyakarta	71
23	SM	Pulau Bawean	Jawa Timur	75
24	SM	Tanjung Peropa	Sulawesi Tenggara	70
25	SM	Dangku	Sumatera Selatan	73
26	TWA	Pulau Weh	Aceh	73
27	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta	80
28	TWA	Gunung Papandayan	Jawa Barat	74
29	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah	78
30	TWA	Telogo Warno/ Telogo Pengilon	Jawa Tengah	75
31	TWA	Gunung Selok	Jawa Tengah	70
32	TWA	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur	78
33	TWA	Gunung Tunak	Nusa Tenggara Barat	71
34	TWA	Sorong	Papua Barat	70
35	TWA	Punti Kayu	Sumatera Selatan	71
36	THR	R. Soeryo	Jawa Timur	72
37	THR	Sinjai/Abdul Latief	Sulawesi Selatan	74
38	THR	Ngurah Rai	Bali	70
39	TN	Berbak	Jambi	70
40	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku Utara	70

Tabel capaian di atas, merupakan capaian penilaian METT pada KK (CA, SM, TWA), dan pada Taman Nasional. Perbedaan antara KK (CA, SM, TWA) dan Taman Nasional dapat dilihat melalui kolom Fungsi. Dapat dilihat pada KK (CA, SM, TWA) tercapai sejumlah 38 unit sedangkan pada TN terdapat 2 TN yang nilai METT mencapai 70 yaitu TN Berbak dan TN Aketajawe Lolobata. IKK Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik) tidak tercapai, capaian 6,67% dari target 30 unit TN, karena IKK ini sebenarnya lebih fokus pada pencapaian nilai METT kawasan konservasi non taman nasional, akan tetapi karena mengakomodir kegiatan Pengelolaan Taman Nasional pada Satker Balai Besar/Balai Taman Nasional, maka pada tahun 2017 ditetapkan IKK ini, sehingga capaian IKK ini kurang optimal.

Perbandingan capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja METT sesuai nomunklatur pada Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019: "Jumlah kawasan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.” Perbandingan capaian kinerja nilai indeks METT tahun 2015-2017 disampaikan pada gambar berikut.



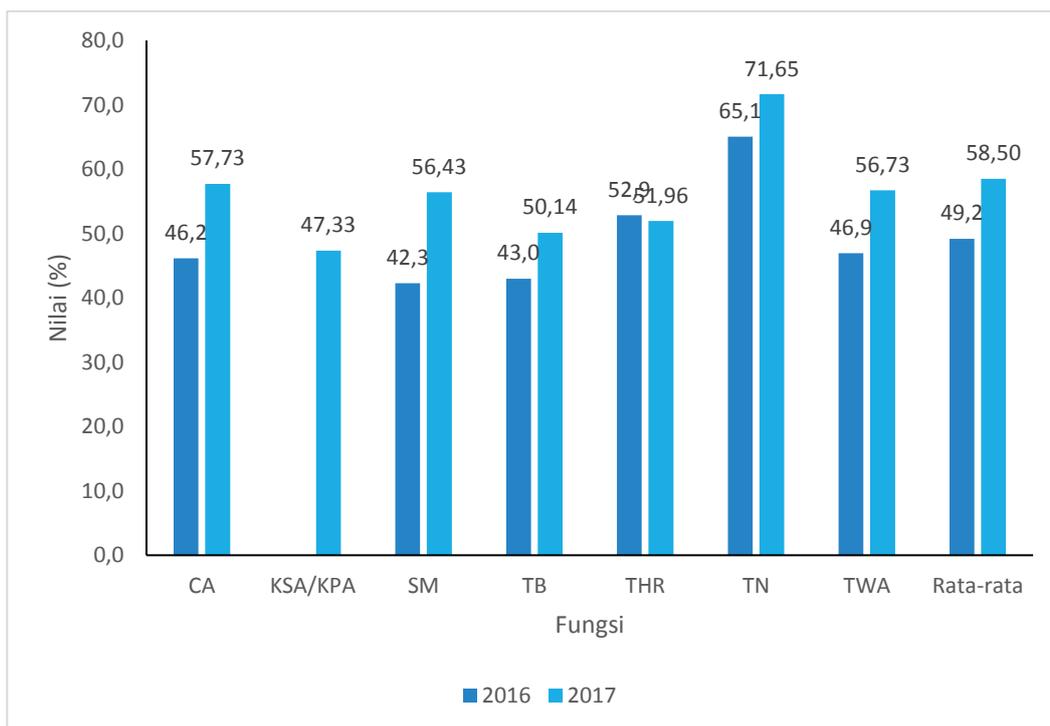
**Gambar 35. Perkembangan Jumlah KK yang Mencapai Nilai METT 70% Tahun 2015-2017**

Berdasarkan gambar di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian kinerja mengalami trend meningkat. Pada tahun 2017, capaian kinerja meningkat 37,93% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2015, capaian kinerjanya meningkat sebesar 263,64%. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya Direktorat KK membuat strategi baru dengan menambah jumlah KK yang dinilai pada tahun 2017 dan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.203/KSDAE/SET/KSA.1/5/2017 tanggal 26 Mei 2017.

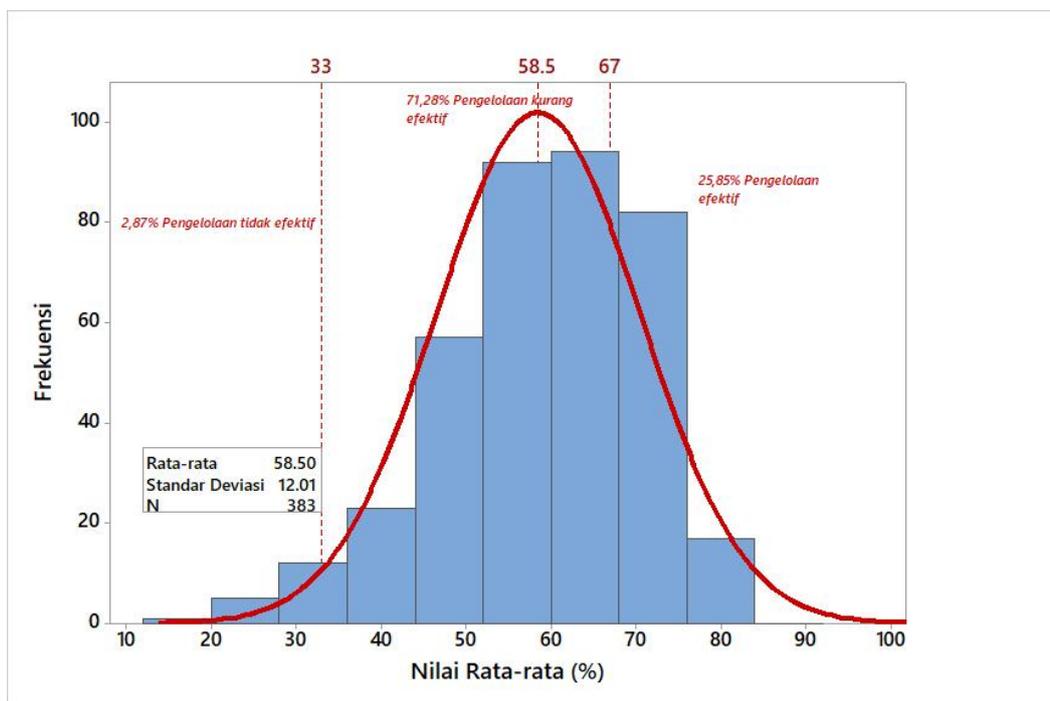
Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan baik di tingkat tapak maupun dukungan dari pusat hasil penilaian tahun 2017 pada 383 kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017 kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaan sebanyak 383 kawasan konservasi yang mencakup 69% jumlah total kawasan konservasi di Indonesia. Jumlah kawasan yang dinilai mewakili seluruh kategori kawasan konservasi yaitu taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru, cagar alam, dan suaka margasatwa.
- b. Rata-rata nasional nilai efektivitas kawasan konservasi di Indonesia 58,50%. Terdapat 25,85% kawasan (99 unit) yang pengelolaannya masuk dalam kategori telah efektif (nilai > 67%). Sejumlah 71,28% kawasan (273 unit) memiliki nilai efektivitas berada pada rentang 33-67%. Selebihnya, sejumlah 2,87% kawasan (11 unit) berada dalam kategori tidak efektif (nilai < 33%). Kawasan yang memiliki nilai rata-rata efektivitas pengelolaan paling tinggi berturut-turut adalah sebagai berikut; taman nasional 71,65 %, cagar alam 57,73%, taman wisata alam 56,73%, suaka margasatwa 56,43%, taman hutan raya 51,96%, dan taman buru 50,14%.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 36. Nilai Efektivitas Pengelolaan Masing-Masing Fungsi Kawasan**



**Gambar 37. Histogram Distribusi Normal Rata-Rata Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia Tahun 2017**

- c. Rata-rata nilai efektivitas setiap elemen penilaian efektivitas kawasan terrestrial menunjukkan bahwa pencapaian terhadap konteks mencapai 100%, input 58,09%, perencanaan 62,04, proses 54,37%, output 29,29% dan outcome 69,64%. Sedangkan

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

untuk kawasan perairan laut adalah konteks 67,92%, input 53,00%, perencanaan 56,15, proses 46,85%, output 43,77% dan outcome 43,23%.

Dalam upaya pencapaian kinerja ini terdapat beberapa isu yang sering muncul antara lain sebagai berikut:

1. Minimnya alokasi budget dan personil, khususnya untuk kawasan selain taman nasional
2. Tidak cukup informasi esensial yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan
3. Lemahnya implementasi rencana kelola yang telah ada
4. Sistem perlindungan kawasan masih lemah
5. Pengelolaan belum dikembangkan berbasis riset
6. Pelibatan dan komunikasi dengan para pihak lemah
7. Pengelolaan intensif terhadap nilai-nilai kawasan minimal
8. Masih terbatas pengelola yang melakukan monitoring sistematis dan berkelanjutan terhadap nilai-nilai penting kawasan

Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi:

1. Memperkuat kapasitas organisasi pengelola yang didukung sumberdaya manusia dengan kompetensi sesuai kebutuhan yang memungkinkan kawasan konservasi dikelola pada tingkat tapak sesuai dengan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan.
2. Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan oleh pemerintah pusat untuk dijadikan acuan dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi.
3. Mengoptimalkan alokasi sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk mengatasi isu-isu pengelolaan prioritas yang teridentifikasi sesuai hasil penilaian METT di setiap kawasan konservasi.
4. Memperkuat kebijakan politik pada semua level untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi pada perspektif bentang alam melalui integrasi pembangunan wilayah di sekitarnya dan kemitraan para pihak.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
**Persentase Peningkatan Populasi 25 Jenis Satwa Terancam Punah Prioritas Sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 2%**

Capaian kinerja ini pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34. Capaian IKK Persentase Peningkatan Populasi 25 Jenis Satwa Terancam Punah Prioritas Sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 2%**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	%	2	5,56	150 (278)

Data hasil monitoring populasi untuk tahun 2017 dari 272 *site monitoring* yang ada, laporan yang masuk baru sekitar 171 *site* atau 70,66%. Pada tahun 2017, rata – rata peningkatan populasi 25 satwa prioritas terancam punah sebesar 36,40%, sedangkan pada tahun 2016 rata – rata peningkatan populasinya sebesar 30,84%, sehingga peningkatan populasi adalah sebesar **5,56%**. Perhitungan dilakukan hanya untuk *site monitoring* yang dilaporkan pada tahun 2016 dan 2017 (Data peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas disampaikan dalam Lampiran 4.). Perbandingan data peningkatan populasi 25 satwa prioritas tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 35. Capaian Peningkatan Populasi 25 Satwa Prioritas Tahun 2015-2017**

No.	Tahun	Capaian peningkatan populasi satwa (%)	Persentase Peningkatan Populasi Dibandingkan Tahun Sebelumnya
1	2015	26,89	-
2	2016	30,84	3,95
3	2017	36,40	5,56

Peningkatan populasi spesies di suatu habitat atau *site monitoring* dilihat karena adanya kelahiran maupun penambahan individu didalam suatu populasi karena kegiatan pelepasliaran. Lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama, karena banyak faktor yang menentukan diantaranya seks rasio, struktur umur pada populasi tersebut dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan dan sebagainya. Sebagian besar satwa yang masuk ke dalam 25 satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya sampai dengan tahun 2019 pada umumnya memerlukan waktu lama untuk berkembangbiak. Badak betina memerlukan waktu hampir 3 tahun sebelum bisa memproduksi lagi termasuk waktu bunting selama 15 – 16 bulan, waktu bunting gajah yaitu 18 – 22 bulan sementara untuk orang utan 9 – 11 bulan. Oleh karena itu, perhitungan kenaikan populasi sebaiknya dihitung pada awal tahun Renstra (sebagai baseline) dan akhir tahun renstra (2019) mengingat biologi reproduksi tiap satwa berbeda.

Dalam pencapaian IKK tersebut menemui beberapa kendala antara lain: belum adanya *roadmap* suaka satwa/sanctuary yang menjadi pedoman dan standar untuk pembangunan suaka satwa di UPT. Selain itu, anggaran yang semula dialokasikan untuk pembangunan suaka satwa saat ini telah dihapus. Berkenaan dengan hal tersebut, kami melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, antara lain melanjutkan koordinasi dengan LIPI, Universitas, NGO dan para ahli dalam penyusunan *roadmap* suaka satwa. Mencari alternatif pendanaan dari pihak swasta maupun mitra lain untuk masing-masing UPT dalam pembangunan suaka satwa.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya peningkatan populasi spesies di *site monitoring* tidak hanya dilihat dari adanya penambahan individu baru, akan tetapi harus didukung dengan upaya konservasi yang lain sebagai intervensi pengelolaan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 180/IV-KKH/2015, terdapat 25 satwa prioritas terancam punah yang dilindungi. Daftar 25 satwa prioritas terancam punah yang dilindungi tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 36. Daftar 25 Satwa Terancam Punah Prioritas**

No.	Satwa	No.	Satwa	No.	Satwa
1	Harimau Sumatera	10	Maleo	19	Tarsius
2	Gajah Sumatera	11	Babi Rusa	20	Monyet Hitam Sulawesi
3	Badak	12	Anoa	21	Julang Sumba
4	Banteng	13	Elang	22	Nuri Kepala Hitam
5	Owa	14	Kakaktua	23	Penyu
6	Orangutan	15	Macan Tutul Jawa	24	Kanguru Pohon
7	Bekantan	16	Rusa Bawean	25	Celepuk Rinjani
8	Komodo	17	Cendrawasih		
9	Jalak Bali	18	Surili		



**Gambar 38. Owa Jawa (*Hylobates moloch*) di Site Monitoring BKSDA Jawa Tengah**



**Gambar 39. Banteng (*Bos javanicus*) di Site Monitoring BTN Kayan Mentarang**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 40. Cenderawasih (*Paradisea minor*) di Site Monitoring BBKSDA Papua**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 180/IV-KKH/2015, terdapat 6 kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu :

- a. Inventarisasi/monitoring populasi (jumlah individu, jumlah sarang, jumlah kelahiran, jumlah kematian);
- b. Pembinaan habitat (hektar atau unit);
- c. Penyadartahuan (jumlah kegiatan/tahun/UPT)
- d. Perlindungan dan pengamanan (km.orang/hari) dan (jumlah laporan kegiatan illegal);
- e. Penanggulangan konflik (individu-presentase jumlah korban menurun).
- f. Penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran (individu – jumlah individu yang diselamatkan atau yang dilepasliarkan).

Pada tahun 2017, telah disusun dan disempurnakan *Roadmap* Peningkatan Populasi 25 Satwa Prioritas Terancam Punah yang salah satu isinya terkait dengan metode pemantauan populasi untuk setiap species. Pada tahun 2017 dilakukan pemutakhiran metode inventarisasi banteng dan rusa bawean sesuai dengan masukan para ahli.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan populasi dan penurunan populasi dari data spesies per site monitoringnya. Populasi tertinggi satwa prioritas terjadi pada Kakatua dan Celepuk Rinjani. Sedangkan penurunan populasi paling signifikan satwa prioritas terjadi pada Anoa dan Harimau Sumatera. Peningkatan populasi meningkat diindikasikan karena beberapa hal, antara lain: perlindungan terhadap Orangutan dan Celepuk Rinjani.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 41. Kegiatan Pemasangan Camera Trap monitoring Anoa BKSDA Sulawesi Utara**

**Gambar 42. Penjelajahan Jalur Pengamatan dan Monitoring Satwa di BBKSDA Jawa Barat**



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
**Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) target 7 paket data**

Capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 37. Capaian Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7	6	85,71

Realisasi jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi pada tahun 2017 mencapai 6 paket data dari target yang ditetapkan sebesar 7 paket data dari 7 ekoregion yaitu paket data pada Ekoregion Sumatera, Ekoregion Jawa, Bali, dan Nusra, Ekoregion Sunda Kecil, Kalimantan, Ekoregion Sulawesi, dan Ekoregion Papua, sehingga persentase capaian IKK ini sebesar 85,71%. Paket data dan informasi yang belum tercapai adalah Ekoregion Maluku.

Ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik pada tahun 2017 ditargetkan untuk dilakukan uji petik pada 1 (satu) wilayah biogeografi, yaitu ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Adapun hasil kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2017 meliputi pengumpulan data dan informasi potensi identifikasi potensi *bioprospecting* (tanaman obat) di kawasannya. Pemenuhan data potensi tanaman obat pada Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara diwakili oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Untuk mendukung pencapaian IKK ini telah dilakukan beberapa kegiatan seperti bimbingan Penyusunan Profile Kehati Daerah, Identifikasi Potensi Tanaman Obat di Indonesia di Kawasan Konservasi, dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik.

Pengumpulan data dan informasi keanekaragaman hayati juga dilakukan dengan permintaan data tersebut ke daerah, baik ke Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi maupun UPT Ditejen KSDAE. Saat ini telah terkumpul beberapa buku Profil Keanekaragaman Hayati Daerah dari beberapa provinsi dan data bioprospeksi (tumbuhan obat, anggrek, rotan, jenis tumbuhan dan satwa liar berprospek ekonomi tinggi) dari seluruh UPT Ditjen KSDAE.

**Tabel 38. Data Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik**

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya
<b>A</b>	<b>Ekoregion Sumatera</b>		
1	BKSDA JAMBI	-	Buku informasi satwa liar yang diperdagangkan di Jambi
2	BKSDA SUMATERA SELATAN	Laporan Identifikasi Potensi KSA/KPA Bangka Belitung	Buletin Rimau Kito Buletin Rimau Kito Buletin Rimau Kito
3	BKSDA ACEH	Pengetahuan dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat di Sabang, Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam	Jenis tumbuhan anggrek epifit di kawasan cagar alam Jantho, Kab. Aceh Besar

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya
4	BBTN GUNUNG LEUSER	Daftar jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Ketambe, kecamatan Badar - Aceh Tenggara	
5	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di kawasan Hutan Krui Taman Nasional BBS Lampung Barat	Seminar Nasional HUT Kebun Raya Cibodas ke 150 Buletin Siamang edisi 1
6	BTN BATANG GADIS	Daftar Data Informasi Tanaman Obat sebagai Potensi Bioprospeksi di Taman Nasional Batang Gadis	
7	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	Eksplorasi Tumbuhan Obat di TN Berbak	Orchid of Jambi (Anggrek Alam Jambi) Studi Keanekaragaman Jenis Kantong Semar di TN Berbak
8	BTN BUKIT TIGA PULUH	Laporan Identifikasi Pemanfaatan TSL oleh Suku Talang Mamak di TNBT (Suku Talang Mamak di desa Rantau Langsung Resort Siambul)	
9	BTN BUKIT DUA BELAS	Buku Pengenalan Tumbuhan Obat Taman Nasional Bukit Dua Belas Laporan Identifikasi Tumbuhan Obat di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	
<b>B Ekoregion Jawa, Bali dan Nusra</b>			
1	BBKSDA JAWA BARAT	Studi Potensi Tumbuhan Obat di CA dan TWA Pananjung Pangandaran Pemanfaatan Tradisional Tumbuhan Obat oleh Masyarakat Sekitar Kawasan CA Gunung Tilu, Jawa Barat Pemanfaatan Tumbuhan Berkhasiat Obat oleh Masyarakat Sekitar Cagar Alam Gunung Simpang, Jawa Barat Pembuatan Plot Sampel Permanen Tanaman Anggrek di CA Gunung Tilu	
2	BBKSDA JAWA TIMUR	Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Cagar Alam P. Sempu Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Cagar Alam Gunung Sigogor Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Hutan Lindung Sigogor,	
3	BKSDA JAKARTA		Informasi Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Pulau Rambut Informasi Potensi Perairan Suaka Margasatwa Pulau Rambut Film Dokumenter Ramsar Site Suaka Marga Satwa Pulau Rambut
4	BKSDA JATENG		Film Dokumenter Lembaga Desa Konservasi Pulau Untung Jawa

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya
5	BKSDA YOGYAKARTA	Inventarisasi Tanaman Obat di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul	
6	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	Tanaman Obat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	
7	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	Penelitian Mahasiswa dengan judul "Etnobotani Masyarakat Suku Tengger : Studi Kasus di Desa Ranu Pane Wilayah Enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang"	
8	BTN UJUNG KULON	Daftar Jenis Tanaman Obat di Taman Nasional Ujung Kulon	
9	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	Laporan Eksplorasi : Potensi Lamiaceae, Begoniaceae dan Rubiaceae sebagai bahan baku obat dan aspek konservasinya	<p>Keragaman Bryophyta Taman Nasional Gunung Halimun Salak</p> <p>Eksplorasi Keragaman Lumut (Bryophyta) di Resort Cidahu, Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak</p> <p>A Photographic Guide to the Common Insects of Gunung Halimun Salak National Park</p> <p>Five Hundred Plants Species in Gunung Halimun Salak National Park, West Java</p> <p>Jenis-jenis Anggrek Taman Nasional Gunung Halimun Serangga Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Bagian Barat</p> <p>Spesies dan Functional Diversity of Soil Microflora at Gunung Halimun National Park</p> <p>Mamals of Gunung Halimun national Park, West Java</p>
10	BTN MERU BETIRI	<p>Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan Potensi Wanafarma Propinsi Jawa Timur : TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Meru Betiri, TN Baluran dan TN Alas Purwo</p> <p>Buku Informasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna TNMB Hasil Penelitian Skripsi</p>	Laporan Inventarisasi Anggrek TNMB
11	BTN GUNUNG CIREMAI	Daftar Jenis Potensi Tanaman Obat di Taman Nasional Gunung Ciremai	<p>Daftar Jenis Potensi Tanaman Hias di Taman Nasional Gunung Ciremai</p> <p>Daftar Jenis Kantong Semar/Nepenthes di Taman Nasional Gunung Ciremai</p>
12	BTN ALAS PURWO		<p>Seri buku informasi dan promosi pengelolaan bambu TN Alas Purwo</p> <p>Seri buku informasi dan promosi mangrove TN Alas Purwo</p>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya
			Seri buku informasi dan promosi burung air TN Alas Purwo
			Panduan Lapangan Mamalia TN Alas Purwo
			Panduan Lapangan Herpetofauna (Amphibi dan Reptil) TN Alas Purwo
<b>C</b>	<b>Ekoregion Sulawesi</b>		
1	BBKSDA SULAWESI SELATAN	Tanaman obat	Inventarisasi Anggrek di CA. Faruhumpenai
			Inventarisasi Anggrek di SM. Komara
			Inventarisasi Anggrek di TWA Malino
			Inventarisasi Rusa di SM Komara
			Monitoring Rusa di SM Komara
			Monitoring Rusa ( <i>Cervus timorensis</i> ) di SM Komara
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena di CA Ponda-Ponda
			Inventarisasi Eboni di CA. Kalena di SM Komara
			Inventarisasi dan Identifikasi jenis satwa burung di SM Mampie
			Inventarisasi Maleo ( <i>Macrocephalon maleo</i> ) di Desa Kambunong, Kab. Mamuju
			Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			Inventarisasi Anoa di CA Faruhumpenai
			Inventarisasi <i>Macaca maura</i> di TWA. Lejja
			Identifikasi jenis ikan Introduksi pada TWA Danau Matano
2	BKSDA SULTENG		Laporan Hasil Kegiatan Identifikasi Potensi Anggrek di Cagar Alam Gunung Dako
			Laporan Identifikasi Potensi Anggrek di Cagar Alam Gunung Tinombala Kabupaten Parigi Moutong
3	BTN LORE LINDU	Statistik BTN Lore Lindu	
4	BTN WAKATOBI	Identifikasi Tanaman Obat	Monitoring Burung Pantai

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya
			Monitoring Mangrove
			Monitoring Lamun
			Monitoring Cetacea
			Monitoring Penyu
			Monitoring Karang
			Monitoring SPAGs
5	BTN BOGANI NANI WARTABONE	Identifikasi Potensi Tanaman Obat Indonesia di Bolonsio dan Toraut di Balai TN Bogani Nani Wartabone	
6	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG	Laporan Identifikasi dan Sebaran Tanaman Obat di Dusun Pattiro, Desa Labuaja dan Dusun Pattunuang, Desa Samangki di TN Bantimurung Saraung	Identifikasi Anggrek Alam di TN Bantimurung Bulusaraung
		Identifikasi dan Pemetaan Tanaman Obat di Resort Pattunuang	Identifikasi Keragaman Kupu-Kupu (Papillioidea) di TN Bantimurung Bulusaraung
7	BTN BUNAKEN	Pemanfaatan tumbuhan obat di Kecamatan bunaken, Kota manado, provinsi sulawesi utara	
		Potensi Spons Petrosia sp Sebagai Bahan Antikanker	
<b>D</b>	<b>Ekoregion Kalimantan</b>		
1	BKSDA KALTENG	(Data potensi bioprospeksi Balai KSDA Kalteng, hasil inventarisasi dan identifikasi tanaman obat di TWA Bukit Tangkiling, TWA Tanjung Keluang, SM Lamandau dan CA Pararawen pada tahun 2011)	
2	BKSDA KALSEL		Inventarisasi Tanaman Jenis Rhododendron sp di Pegunungan Meratus
			Inventarisasi Anggrek Alam di CA Gunung Kentawan
			Survey Anggrek Dilindungi di Pelaihari Tanah Laut
			Survei Anggrek Dilindungi di Meratus Hulu Sungai Tengah
			Identifikasi Anggrek di Calon Taman Nasional Meratus Hulu Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel
			Identifikasi Rotan Di Calon Taman Nasional Meratus Hulu Barabai
3	BKSDA KALBAR	Laporan identifikasi dan analisis tumbuhan obat dan TWA Bukit Kelam, Kabupaten Sintang	
4	BTN SEBANGAU	Laporan Penelitian Flora Taman Nasional Sebangau (penelitian LIPI)	
5	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	Data base potensi keanerakaragaman hayati tahun 2010 - 2014 TN BBR	
6	BTN GUNUNG PALUNG	Daftar Jenis Tumbuhan Obat di Stasiun Penelitian Cabang Panti, Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Kayong Utara, Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Kalbar	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Ekoregion/ UPT	Judul Publikasi Tanaman Obat	Judul Publikasi Bioprospecting Lainnya
<b>E Ekoregion Kep. Sunda Kecil</b>			
1	BTN BALI BARAT	Buku Informasi Tumbuhan Obat di Taman Nasional Bali Barat	Buku Informasi Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Bali Barat Burung-burung Taman Nasional Bali Barat
2	BKSDA NTB	Tabel Data Potensi Tanaman Obat di Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam	
3	BTN MANUPEU TANAH BARU	Kajian Etnobotani Dan Keragaman Jenis Tumbuhan Obat dalam Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru	
4	BTN GUNUNG RINJANI	Tanaman Obat Kawasan TNGR (draft)	Anggrek TN Gunung Rinjani Mushrooms Kawasan TN Gunung Rinjani
5	BTN KELIMUTU	Kajian Potensi Tanaman Obat di Kawasan TN Kelimutu	Kajian Potensi Tanaman Obat di Kawasan TN Kelimutu
<b>F Ekoregion Papua</b>			
1	BBKSDA PAPUA BARAT	(CA. Waigeo Timur) (CA. Pegunungan Arfak)	(CA. Teluk Bintuni) (CA. Peg. Kumawa)
2	BTN TELUK CENDRAWASIH	Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat Masyarakat Tradisional Isenebual Distrik Rumberopon, Kab. Teluk Wondama	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Kampung Yopanggar pada BPTN Wilayah II Wasior
		Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat di Kampung Aisandami BPTN Wil II Wasior	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Kampung Waprak pada BPTN Wilayah III Ransiki
		Identifikasi dan Inventarisasi Tanaman Obat di Waprak Pulau Roswar, Distrik Roswar, Kab. Teluk Wondama	Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Anggrek di Pulau Anggromeos pada BPTN Wilayah I Nabire
3	BTN LORENTZ		Flora dan Fauna Taman Nasional Lorentz
			Mengenal Burung Langka <i>Macgregoria pulchra</i>
			Burung Migran Taman Nasional Lorentz

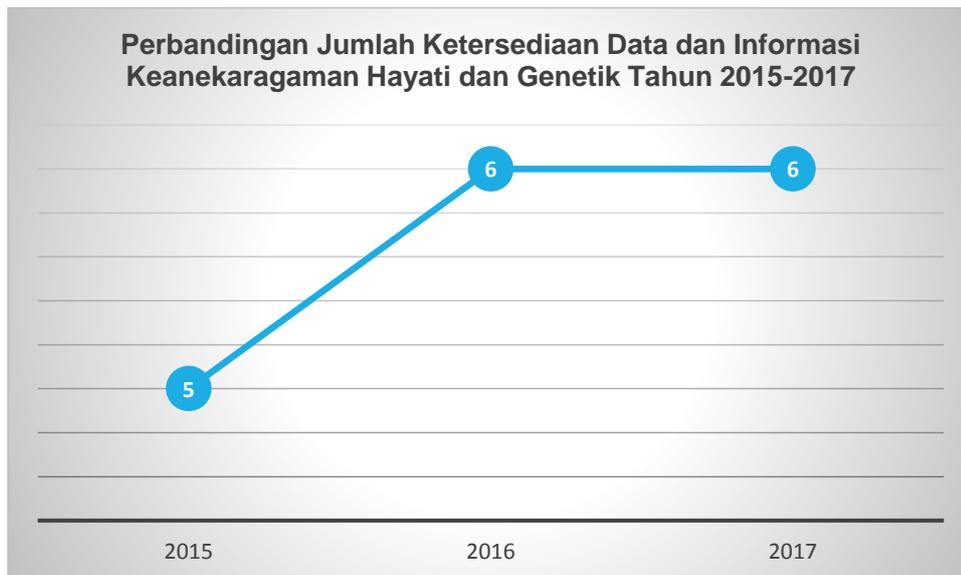
Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies Dan Genetik Tiap Tahun per Ekoregion yang dilakukan uji petik yaitu sebagai berikut:

**Tabel 39. Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik**

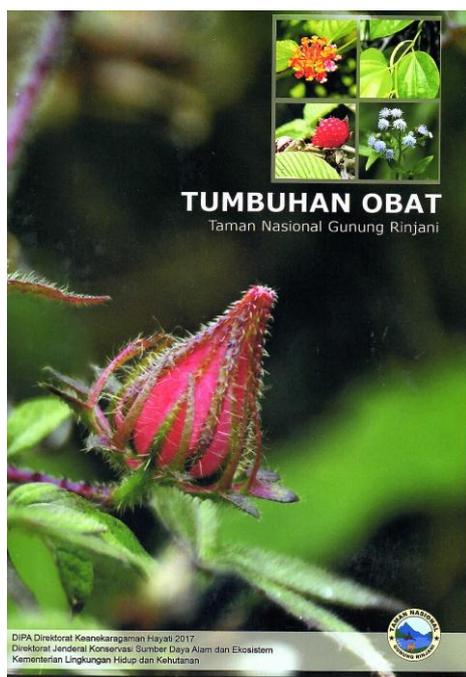
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Ekoregion	Sulawesi, Kalimantan	Sumatera	Bali dan Nusa Tenggara
Lokasi		Taman Nasional Bukit Dua Belas	Taman Nasional Gunung Rinjani

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Gambar 43. Perbandingan Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Genetik Tahun 2015-2017**



**Gambar 44. Identifikasi Tanaman Obat Di Demplot Pengembangan Tanaman Obat TN Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi**



**Gambar 45. Data dan Informasi Tanaman Obat di TN Gunung Rinjani**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKK tersebut tersebarnya data bioprospecting dan keanekaragaman hayati daerah pada berbagai institusi/ lembaga dan belum terintegrasi dalam satu wadah.

Pengumpulan data dan informasi keanekaragaman hayati juga dilakukan dengan permintaan data tersebut ke daerah, baik ke Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi maupun UPT Ditejen KSDAE. Saat ini telah terkumpul beberapa buku Profil Keanekaragaman Hayati Daerah dari beberapa provinsi dan data bioprospeksi (tumbuhan obat, angrek, rotan, jenis tumbuhan dan satwa liar berprospek ekonomi tinggi) dari seluruh UPT Ditjen KSDAE.

Untuk mendukung pencapaian IKK ini telah dilakukan beberapa kegiatan seperti bimbingan Penyusunan Profile Kehati Daerah, Identifikasi Potensi Tanaman Obat di Indonesia di Kawasan Konservasi, dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik.

Rencana tindak lanjut tahun 2018 yang mendukung IKK "Tersedianya Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik" dialokasikan untuk persiapan kegiatan Penyusunan Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar, Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah, Koordinasi Pengelolaan SDG serta Monitoring Pengelolaan SDG.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
**Luas KEE yang telah terkelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial dengan target 300.000 Ha dalam 13 unit KEE**

Capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 40. Capaian IKK Luas KEE yang telah terkelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial dengan target 300.000 Ha dalam 13 unit KEE**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Luas KEE yang telah terkelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Unit/Ha	300.000 Ha dalam 13 Unit KEE	63.957,9 Ha dalam 14 Unit KEE	21,32 (luasan) 107,70 (unit KEE)

Capaian IKK ini pada tahun 2017 yaitu terkelolanya 14 unit KEE yang memiliki kelembagaan dengan luas 63.957,9 Ha dari target seluas 300.000 Ha pada 13 unit KEE (21,32%).

Capaian unit KEE yang telah terkelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yaitu sebagai berikut:

1. Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati)
    - a. Taman Kehati Hutan Monumental Nyaru Menteng (Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)

Pembangunan Taman Kehati Hutan Monumental Nyaru Menteng didorong oleh kesadaran masyarakat lokal yang ingin melindungi kawasannya sebagai kawasan pelestarian plasma nutfah ekosistem hutan rawa di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pada tahun 2017 ditetapkanlah KEE Taman Kehati Hutan Monumental Nyaru Menteng ini melalui **SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522.1.100/225/Dishut** tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Hutan Monumental Nyaru Menteng di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 1.377,6 Ha.

Taman Kehati Hutan Monumental Nyaru Menteng dikelola oleh Satuan Unit Kerja Daerah yang merupakan badan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, LSM dan kelompok masyarakat sekitar. Terkait pengelolaan, fasilitasi dan operasional kegiatan saat ini menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
    - b. Taman Kehati Puti Saloati (Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat)

Pembangunan Taman Kehati Puti Saloati dengan luas 3,5 Ha dibangun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 57 ayat (1) dan atas kepedulian Pemda untuk menyediakan ruang terbuka hijau serta melestarikan jenis tumbuhan lokal, sehingga pada tahun 2015 dibentuklah tim Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kota Solok melalui **Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-689 pada tanggal 7 Desember 2017**. Adapun tim pengelola tersebut terdiri dari:
- 1) Asisten Bidang Administrasi Pembangunan
  - 2) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  - 3) Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kesenian dan Pariwisata
  - 4) Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
  - 5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan
  - 6) Kepala Kantor Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Taman Kehati Puti Soloati sudah berjalan efektif dikarenakan sudah disusunnya Rencana Aksi Pengelolaan Taman Kehati Kota Solok tahun 2017 - 2021

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

yang meliputi peningkatan jumlah koleksi kehati unggulan dan tumbuhan lokal, pengembangan ekowisata, sarana penelitian dan edukasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

c. Taman Kehati Padang Pariaman (Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)

Taman Keanekaragaman Hayati Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan luas 10 Ha ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 256/KEP/BPP/2014 tahun 2016** tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Padang Pariaman. Pengelola Taman Kehati di Kabupaten Padang Pariaman ini berada di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dan melibatkan :

- 1) Setda Kabupaten Padang Pariaman
- 2) Bappeda Kabupaten Padang Pariaman
- 3) Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman
- 4) Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman
- 5) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Taman Kehati Padang Pariaman ini masih mengalami beberapa kendala dalam program pengembangan Taman Kehati, diantaranya belum tersusunnya rencana aksi pengelolaan Taman Kehati dan keterbatasan pendanaan dalam pengembangan Taman Kehati.

d. Taman Kehati Oheo (Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara)

Taman Kehati Oheo Kabupaten Konawe Utara dengan luas 15 Ha ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 237 tahun 2017** tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Oheo Kabupaten Konawe Utara. Lokasi Taman Kehati Oheo ini bersebelahan dengan kawasan karst. Taman Kehati Oheo Kabupaten Konawe Utara dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten konawe Utara dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait, yaitu:

- 1) Setda Kabupaten Konawe Utara
- 2) Bappeda Kabupaten Konawe Utara
- 3) Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Konawe Utara
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe utara
- 5) Dinas Pemuda, Olahraga Kabupaten Konawe Utara
- 6) Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara
- 7) Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara
- 8) Dinas Perkebunan Kabupaten Konawe Utara
- 9) Camat Oheo
- 10) Kepala Desa Bendewuta
- 11) Kelompok Tani Masyarakat Sekitar
- 12) Perguruan Tinggi/Universitas Negeri dan Swasta yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara
- 13) Forum CSR Kabupaten Konawe Utara

Dinas Lingkungan Hidup sangat mendorong terbangunnya Taman kehati ini, terbukti dari pembentukan pengelola Taman kehati serta penyusunan rencana aksi Taman Kehati Oheo.

e. Taman Kehati PT. Pupuk Kujang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Taman Kehati PT. Pupuk Kujang dengan luas 120 Ha ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 188/Kep.988-Huk/2017** tentang Penetapan Unit Pengelola dan Rencana Aksi Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati "Pupuk Kujang" di PT. Pupuk Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang. Pengelolaan Taman

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kehati Pupuk Kujang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Pemda Karawang dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pembangunan Taman Kehati Pupuk Kujang ini atas inisiatif perusahaan sendiri sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap konservasi pada areal perusahaan. Selain itu, tujuan dibangunnya Taman Kehati Pupuk Kujang ini adalah sebagai lokasi uji coba terhadap produk pupuk kujang.

f. Taman Kehati Baubau (Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara)

Taman Kehati Bau-Bau dengan luas 3 Ha ditetapkan melalui **SK Walikota Baubau Nomor 358/IX/2017** tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kota Baubau. Taman kehati ini dibangun karena berbatasan dengan hutan lindung sehingga mendorong DLH dan masyarakat sekitar untuk melindungi kawasan tersebut. Pengelolaan Taman Kehati Baubau dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dengan melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu:

- 1) Setda Kota Baubau
- 2) Bappeda Kota Baubau
- 3) Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau
- 5) Dinas Pariwisata Kota Baubau
- 6) Dinas Pertanian Kota Baubau
- 7) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Baubau
- 8) Perguruan Tinggi/universitas Negeri/Swasta yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara
- 9) Camat Sorawolio
- 10) Kelompok Tani Masyarakat Sekitar
- 11) Forum CSR Kota Baubau

g. Taman Kehati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara

Taman Kehati Kabupaten Muna dengan luas 15 Ha ditetapkan melalui **Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 870 Tahun 2017** tentang Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Muna. Pengelolaan Taman Kehati dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna dengan melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu:

- 1) Bappeda Kabupaten Muna
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna
- 3) Dinas Ketahanan pangan, holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna
- 4) Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 5) Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan Kabupaten Muna
- 6) Dinas Pariwisata Kabupaten Muna
- 7) Camat Watuputih
- 8) Kepala Desa Bangkali
- 9) Ketua BPD Desa Bangkali
- 10) LSM RINAM Kabupaten Muna

Pengelolaan Taman Kehati Kabupaten Muna sudah berjalan efektif dikarenakan sudah disusunnya Rencana Aksi Pengelolaan Taman Kehati Kabupaten Muna tahun 2017 - 2021 yang meliputi Perencanaan penetapan tapak lokasi dan pengelola Taman Kehati, dokumen perencanaan program, pemeliharaan dan pengembangan vegetasi, pembangunan infrastruktur, kerjasama dan peningkatan kapasitas, perencanaan ekowisata, dan penggalan sumber pendanaan serta monitoring dan evaluasi.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### h. Taman Kehati Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Taman Kehati Kabupaten Blitar dengan luas 10 Ha ditetapkan dalam rangka menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar melalui **SK Bupati Blitar Nomor: 188/388/409.06/KPTS/2017** tanggal 9 Nopember 2017 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungerejo, Kabupaten Blitar dan **SK Bupati Blitar Nomor: 188/405/409.06/KPTS/2017** tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungerejo, Kabupaten Blitar. Adapun tim pengelola tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bupati Blitar;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Dinas PUPR;
- 4) Dinas Perumperkim;
- 5) Dinas Pertanian;
- 6) Dinas Pendidikan;
- 7) Dinas Parbudpor;
- 8) Camat Panggungerejo;
- 9) Kepala Desa Sumberagung;
- 10) Yayasan Sahabat Menanam;
- 11) Praktisi Lingkungan;
- 12) LPMD;
- 13) Kelompok masyarakat sekitar.

## 2. Kawasan Mangrove

### a. Mangrove Torosiaje, Provinsi Gorontalo

Mangrove Torosiaje diusulkan melalui **Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 522.12/Hutem/737/VIII/2016** tanggal 12 Agustus 2016 perihal tindak lanjut kunjungan Presiden RI ke Provinsi Gorontalo dan surat Bupati Pohuwato Nomor: 050/Bappeda-Phwt/204/10/2016 tanggal 03 Oktober 2016 perihal permohonan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Mangrove Desa Torosiaje.

Ekosistem mangrove Torosiaje diusulkan menjadi KEE karena mempunyai potensi mangrove yang terjaga dengan baik, habitat burung-burung air, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Bajo dan masyarakat sekitarnya dalam melestarikan mangrove yang ada.

Di dalam KEE yang akan dibentuk, selain mencakup kawasan mangrove dimaksud juga akan memasukan kawasan pemukiman suku Bajo dan pesisir pantai sebagai kawasan ekosistem esensial.

Beberapa stakeholder yang terlibat dalam forum kolaborasi KKE Mangrove Torosiaje adalah Pemerintah Desa Torosiaje, Pemerintah Desa Torosiaje Jaya, Pemerintah Desa Bumi Bahari, Pemerintah Kecamatan Popayato, Universitas Negeri Gorontalo, LSM JAPESDA Gorontalo, Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, BPKH Wilayah XV, BPDAS Bone Bongalo, BKSDA SKW II Gorontalo, dsb.

Pada tahun 2017, melalui **SK Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 322/21/X/2017** telah ditetapkan Pembentukan Forum Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Torosiaje Serumpun Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Melalui SK ini juga, kawasan ekosistem esensial Mangrove Torosiaje Serumpun Kabupaten Pohuwato diusulkan dengan luas 1.278,96 Ha.



**Gambar 46. Kawasan mangrove Torosiaje, Provinsi Gorontalo**

b. Mangrove Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ekosistem mangrove yang ada di Kabupaten Lombok Barat berlokasi di kawasan Hutan Mangrove Lembar, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hutan mangrove Lembar terletak di kawasan pesisir pantai selatan Lombok Barat memiliki luas 90 Ha. Kawasan mangrove Lembar saat ini dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove Lembar oleh masyarakat Desa Lembar Selatan. Jenis mangrove yang ditemukan pada lokasi tersebut salah satunya yaitu *Rhizophora* sp.

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan ekosistem esensial lahan basah (survey/ground check kondisi lapangan) di Pulau Lombok, NTB yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017, kawasan mangrove Lembar dapat diinisiasi sebagai calon KEE mangrove di Kab. Lombok Barat. Terkait hal tersebut, BKSDA Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas LH Kab. Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat, serta stakeholders terkait lainnya menyusun pembentukan Forum Pelestari Mangrove Kabupaten Lombok Barat. Forum tersebut selanjutnya disahkan melalui **Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 793/14/DLH/2017** tanggal 11 Desember 2017.



**Gambar 47. Mangrove di Kawasan Mangrove Lembar**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3. Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi

#### a. Koridor Gajah di Kabupaten Bener Meriah

Direktorat Jenderal KSDAE melalui Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) melakukan koordinasi sejak tahun 2016 dengan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah dan HAKA (NGO Lokal) untuk inisiasi pembentukan kelembagaan KEE koridor gajah. Kelembagaan koridor gajah berupa *Tim Adhoc* di Kabupaten Bener Meriah ditetapkan melalui **Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor: 660/653/SK/2017** pada bulan September 2017, dengan ketua Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah. Tim Adhoc ditetapkan dalam rangka pengelolaan KEE dan penanggulangan konflik antara manusia dan gajah. Pengelolaan koridor gajah melalui *Tim Adhoc* dilaksanakan secara kolaboratif dengan keanggotaan berupa SKPD terkait di Kabupaten Bener Meriah, masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, LSM, dan BKSDA Aceh (CRU).

Kawasan Ekosistem Esensial berupa koridor gajah ditetapkan melalui SK Bupati Bener Meriah dengan luas 1.000 Ha di kampung Jalung Satu, Jalung Dua dan Sayeng di Kecamatan Pintu Rime Gayo merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) dan berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan. Diperkirakan populasi gajah pada lokasi tersebut sebanyak  $\pm 45$  individu. Untuk meningkatkan populasi gajah, pemerintah kabupaten Bener Meriah berencana menghubungkan koridor gajah dengan Kabupaten Bireun dan Aceh Tengah sebagai kabupaten yang berbatasan langsung, sehingga lembaga pengelolanya dikoordinir oleh pemerintah provinsi Aceh.

#### b. Koridor Orangutan Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Lembaga pengelolaan KEE di Kabupaten Ketapang berupa Forum Pengelolaan KEE Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan **Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan Nomor: 805/DISHUT/2016** pada bulan November 2016, dengan ketua Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada SK tersebut, SKPD terkait KEE di Kabupaten Ketapang merupakan anggota tetap. Sejak tahun 2016, Direktorat BPEE berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (lembaga donor) untuk pembentukan Forum Pengelolaan KEE.

Forum pengelolaan KEE dilakukan secara kolaboratif guna terwujudnya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Keanggotaan Forum terdiri dari Direktur BPEE, SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau.

Koridor Orangutan di Kabupaten Ketapang berada pada lansekap Sungai Putri - Hutan Lindung Gunung Tarak dan Taman Nasional Gunung Palung. Luas koridor orangutan ditetapkan 12.918,13 Ha melalui **SK Gubernur Kalimantan Barat dengan Nomor: 718/DISHUT/2017** pada tanggal 17 November 2017, perkiraan populasi Orangutan menurut YIARE tahun 2017 sebanyak  $\pm 2.500$  individu. Koridor Orangutan pada lansekap tersebut sebagian berada pada wilayah konsesi perusahaan sawit (PT. Kayong Agro Lestari, PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa). Perusahaan sawit dan NGO lokal akan menjadi anggota Forum Pengelola KEE di tingkat tapak.

#### c. Koridor Orangutan dan Bekantan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat

Lembaga pengelolaan koridor orang utan kalimantan (*Pongo pygmaeus*) dan Bekantan (*Nasalis larvatus*) di Kabupaten Kayong Utara berupa Forum Pengelolaan KEE Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan **Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan Nomor: 805/DISHUT/2016** pada bulan November 2016, dengan ketua Kepala

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada SK tersebut, SKPD terkait KEE di Kabupaten Kayong Utara (Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas pariwisata), merupakan anggota tetap. Hal ini sejalan dengan UU Nomor: 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan pengelolaan ekosistem penting (ekosistem esensial) merupakan kewenangan pemerintah provinsi cq Dinas Kehutanan Provinsi. Sejak tahun 2016, Direktorat BPEE berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (lembaga donor) untuk pembentukan Forum Pengelolaan KEE di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Forum pengelolaan KEE dilakukan secara kolaboratif guna terwujudnya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Keanggotaan Forum terdiri dari Direktur BPEE, SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau.

Koridor Orangutan dan Bekantan di Kabupaten Kayong Utara berada pada lansekap Rawa Air Tawar- DAS Mendawak, dengan luas koridor 18.025,71 Ha dan ditetapkan melalui **SK Gubernur Kalimantan Barat dengan Nomor: 718/DISHUT/2017** pada tanggal 17 November 2017. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan survey habitat orangutan dan bekantan dan terdapat riparian, namun belum ada data tentang jumlah populasi orangutan dan bekantan pada koridor tersebut.

Di lansekap Rawa Air Tawar-DAS Mendawak sebagian berada pada wilayah konsesi perusahaan sawit PT. BGA Group. Perusahaan sawit NGO lokal dan masyarakat di sekitar koridor akan menjadi anggota Forum Pengelola KEE di tingkat tapak.

### d. Koridor Gajah Sumatera Lansekap Seblat Provinsi Bengkulu

Sebagai upaya mempertahankan populasi, habitat dan mencegah terjadinya konflik gajah dengan manusia, perlu membangun koridor gajah sumatera pada bentang alam Kerinci Seblat. Kawasan ekosistem esensial berupa koridor gajah Sumatera yang merupakan bentang alam Kerinci Seblat (Taman Wisata Alam Seblat dan Taman Nasional Kerinci Seblat) berada di Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Kelembagaan pengelolaan koridor gajah berupa Forum kolaborasi dengan stakeholder terkait (pusat dan daerah) telah terbentuk dengan **SK Gubernur Bengkulu Nomor S.497.DLHK.Tahun 2017** tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lansekap Seblat Bengkulu dengan luas ±29.091 Ha, dengan koordinator forum tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

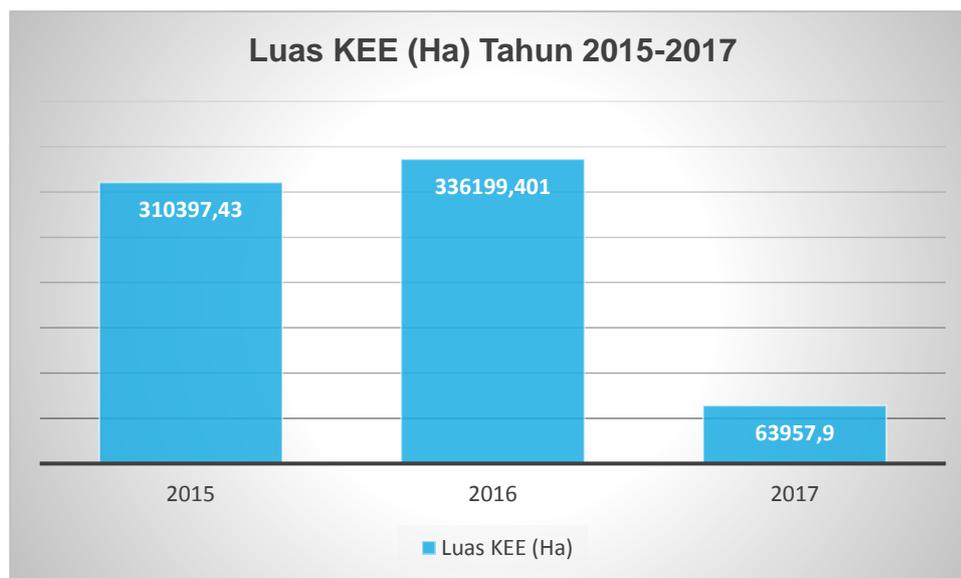
Keanggotaan forum kolaborasi Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Gajah Sumatera Lansekap Seblat Bengkulu melibatkan SKPD Provinsi Bengkulu, BKSDA Bengkulu, NGO, Universitas dan perangkat desa setempat.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Perbandingan capaian IKK dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 41. Perbandingan Capaian IKK Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial Tahun 2015-2017**

IKK	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	310.397,43 Ha dalam 13 Unit KEE	336.199,401 Ha dalam 8 Unit KEE	63.957,9 Ha dalam 14 Unit KEE



**Gambar 48. Luas KEE Tahun 2015 – 2017**



**Gambar 49. Peta Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2017**

Capaian IKK tahun 2017 secara jumlah kelembagaan tercapai melebihi target yaitu 14 unit KEE. Namun untuk luasan yang menjadi target tidak tercapai. Total luasan dari 14 KEE seluas 63.957,9 Ha dari target 300.000 ha dalam 13 KEE.

Luasan yang menjadi target pada KEE yang terbentuk akan sulit tercapai mengingat bahwa sebagian besar target kelembagaan adalah Taman Keanekaragaman Hayati (tahun 2017 sejumlah 8 Taman Kehati, 4 Koridor, 2 KEE Mangrove). Pencapaian luasan yang tidak memenuhi target disebabkan salah satunya adalah adanya aturan tentang luasan Taman Keanekaragaman Hayati melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 3 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati. Disebutkan bahwa luasan Taman Keanekaragaman Hayati untuk Kabupaten seluas minimal 10 Ha, Kota seluas minimal 3 Ha. Dari batasan ini, sebagian besar Kabupaten/Kota mengalokasikan luasan untuk Taman Kehati pada angka minimal yaitu pada luasan 3 Ha dan 10 Ha. Meskipun dalam kenyataannya terdapat juga daerah yang menetapkan luasan Taman Keanekaragaman Hayati mencapai lebih dari 1.000 Ha, namun tidak akan dapat terpenuhi target tersebut.

Karst merupakan salah satu ekosistem esensial, namun penetapan Kawasan Karst sebagai KEE masih menemui kendala. Apabila dilihat dari potensi kawasan karst yang ada, luasan kawasan karst sangat potensial ditetapkan sebagai KEE. Hal ini terbentur dengan kepentingan pemanfaatan karst sebagai salah satu bahan utama pembuatan semen. Padahal secara ekologi kawasan karst sebagai salah satu cadangan air bersih. Pengembangan kawasan karst dapat dimanfaatkan untuk ekowisata yang bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penyebab lainnya adalah jumlah luasan KEE mangrove yang tidak terlalu besar. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap mangrove serta penggunaan lahan pada habitat

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

mangrove. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penggunaan lahan untuk pembangunan dermaga, pertambakan, dan permukiman semakin mempersempit luasan ekosistem mangrove yang ada. Adapun terhadap penentuan luasan koridor, terkendala dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota maupun provinsi.

Permasalahan pada Taman Kehati dapat disikapi dengan menerapkan pembentukan konsep pengelolaan Taman Kehati. Perlu diinformasikan tidak hanya penetapan saja, namun informasi nilai ekonomis bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Potensi yang terdapat pada kawasan karst yang begitu tinggi baik dari segi ekologi maupun ekonomi, masih dapat dan perlu dikembangkan agar dapat terkelola dengan baik yang pada akhirnya memberikan nilai tambah secara ekonomi dan ekologi. Upaya pemanfaatan dengan menetapkan kawasan karst sebagai KEE dapat didorong untuk potensi pengembangan ekowisata, hal ini akan dapat bersinergi dengan Organisasi perangkat daerah terakit dan Lembaga/Kementerian terkait dalam konsep pengelolaan.

Tingginya tekanan terhadap penggunaan lahan pada daerah pesisir menyebabkan berkurangnya luasan mangrove yang ada. Hal ini perlu disikapi dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat, OPD, LSM dan para pihak terkait dalam upaya konservasi mangrove yang ada. Secara ekologi, mangrove dapat berfungsi sebagai tempat berpijah bagi beberapa jenis ikan dan habitat bagi kepiting, kerang-kerangan, disamping sebagai penahan abrasi air laut. Koordinasi dan sinergi antar lembaga/kementerian yang terkait dalam upaya pencapaian luasan mangrove yang terdegradasi menjadi tanggung jawab bersama, seperti yang sudah tercantum dalam keputusan Menteri Perekonomian Bidang Perekonomian RI nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.

Mendorong Pemerintah Daerah dalam penetapan Koridor sebagai salah satu upaya pelestarian satwa liar dilindungi dengan mencadangkan sebagian lahan yang ada melalui Rencan Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koridor.

Upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi, Koordinasi dan bimbingan teknis terkait dengan pembentukan Kawasan Ekosistem esensial kepada UPT Kementerian LHK, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan para pihak yang terkait dengan KEE.
2. Mempercepat proses persetujuan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan KEE untuk segera di tandatangani oleh Menetri LHK.
3. Penekanan bahwa Konsep pengelolaan KEE merupakan Pengelolaan yang Kolaboratif antar para pihak yang terkait tanpa merubah status kawasan yang sudah ada dalam setiap sosialisasi.
4. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Penting di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
5. Membuat pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Areal Tambang.
6. Sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kepada UPT KLHK, Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait dengan penentuan Taman Keanekaragam Hayati dan Karst.
7. Pemenuhan terhadap target IKK secara kumulatif dari tahun 2015 yang belum tercapai dengan merencanakan kembali target KEE dengan luasan yang dapat memenuhi target tahun selanjutnya.

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
**Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi dengan target 10 unit**

Hasil capaian kinerja tahun 2017 untuk IKK ini adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 42. Capaian IKK Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi dengan target 10 unit**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	%
Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi	Unit	10	35	150 (350)

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 41 Tahun 1999 (Pasal 17), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 44 Tahun 2004 (Pasal 28) dan PP Nomor: 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor: 3 Tahun 2008, KPH didefinisikan sebagai kesatuan wilayah hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien dan lestari. Salah satu bentuk KPH yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 ditetapkan 100 unit KPHK non taman nasional harus operasional. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.3/KSDAE/SET/ KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang memberikan arahan atau pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari. Strategi pencapaian IKK ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

1. Pengendalian/Dukungan Operasionalisasi KPHK; metode ini dititik-beratkan kepada tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi (Dit KK) dalam mengawal dan menjamin unit-unit KPHK Non TN agar dapat beroperasi dengan baik. Kegiatan ini meliputi :
  - a. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Operasionalisasi KPHK;
  - b. Penyusunan edaran Direktur Jenderal/Direktur terkait Operasionalisasi KPHK;
  - c. Bimbingan Teknis dan Supervisi;
  - d. Pembinaan dan Koordinasi; dan
  - e. Monitoring dan Evaluasi.
2. Pelaksanaan Operasionalisasi KPHK; metode ini dititik-beratkan pada kewajiban-kewajiban UPT dalam melaksanakan tahapan-tahapan operasionalisasi KPHK.

Operasionalisasi KPHK tahun 2015 diarahkan pada 12 lokasi KPHK Non Taman Nasional yang sudah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu

1. KPHK Rawa Singkil di Aceh,
2. KPHK Arau Hilir di Sumatera Barat,
3. KPHK Kerumutan di Riau,
4. KPHK Dangku Bentayan di Sumatera Selatan,
5. KPHK Guntur Papandayan di Jawa Barat,
6. KPHK Tambora di Nusa Tenggara Barat,
7. KPHK Ruteng di Nusa Tenggara Timur,
8. KPHK Gunung Melintang di Kalimantan Barat,
9. KPHK Towuti di Sulawesi Selatan,
10. KPHK Morowali di Sulawesi Tengah,
11. KPHK Nantu di Gorontalo, dan
12. KPHK Jayawijaya di Papua.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Namun dari 12 unit KPHK tersebut sebenarnya hanya 9 unit KPHK saja yang operasional di lapangan. Tiga KPHK yang belum operasional tahun 2015 adalah

1. KPHK Tambora karena berubah fungsi menjadi taman nasional,
2. KPHK Jayawijaya karena Balai Besar KSDA Papua akan merelokasi dengan unit KPHK yang lain dan
3. KPHK Morowali yang mengajukan untuk penambahan luas kawasan KPHK.

Untuk tahun 2016, KPHK yang operasional adalah 37 unit KPHK (sebagaimana terlampir). Sesuai dengan Juknis Operasionalisasi KPHK (Nomor: P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016), maka suatu unit KPHK dikatakan beroperasi setelah memenuhi persyaratan mutlak yaitu meliputi : 1) Wilayah KPHK; 2) Organisasi KPHK; 3) SDM; 4) Sarana dan Prasarana; dan 5) Ketersediaan Dana/Anggaran. Kesemua syarat mutlak dimaksud hanya dapat dipenuhi apabila KPHK Non Taman Nasional telah ditetapkan dengan SK Menteri KLHK.

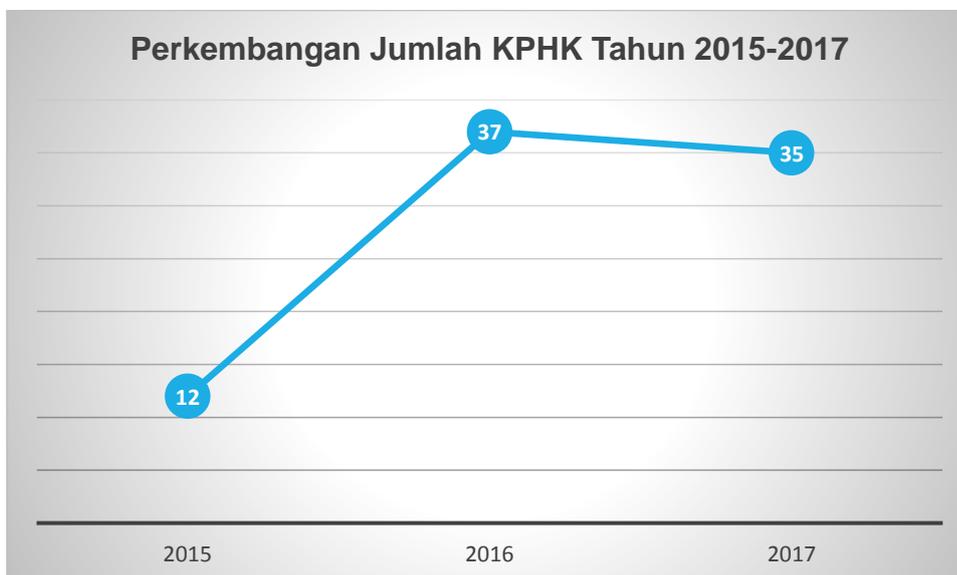
Sedangkan pada tahun 2017, terdapat 35 unit KPHK non taman nasional yang operasional di lapangan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 43. Daftar KPHK Operasional Tahun 2017**

No.	Nama Unit KPHK	SK KPHK	UPT Pengelola
1.	Morowali	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	BKSDA Sulawesi Tengah
2.	Bakiriang	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	BKSDA Sulawesi Tengah
3.	Bukit Rimbang Bukit Baling	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	BBKSDA Riau
4.	Bukit Kaba	SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	BKSDA Bengkulu
5.	Muara Kaman Sedulang	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	BKSDA Kalimantan Timur
6.	Gunung Sahuwai	SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	BKSDA Maluku
7.	Taliabu	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	BKSDA Maluku
8.	Kepulauan Krakatau	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	BKSDA Lampung
9.	Durian Luncuk	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	BKSDA Jambi
10.	Hutan Bakau Pantai Timur	SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	BKSDA Jambi
11.	Moyo	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	BKSDA Nusa Tenggara Barat
12.	Gunung Tunak	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	BKSDA Nusa Tenggara Barat
13.	Karang Gading-Langkat Timur Laut	SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Sumatera Utara
14.	Sibolangit	SK.411/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Sumatera Utara
15.	Sipiriok	SK.412/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Sumatera Utara
16.	Dolak Tinggi Raja	SK.413/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Sumatera Utara
17.	Dolak Surungan	SK.414/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Sumatera Utara
18.	Holiday Resort	SK.415/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Sumatera Utara
19.	Pulau Pini	SK.416/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Sumatera Utara
20.	Sijaba Hutaginjang	SK.417/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Sumatera Utara
21.	Semongkat	SK.418/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BKSDA Nusa Tenggara Barat
22.	Taliwang	SK.419/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BKSDA Nusa Tenggara Barat
23.	Suranadi	SK.420/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BKSDA Nusa Tenggara Barat
24.	Sangiang	SK.421/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BKSDA Nusa Tenggara Barat
25.	Tuti Adegae	SK.422/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
26.	Ndeta Kilikima	SK.423/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
27.	Wae Wuul	SK.424/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
28.	Teluk Maumere	SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
29.	Riuang	SK.426/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
30.	Kateri	SK.427/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
31.	Camplong	SK.428/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
32.	Ale Aisio	SK.429/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
33.	Watu Ata	SK.430/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
34.	Teluk Kupang	SK.431/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Nusa Tenggara Timur
35.	Nabire-Tanjung Wiay	SK.432/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	BBKSDA Papua

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan demikian, Capaian IKK Operasionalisasi KPHK Non Taman Nasional tahun 2017 adalah 35 Unit KPHK atau dari target 20 Unit KPHK Non Taman Nasional. Adapun output kegiatannya difokuskan untuk Penyusunan Draft Penilaian Operasional KPHK, Bimbingan Teknis dan Supervisi, Sosialisasi Juknis, Pembangunan Basis Data, serta Penyiapan SDM dan Sarpras pada 35 Unit KPHK Non Taman Nasional di atas.



**Gambar 50. Perkembangan Jumlah KPHK Tahun 2015-2017**

Berdasarkan grafik di atas, dapat diinterpretasikan bahwa KPHK yang sudah beroperasi tahun 2015 adalah 12 unit KPHK. Namun dari 12 KPHK yang sudah ditetapkan tahun 2013 ada 3 KPHK yang memiliki catatan tersendiri yaitu KPHK Tambora berubah fungsi menjadi taman nasional, KPHK Jayawijaya oleh Balai Besar KSDA Papua akan digantikan dengan KPHK yang lain, dan KPHK Morowali oleh Balai Besar KSDA Sulsel memasukan CA Tanjung Api dan TWAL Pulau Tokobae sebagai KPHK. Sedangkan 8 unit KPHK yang seharusnya masuk dalam target 2015 baru ditetapkan sebagai KPHK oleh Menteri LHK pada 17 Juni 2016.

Capaian kinerja untuk tahun 2016, KPHK yang sudah operasional adalah 37 Unit KPHK. Jika dibandingkan dengan target Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019, KPHK yang sudah beroperasi sampai dengan tahun 2016 adalah 46 unit KPHK.

Sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2017, KPHK yang operasional adalah sebanyak 35 unit. Sehingga sampai dengan tahun 2017 (2015-2017), sudah ada 81 unit KPHK non taman nasional yang sudah ditetapkan Menteri LHK dan operasional, artinya jika dibandingkan dengan target lima tahun pada Renstra KSDAE 2015-2019 (100 unit KPHK), capaian kinerja untuk IKK ini adalah 81 unit KPHK non taman nasional atau 81% dari 100 unit yang ditarget dalam 5 tahun.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 51. Gerbang Masuk dan Pos Jaga di TWA Gunung Tunak**



**Gambar 52. Pembangunan Gedung Serbaguna**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja, antara lain:

1. Operasionalisasi KPHK sangat tergantung dengan apakah unit KPHK tersebut sudah mendapatkan penetapan oleh Menteri LHK. Proses ini adalah kewenangan Ditjen PKTL yang mengusulkan ke Menteri LHK.
2. Pentingnya pengumpulan data dan informasi fakta yang ada di lapangan terkait dengan operasional KPHK. Alokasi anggaran, SDM (PNS dan Tenaga kontrak) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sarpras lapangan yang mendukung operasional KPHK.

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
**Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat dengan target 20.000 Ha**

Capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 44. Capaian IKK Luas Kawasan Hutan Konservasi Pada Zona Tradisional Yang Dikelola Melalui Kemitraan Dengan Masyarakat Dengan Target 20.000 Ha**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Luas Kawasan Hutan Konservasi Pada Zona Tradisional Yang Dikelola Melalui Kemitraan Dengan Masyarakat Dengan Target 20.000 Ha</b>	Ha	20.000	25.671,22	128,36

IKK luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 ha merupakan salah satu upaya pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan nilai manfaat kawasan konservasi dengan tetap memperhatikan sisi ekologis, ekonomi dan sosial. Pengelolaan yang diharapkan dengan adanya akses masyarakat melalui kemitraan di zona tradisional adalah adanya peran masyarakat sekitar kawasan dalam mendukung pengelolaan kawasan sekaligus mendapatkan manfaat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Pemberian akses melalui kemitraan pemanfaatan zona tradisional merupakan amanat dari PP No.28 Tahun 2011 jo PP No.108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA, P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menhut No. P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA

Hingga bulan Desember 2017, realisasi pemanfaatan zona tradisional melalui kemitraan tersebut telah mencapai 66.053,22 Ha (66,05% dari target 100.000 Ha) yang tersebar di 15 Taman Nasional (rekapitulasi data terlampir). Pemberian akses pemanfaatan zona tradisional kepada masyarakat secara keseluruhan tertuang dalam 41 Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani antara ketua kelompok atau ketua asosiasi kelompok masyarakat dengan Kepala Balai Taman Nasional. Melalui kerjasama pemberian akses tersebut, hingga saat ini kawasan konservasi telah berkontribusi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebanyak ± 4.812 KK yang tersebar di 64 desa sekitar 15 Taman Nasional.

Berdasarkan kriteria dan indikator sesuai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tanggal 18 Desember 2015, tahapan kegiatan dalam rangka pencapaian IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 45. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Zona Tradisional Melalui Kemitraan**

No	Komponen	Sub komponen	Output
1.	Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional	Identifikasi SDA di Zona Tradisional, serta identifikasi kondisi calon masyarakat pemanfaat (mitra) di zona tradisional. (Dilakukan oleh UPT)	Hasil analisis terhadap zona-zona tradisional di masing-masing kawasan konservasi yang telah ditetapkan zonasinya/blok pengelolaannya.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Komponen	Sub komponen	Output
2.	Penetapan Lokasi Target	Penetapan lokasi zona tradisional yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kemitraan	Luas 100 Ribu zona pemanfaatan tradisional telah dipilih dan ditetapkan untuk kemudian menjadi target kerjasama.
3.	Penyusunan NSPK	Penyusunan/ Penyempurnaan draft NSPK terkait Tata Cara Kemitraan Konservasi di KSA KPA	Peraturan setingkat Dirjen terkait Juknis kerjasama pemanfaatan zona tradisional (Peraturan Dirjen KSDAE tentang Tata Cara Kemitraan Konservasi di KSA KPA)
4.	Bimtek dan Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional	Bimtek pelaksanaan Kemitraan dengan masyarakat di Zona Tradisional kepada UPT; Pertemuan koordinasi, workshop Pembahasan masalah terkait Kemitraan dengan masyarakat di Zona Tradisional	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan workshop terkait kemitraan di kawasan konservasi
5.	Pengembangan Kemitraan / MoU	Pengembangan kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan	Membangun dan mengembangkan kemitraan dalam pemanfaatan zona tradisional yang tertuang dalam PKS
6.	Peningkatan Kualitas Hasil Usaha di Zona Tradisional	Pembinaan pelaksanaan Kemitraan dengan masyarakat di Zona Tradisional, Penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya kualitas hasil usaha masyarakat yang melakukan kegiatan/kerjasama di zona tradisional
7.	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi	Monitoring, Evaluasi dan supervisi pelaksanaan Kemitraan dengan masyarakat di Zona Tradisional	Laporan hasil monev

Berdasarkan tata waktu pencapaian IKK tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 46. Rencana Pelaksanaan IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat dengan target 20.000 Ha**

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional	Pusat dan UPT BTN					
2	Penetapan Lokasi Target	Pusat dan UPT BTN					
3	Penyusunan NSPK	Pusat					
4	Bimtek dan Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional	Pusat dan UPT BTN					
5	Pengembangan Kemitraan / MoU	UPT BTN					
6	Peningkatan Kualitas Hasil Usaha di Zona Tradisional	UPT BTN					
7	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi	Pusat dan UPT BKSDA / BTN					

Capaian kinerja sampai tahun 2017 IKK Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha adalah 110,09% (66.053,61 Ha dari target 60.000 Ha) dan telah melebihi target capaian. Kegiatan pemanfaatan pada umumnya adalah pemanfaatan HHBK (madu hutan, rotan/kelukup/jernang, getah damar, tanaman obat, bambu), pemanfaatan sumberdaya perairan, dan jasa wisata.

Berdasarkan lokasi sasaran terdapat 39 UPT yang menjadi target meningkatnya luas kawasan konservasi di zona tradisional melalui kemitraan selama 5 tahun (2015-2019). Terdapat 13 UPT TN yang telah melakukan kerjasama kemitraan dengan kelompok masyarakat di zona tradisional pada tahun 2017, yaitu :

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. TN Betung Kerihun Danau Sentarum
2. TN Ujung Kulon
3. TN Merbabu
4. TN Bukit Baka Bukit Raya
5. TN Matalawa
6. TN Bukit Barisan Selatan
7. TN Gunung Palung
8. TN Bukit Tiga Puluh
9. TN Wakatobi
10. TN Karimunjawa
11. TN Bunaken
12. TN Takabonerate
13. TN Kepulauan Seribu

Terdapat 5 TN Perairan dari 13 UPT yang telah melakukan kerjasama kemitraan di zona tradisional, yang dalam pelaksanaannya didukung dan difasilitasi oleh RARE Indonesia. Kemitraan di TN Perairan tersebut tertuang dalam program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).



**Gambar 53. Kelompok PAAP di TN Takabonerate**

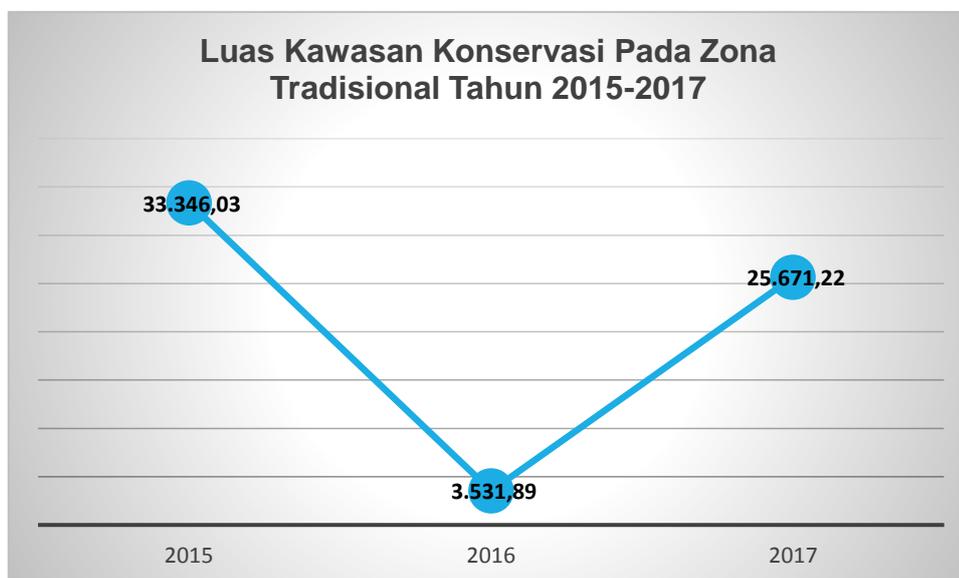
Sampai akhir tahun 2017, terdapat 1 lokasi (TN Kepulauan Seribu) yang PKS nya sedang dalam proses penandatanganan antara Kepala Balai TN Kepulauan Seribu dengan wakil kelompok masyarakat. Adapun substansi PKSnya telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal KSDAE melalui suratnya Nomor: S.341/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2017 tanggal 28 Desember 2017.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 54. Penandatanganan PKS dan Lokasi PAAP di TNKJ (doc. BTNKJ)**

Capaian kinerja IKK Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2016). Capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 128,36% yang artinya luas kawasan yang dapat diakses melalui perjanjian kerjasama pada zona tradisional sebesar 25.671,22 Ha dari target 20.000 Ha. Capaian kinerja secara kumulatif (2015-2017) luas zona tradisional yang sudah dimanfaatkan masyarakat melalui pola kemitraan sudah melebihi target, yaitu seluas 62.549,14 Ha atau 104,25% dari target (2015-2017) 60.000 Ha. Perkembangan luas kawasan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat disampaikan dalam gambar berikut.



**Gambar 55. Perkembangan luas kawasan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat tahun 2015-2017**

Dari grafik tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2016 adalah 3.531,89 Ha atau 11,77% sesuai target 30.000 ha pada RENSTRA 2015-2019. Namun jika dibandingkan dengan target sesuai Revisi PK Direktorat KK tahun 2016, capaian kinerja mencapai 35,32% dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dari tahun 2015 dan 2016, maka capaian kinerja mencapai 10,96% atau melebihi target yang ditetapkan sesuai RENSTRA 2015-2019. Kurang maksimalnya capaian kinerja untuk IKK ini adalah karena

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

banyak UPT yang baru mengalokasikan pendanaan pada tahun 2017, sehingga target untuk tahun 2016 yaitu 40.000 ha hanya tercapai 3.531,89 ha.

Untuk capaian kinerja tahun 2017, luas zona pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh masyarakat melalui PKS adalah 25.671,13 ha atau 128,36 ha dari target 20.000 ha (tahun 2017), pada 14 Balai Besar/Balai Taman Nasional, tertuang dalam 38 PKS antara ketua kelompok/ketua asosiasi kelompok masyarakat dengan Kepala Balai Taman Nasional. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat ( $\pm$  4.812 Kepala Keluarga) yang tersebar di 62 desa sekitar 15 Taman Nasional. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan target sesuai PK Direktorat KK tahun 2017 sudah melampaui target sebesar 128,36%. Sedangkan capaian kinerja sampai dengan tahun ini (2015 s.d. 2017) adalah seluas 66.053,62 ha atau 66,05% dari target 5 tahun (100.000 ha). Jika memperhatikan trend capaian kinerja, maka target 100.000 ha pada tahun kelima RENSTRA akan tercapai.

Pencapaian IKK ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi UPT dan mitra untuk mendukung IKK tersebut melalui berbagai kegiatan untuk memfasilitasi kemitraan di zona tradisional. Sebagai salah satu contoh TN Bukit Tiga Puluh melakukan ekspose Role Model Pengelolaan Zona Tradisional dengan Masyarakat Suku Talang Mamak pada 2017 dengan usaha yang akan dikembangkan adalah budidaya kelukup. Begitu pula yang dilakukan TNBKDS dengan usaha madu yang telah semakin berkembang dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Produksi madu hutan dari TNBKDS oleh masyarakat periau (kelompok petani madu) Asosiasi Periau Muara Belitung (APMB) dan Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) dikelola secara lestari dengan sistem organik. Pemanfaatan madu di TNBKDS dilakukan oleh musim panen madu di TNBKDS adalah bulan September hingga bulan Februari setiap tahunnya



**Gambar 56. Madu produksi BTNBKDS (kiri) dan Ekspose Role Model Pengelolaan Zona Tradisional di TN Bukit Tiga Puluh (kanan)**

Selain itu mitra yang turut mendukung upaya pencapaian IKK pemanfaatan zona tradisional melalui akses kemitraan ini dilakukan oleh RARE yang fokus pada 5 TN perairan yaitu: TN Karimunjawa, TN Kepulauan Seribu, TN Bunaken, TN Wakatobi, dan TN Takabonerate. Pemanfaatan yang dilakukan umumnya adalah pemanfaatan sumberdaya perairan. Kerjasama kemitraan di zona tradisional TN perairan tersebut telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian IKK sebesar 12.402,34 ha pada tahun 2017.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perdirjen KSDAE tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan konservasi di KSA dan KPA belum ditandatangani oleh Dirjen KSDAE dan masih dalam proses pembahasan final, terkait pengayaan materi kawasan konservasi masyarakat adat.
2. Beberapa UPT masih dalam proses penyusunan dan revisi zonasi sehingga belum dapat memfasilitasi kerjasama kemitraan di zona tradisional.
3. Terdapat pemanfaatan yang dilakukan tidak sesuai dengan zonanya, sehingga perlu dilakukan review zonasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan Luas Kawasan Hutan Konservasi pada Zona Tradisional yang Dikelola Melalui Kemitraan dengan Masyarakat seluas 100.000 Ha ada beberapa saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Draft “Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Pemberian Akses Dalam Pemanfaatan Zona atau Blok Tradisional di Kawasan Pelestarian Alam” perlu segera ditetapkan untuk menjadi semacam Petunjuk Teknis bagi pelaksanaan kegiatan di UPT. Hal tersebut akan memperlancar kegiatan di lapangan.
2. Perlu adanya Fasilitator yang mampu melaksanakan kegiatan di lapangan.

Kegiatan pendukung IKK luas akses zona tradisional melalui kemitraan pada tahun 2017 adalah:

### 1. Sinkronisasi/koordinasi pemanfaatan zona tradisional

(termasuk didalamnya sinkronisasi dan koordinasi terkait penyusunan/penyempurnaan NSPK Perdirjen KSDAE tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kemitraan Konservasi di KSA KPA).

Salah satu kegiatan prioritas yang dilakukan pada tahun 2017 adalah pembahasan Perdirjen tentang tata cara kemitraan konservasi yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dan pedoman bagi pengelola kawasan dalam mengelola kemitraan di zona tradisional di kawasan konservasi. Pembahasan draft perdirjen ini telah melalui berbagai metode yaitu pembahasan dan mendapat masukan dari lingkup Eselon II KemenLHK, pembahasan bersama mitra (RARE, FKKM, BRWA). Adapun ruang lingkup dari perdirjen ini antara lain memfasilitasi akses kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemulihan ekosistem, kemitraan dalam rangka pengembangan desa konservasi dan kemitraan dalam rangka mengakomodasi pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Perkembangan draft perdirjen KSDAE ini telah dalam proses pembahasan final dan diharapkan dapat segera disahkan sebagai pedoman bagi pengelola kawasan (UPT).

### 2. Supervisi pelaksanaan pemanfaatan zona tradisional

Kegiatan supervisi pemanfaatan zona tradisional tahun 2017 dilakukan di 9 UPT yaitu:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. TN Bromo Tengger Semeru  | 6. TN Alas Purwo          |
| 2. TN Gunung Palung         | 7. TN Baluran             |
| 3. TN Kayan Mentarang       | 8. TN Gunung Leuser       |
| 4. TN Bukit Barisan Selatan | 9. TN Rawa Aopa Watumohai |
| 5. TN Gunung Halimun Salak  |                           |

Secara umum sudah ada pemanfaatan oleh masyarakat di zona tradisional di beberapa UPT yang belum diwadahi perjanjian kerjasama dalam rangka penguatan pengelolaan kawasan konservasi. Sampai tahun 2017 terdapat 3 (tiga) UPT yang telah memfasilitasi dengan perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat antara lain: TN Gunung Palung,

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

TN Bukit Barisan Selatan, dan TN Gunung Halimun Salak dengan beberapa pemanfaatan HHBK antara lain penyadapan getah pinus, rotan, bambu, pandan, dan pemungutan getah damar mata kucing.

Beberapa kendala atau permasalahan dalam mendukung kemitraan bersama masyarakat ini antara lain:

1. Peruntukan zona yang kurang sesuai dengan pemanfaatan yang dilakukan, sehingga perlu dilakukan evaluasi zona tradisional di kawasan tersebut melalui proses review zonasi.
2. Beberapa UPT masih dalam proses penyusunan dan revisi zonasi sehingga belum dapat memfasilitasi kerjasama kemitraan di zona tradisional
3. Terbatasnya penyuluh/PEH dalam pendampingan ke masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan Direktorat KK untuk dapat mencapai target pemberian akses kepada masyarakat pada zona pemanfaatan seluas 100.000 ha pada tahun 2019, perlu dilakukan:

1. Mendorong proses pengesahan Perdirjen KSDAE tentang Tata Cara kemitraan konservasi di KSA dan KPA agar dapat segera diterbitkan sebagai acuan UPT dalam pengelolaan zona tradisional.
2. Melakukan supervisi pengelolaan zona tradisional di UPT untuk menjamin keberlanjutan program dan pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan.
3. Melakukan monitoring perkembangan pengelolaan zona tradisional di UPT secara berkala untuk mengetahui hasil dan manfaat dari program tersebut.

### **3. Workshop Pemberian Akses Dalam Pemanfaatan Zona dan Blok Tradisional di Kawasan Pelestarian Alam**

Workshop Pemberian Akses dalam Pemanfaatan Zona dan Blok Tradisional di Kawasan Pelestarian Alam dimaksudkan sebagai sarana konsultasi publik dalam rangka penyempurnaan materi dan substansi draft Perdirjen KSDAE tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kemitraan Konservasi di KSA dan KPA. Penyelenggaraan workshop dilaksanakan di Sahira Butik Hotel, Jl. Paledang Nomor 53 Bogor pada tanggal 25-27 Oktober 2017. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal KSDAE yang diwakili oleh Direktur Kawasan Konservasi, dihadiri oleh 81 orang peserta, yang mewakili unsur pemerintah (Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Kepala Subdit lingkup Direktorat KK, UPT lingkup Ditjen KSDAE (Balai Taman Nasional dan Balai KSDA), UPTD Tahura, Bappeda, perguruan tinggi, LSM/Mitra kerja Ditjen KSDAE (RARE, ZSL, FKKM, WWF).

Berikut adalah kegiatan yang dilakukan pada workshop tersebut:

1. Arahan Direktur Kawasan Konservasi; mewakili Dirjen KSDAE
2. Pemaparan materi pokok (draft Perdirjen KSDAE tentang Petunjuk Teknis kemitraan Konservasi di KSA dan KPA) dari Kepala Bagian HKT, Setditjen KSDAE
3. Pembahasan materi pokok dari
  - a) DR. Rinekso Soekmadi, perwakilan dari perguruan tinggi (Fahutan IPB)
  - b) Taufiq Alimi, perwakilan dari LSM (RARE)
  - c) Junaedi, S.Hut, M.Si, perwakilan dari UPT (Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum)
4. Tanggapan dan saran peserta terhadap materi pokok dalam diskusi pleno

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

5. Paparan materi tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Zona/Blok tradisional: menggali cara baru pengelolaan zona tradisional untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan oleh Prof. Damayanti Buchori, perwakilan LSM (ZSL)
6. Tanggapan dan saran/masukan seluruh peserta dalam diskusi kelompok terfokus (FGD)



**Gambar 57. Workshop pemberian akses dalam pemanfaatan zona/blok tradisional di KPA**

Beberapa masukan hasil workshop terhadap draft perdirjen tata cara kemitraan konservasi tersebut antara lain:

1. Prinsip-prinsip pemanfaatan di kawasan konservasi harus ada pembedanya, antara lain kelestarian, kehati-hatian dan keadilan. Perlu adanya monitoring data potensi yang sudah dipanen/dimanfaatkan untuk menjamin kelestariannya.
2. Kemitraan konservasi dilakukan dalam rangka mendukung penguatan fungsi KSA dan KPA dan dalam rangka mengatasi permasalahan kawasan konservasi.
3. Dalam naskah kontrak (PKS), perlu pendetailan aspek terkait kemanfaatan, kompensasi, kewajiban mitra yang diarahkan untuk mendukung kepentingan konservasi atau penguatan pengelolaan kawasan
4. Fasilitasi dan Pendampingan tidak hanya LSM, tetapi juga dapat dimungkinkan oleh perguruan tinggi
5. Kriteria masyarakat (sebagai mitra) adalah masyarakat setempat yang memiliki akses terhadap kawasan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat domisili atau surat keterangan lainnya, dan diverifikasi oleh Kepala Unit pengelola kawasan.
6. Perlu adanya inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi di zona tradisional
7. Serta masukan yang bersifat khusus dalam pendetailan substansi maupun sistematika ruang lingkup dan pembahasan dalam draft perdirjen tersebut.

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
**Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK**

Hasil capaian kinerja tahun 2017 untuk IKK ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 47. Capaian IKK Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK**

IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK	Unit KK	551	552	100,18

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi. Pada tahun 2017, pada dokumen PK Direktur Jenderal KSDAE terdapat indikator kinerja Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK, dan terealisasi 552 unit KK (100,18%). Daftar 552 kawasan konservasi disampaikan dalam Lampiran 5.

Sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Renstra Ditjen KSDAE dan diturunkan dalam Renstra Direktorat KK periode tahun 2015-2019 dan masing-masing UPT. Sebelum penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan kementerian Kehutanan, fungsi Pengendalian kebakaran hutan pada kawasan konservasi berada pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Khusus untuk bidang tenaga dan sarana prasarana Pengendalian kebakaran hutan diselenggarakan oleh Sub Direktorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dengan fungsi yaitu:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan.

Setelah penggabungan menjadi Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian LHK menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, dimana fungsi penyelenggaraan bidang tenaga kerja dan sarana prasarana berada pada Sub Direktorat Tenaga dan Sarana Prasarana, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Namun dalam rangka optimalisasi pengendalian kebakaran hutan dalam kawasan konservasi di tingkat tapak atau tingkat kesatuan pengelolaan hutan, diperlukan dukungan penyediaan sarana prasarana pendukung pengendalian kebakaran hutan. Hal ini didukung beberapa peraturan diantaranya yaitu:

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, pasal 23 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa dalam rangka pencegahan kebakaran hutan pada tingkat KPHK dilakukan kegiatan diantaranya mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan.
2. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 51 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap KPHK wajib menyiapkan sarpras untuk menunjang Brigdalkarhutla.
3. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tentang Petunjuk teknis Operasional KPHK dalam lampirannya dijelaskan bahwa salah satu fungsi KPHK adalah pelaksanaan kegiatan Pengendalian kebakaran hutan konservasi.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi merupakan tanggung jawab Ditjen KSDAE yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT Ditjen KSDAE. Direktur KK berfungsi dan berperan sebagai pembina/supervisor, dan pengendali (pemantauan dan evaluasi) kegiatan perlindungan dan pengamanan tersebut. Strategi pencapaian IKK ini adalah :

1. *Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan* : adalah kegiatan yang bersifat pre-emptif, dan preventif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi yang antara lain meliputi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholder terkait, patroli rutin perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, patroli insidental/mendadak, pemeliharaan batas kawasan konservasi, dll.
2. *Kegiatan Pengendalian Kebakaran* : kegiatan ini meliputi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan, dan penanganan pasca kebakaran hutan. Kegiatan dalam pengendalian kebakaran hutan pada kawasan konservasi antara lain meliputi : kampanye/penyuluhan/sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini kebakaran hutan konservasi, deteksi dan peringatan dini kebakaran hutan konservasi, pengembangan peta resiko/kerawanan kebakaran hutan, pembentukan dan peningkatan kapasitas MPA, patroli pengendalian kebakaran (hotspot, dll), pemadaman kebakaran hutan konservasi, identifikasi dan inventarisasi areal bekas kebakaran (*burnt areas*), rehabilitasi areal bekas kebakaran.

Berdasarkan hasil pencermatan data citra satelit Landsat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, diketahui bahwa luasan kebakaran hutan di kawasan konservasi tahun 2015 adalah sebesar  $\pm$  419.893,18 Ha yang tersebar di 79 unit kawasan konservasi pada 27 UPT Taman Nasional dan 19 UPT KSDA. Berdasarkan pencermatan diketahui bahwa kebakaran terluas terjadi di Provinsi Papua sebesar 132.177,69 Ha, sedangkan luas kebakaran terkecil terjadi di Provinsi Aceh sebesar 3,45 Ha. Selain itu, Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas kejadian kebakaran di kawasan konservasi lebih dari 10.000 Ha.

Terhadap data kebakaran hutan di kawasan konservasi hasil pencermatan Direktorat Jenderal PKTL tersebut di atas, sebanyak 19 UPT Taman Nasional dan 8 UPT KSDA telah melakukan verifikasi lapangan (ground check) untuk memastikan luasan dan lokasi kejadian kebakaran. Hasil verifikasi kejadian kebakaran di kawasan konservasi tersebut sebagaimana tabel berikut.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 48. Luas Kebakaran Kawasan Konservasi Tahun 2015**

No	Provinsi/UPT	UPT	Luas Kebakaran (ha)	
			Data Citra*	Data Verifikasi
1	Provinsi NAD	BKSDA Aceh	3.5	3.5
2	Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	BKSDA Riau	5,066.8	
		BTN Tesso Nilo	13,688.1	
		BTN Bukit Tiga Puluh	55.7	
3	Provinsi Jambi	BKSDA Jambi	72.1	
		BTN Berbak	16,221.3	8,127.2
		BTN Bukit Duabelas	118.2	
		THR Sultan Thaha Syaifuddin	1,040.8	
		BBTN Kerinci Seblat		92.5
4	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	BKSDA Sumatera Selatan	68,495.0	63,456.9
		BBTN Kerinci Seblat		27.0
		BTN Sembilang	8,177.4	
5	Provinsi Bengkulu & Lampung	BKSDA Bengkulu	48.2	
		BBTN Bukit Barisan Selatan	59.2	569.0
		BTN Way Kambas	41,820.9	
6	Provinsi Jawa Barat	BKSDA Jawa Barat	1,010.9	
		BTN Gunung Ciremai	879.4	665.9
7	Provinsi Jawa Tengah	BTN Gunung Merbabu	778.4	
8	Provinsi DI Yogyakarta	BTN Gunung Merapi	4.0	282.1
9	Provinsi Jawa Timur	BKSDA Jawa Timur	107.7	67.7
		BTN Bromo Tengger Semeru	166.5	
		BTN Baluran	342.4	820.0
		Tahura Raden Suryo	962.6	
10	Provinsi NTB	BKSDA NTB	212.7	
		BTN Gunung Rinjani	919.7	
11	Provinsi NTT	BKSDA NTT	15.7	19.4
		BTN Laewangi Wanggameti	164.5	433.4
		BTN Manupeu Tanahdaru	2,386.8	
12	Provinsi Kalimantan Barat	BKSDA Kalimantan Barat	6,888.1	5,394.5
		BTN Gunung Palung	832.5	
		BTN Bukit Baka Bukit Raya	2.6	
13	Provinsi Kalimantan Tengah	BKSDA Kalimantan Tengah	21,856.7	
		BTN Tanjung Putting	23,270.8	
		BTN Sebangau	47,243.6	
14	Provinsi Kalimantan Selatan	BKSDA Kalimantan Selatan	366.9	
		Tahura Sultan Adam	4,467.9	
15	Provinsi Kalimantan Timur	BKSDA Kalimantan Timur	5,831.6	
		BTN Kutai	112.1	
		Tahura Bukit Suharto	342.8	
		Tahura Lati Petangis	1,123.2	
16	Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	BTN Bogani Nani Wartabone	11.5	
17	Provinsi Sulawesi Tengah	BKSDA Sulawesi Tengah	2,341.6	
		BTN Lore Lindu	262.6	225.5
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	BKSDA Sulawesi Tenggara	11.2	
		BTN Rawa Aopa Watumohai	8,872.0	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Provinsi/UPT	UPT	Luas Kebakaran (ha)	
			Data Citra*	Data Verifikasi
19	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	BKSDA Sulawesi Selatan	782.5	
20	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara	BKSDA Maluku	158.6	
		BTN Manusela	115.5	394.5
21	Provinsi Papua	BKSDA Papua	124,613.5	
		BTN Wasur	5,851.0	
		BTN Lorenz	1,713.3	
<b>LUAS TOTAL</b>			<b>19,890.1</b>	<b>80,579.0</b>
*	<i>Hasil analisis citra satelit Direktorat Jenderal PKTL</i>			

Kebakaran yang terjadi merupakan rambatan dari kebakaran yang terjadi di luar kawasan konservasi, terjadi pada lokasi yang berbatasan/ berdekatan dengan areal masyarakat, serta terjadi pada areal yang didominasi oleh alang-alang dan semak belukar. Sebagian besar kejadian kebakaran merupakan kebakaran permukaan bukan merupakan kebakaran bawah (*ground fire*) ataupun kebakaran kanopi pohon. Selain itu, pada kawasan bergambut juga dipicu oleh penurunan tinggi muka air akibat kanalisasi areal gambut.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh UPT menindaklanjuti kebakaran yang terjadi antara lain dengan melakukan pemadaman dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat, meningkatkan kegiatan patroli, serta meningkatkan penyuluhan terkait kebakaran kepada masyarakat.

Sedangkan tahun 2016, berdasarkan analisa citra satelit yang dilakukan Direktorat Jenderal PKTL dan pengecekan lapangan oleh Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen PPI, pada tahun 2016 terjadi kebakaran hutan di dalam kawasan konservasi seluas 138.391,57 ha yang terjadi pada 17 UPT Lingkup Dijen KSDAE dan 2 UPTD TAHURA. Kejadian beberapa kebakaran besar pada SM Pulau Dolok (BB KSDA Papua) seluas 102.528,22 ha, TN Wasur seluas 12.258,60 ha dan CA Muara Kaman Sedulang (BKSDA Kalimantan Timur) seluas 8.829,69 ha. Sedangkan beberapa kebakaran kecil terjadi pada TN Rawa Aopa Watumohai seluas 3,37 ha dan SM Pulau Komolon (BBKSDA Papua). Luasan detail kebakaran dalam kawasan konservasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 49. Luas Kebakaran Kawasan Konservasi Tahun 2016**

No	UPT/Kawasan Konservasi	Luas Kebakaran (Ha) *)
<b>1</b>	<b>Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua</b>	<b>102,624.20</b>
	CA Pegunungan Cycloops	67.45
	SM Memberamo Foja	21.05
	SM Pulau Dolok	102,528.22
	SM Pulau Komolon	7.48
<b>2</b>	<b>Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau</b>	<b>3,995.40</b>
	SM Bukit Rimbang Bukit Baling	58.93
	SM Giam Siak Kecil	808.97
	SM Kerumutan	322.06
	TN Zamrud	373.42
	TWA Sungai Dumai	2,432.02
<b>3</b>	<b>Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara</b>	<b>163.38</b>
	SM Dolok Surungan	163.38

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	UPT/Kawasan Konservasi	Luas Kebakaran (Ha) *)
<b>4</b>	<b>Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu</b>	<b>172.42</b>
	TN Lore Lindu	172.42
<b>5</b>	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh</b>	<b>1,582.37</b>
	CA Janthoi	163.68
	SM Rawa Singkil	292.64
	TB Lingga Isaq	1,026.40
	TWA Janthoi	99.66
<b>6</b>	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat</b>	<b>1,123.63</b>
	TWA Gunung Melintang	1,123.63
<b>7</b>	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur</b>	<b>8,829.69</b>
	CA Muara Kaman Sedulang	8,829.69
<b>8</b>	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara</b>	<b>271.03</b>
	SM Nantu	271.03
<b>9</b>	<b>Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh</b>	<b>1,250.25</b>
	TN Bukit Tiga Puluh	1,250.25
<b>10</b>	<b>Balai Taman Nasional Kepulauan Togean</b>	<b>28.60</b>
	TN Kepulauan Togean	28.60
<b>11</b>	<b>Balai Taman Nasional Kutai</b>	<b>565.73</b>
	TN Kutai	565.73
<b>12</b>	<b>Balai Taman Nasional Lorentz</b>	<b>86.74</b>
	TN Lorentz	86.74
<b>13</b>	<b>Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti</b>	<b>508.39</b>
	TN Laiwangi Wanggameti	265.41
	TN Manupeu Tanah Daru	242.98
<b>14</b>	<b>Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai</b>	<b>3.37</b>
	TN Rawa Aopa Watumohai	3.37
<b>15</b>	<b>Balai Taman Nasional Tesso Nilo</b>	<b>538.43</b>
	TN Tesso Nilo	538.43
<b>16</b>	<b>Balai Taman Nasional Wasur</b>	<b>12,258.60</b>
	TN Wasur	12,258.60
<b>17</b>	<b>Balai Taman Nasional Way Kambas</b>	<b>2,021.02</b>
	TN Way Kambas	2,021.02
<b>18</b>	<b>Pemerintah Daerah Provinsi Jambi</b>	<b>2,285.58</b>
	Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	2,285.58
<b>19</b>	<b>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>82.74</b>
	Tahura Bukit Soeharto	82.74
	<b>Grand Total</b>	<b>138,391.57</b>
*)	Luas area kebakaran hasil analisis citra satelit tahun 2016 hasil perhitungan Ditjen PKTL dan Dit PKHL (Ditjen PPI)	

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh UPT menindaklanjuti kebakaran yang terjadi antara lain dengan melakukan pemadaman dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat, meningkatkan kegiatan patroli, serta meningkatkan penyuluhan terkait kebakaran kepada masyarakat.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sedangkan untuk tahun 2017, berdasarkan analisa citra satelit yang dilakukan Direktorat Jenderal PKTL dan pengecekan lapangan oleh Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen PPI, pada tahun 2017 terjadi kebakaran hutan di dalam kawasan konservasi seluas 35.694 Ha. Kebakaran tersebut terjadi pada 20 UPT Lingkup Ditjen KSDAE dan 1 UPTD TAHURA. Kejadian kebakaran terbesar terjadi pada TN Tambora seluas 20.523,62 ha, TN Way Kambas seluas 5.133,13 Ha dan SM Pulau Dolok (BKSDA Papua) seluas 4.736,49 Ha. Sedangkan kejadian kebakaran kecil terjadi pada TN Gunung Leuser seluas 4,47 Ha, TN Tanjung Putting seluas 5,46 ha dan SM Rawa Singkil (BKSDA Aceh) seluas 6,88 ha. Luasan detail kebakaran dalam kawasan konservasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 50. Luas Kebakaran Kawasan Konservasi Tahun 2017**

No.	UPT/Kawasan Konservasi	Luas Kebakaran (ha) *)
1	<b>Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur</b>	<b>160.06</b>
	TWA Tuti Adagae	160.06
2	<b>Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua</b>	<b>4,858.64</b>
	CA Enarotali	112.23
	SM Pegunungan Jayawijaya	9.92
	SM Pulau Dolok	4,736.49
3	<b>Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan</b>	<b>21.45</b>
	TN Gandang Dewata	21.45
4	<b>Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum</b>	<b>25.88</b>
	TN Betung Kerihun	25.88
5	<b>Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser</b>	<b>4.47</b>
	TN Gunung Leuser	4.47
6	<b>Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat</b>	<b>50.38</b>
	TN Kerinci Seblat	50.38
7	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh</b>	<b>81.63</b>
	SM Rawa Singkil	6.88
	TWA Kuta Malaka	74.76
8	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur</b>	<b>224.11</b>
	CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	224.11
9	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat</b>	<b>157.59</b>
	CA Muara Kendawangan	38.82
	CA Nyiut Penrissen	118.77
10	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku</b>	<b>119.64</b>
	CA Bekau Huhun	97.76
	KSA/KPA Pulau Larat	21.88
11	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat</b>	<b>192.74</b>
	KSA/KPA Danuera	29.26
	TB Pulau Moyo	163.48
12	<b>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah</b>	<b>206.31</b>
	CA Morowali	197.70
	CA Pangi Binangga	8.62
13	<b>Balai Taman Nasional Baluran</b>	<b>1,253.56</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No.	UPT/Kawasan Konservasi	Luas Kebakaran (ha) *)
	TN Baluran	1,253.56
14	<b>Balai Taman Nasional Gunung Rinjani</b>	<b>14.76</b>
	TN Gunung Rinjani	14.76
15	<b>Balai Taman Nasional Gunung Tambora</b>	<b>20,523.62</b>
	TN Gunung Tambora	20,523.62
16	<b>Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti</b>	<b>71.14</b>
	TN Manupeu Tanah Daru	71.14
17	<b>Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai</b>	<b>1,962.35</b>
	TN Rawa Aopa Watumohai	1,962.35
18	<b>Balai Taman Nasional Tanjung Puting</b>	<b>5.46</b>
	TN Tanjung Puting	5.46
19	<b>Balai Taman Nasional Wasur</b>	<b>205.12</b>
	TN Wasur	205.12
20	<b>Balai Taman Nasional Way Kambas</b>	<b>5,133.13</b>
	TN Way Kambas	5,133.13
21	<b>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>421.96</b>
	Tahura Sultan Adam	421.96
Grand Total		<b>35,694.00</b>
*)	Hasil analisis citra satelit dan pengecekan lapangan kerjasama Ditjen PKTL dengan Dit. PKHL (Ditjen PPI)	

Upaya yang dilakukan UPT untuk menindaklanjuti kebakaran yang terjadi antara lain dengan melakukan kegiatan pemadaman awal dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat (MPA, MPP), meningkatkan kegiatan patroli bersama masyarakat (MPP), serta meningkatkan penyuluhan terkait kebakaran hutan kepada masyarakat sekitar.



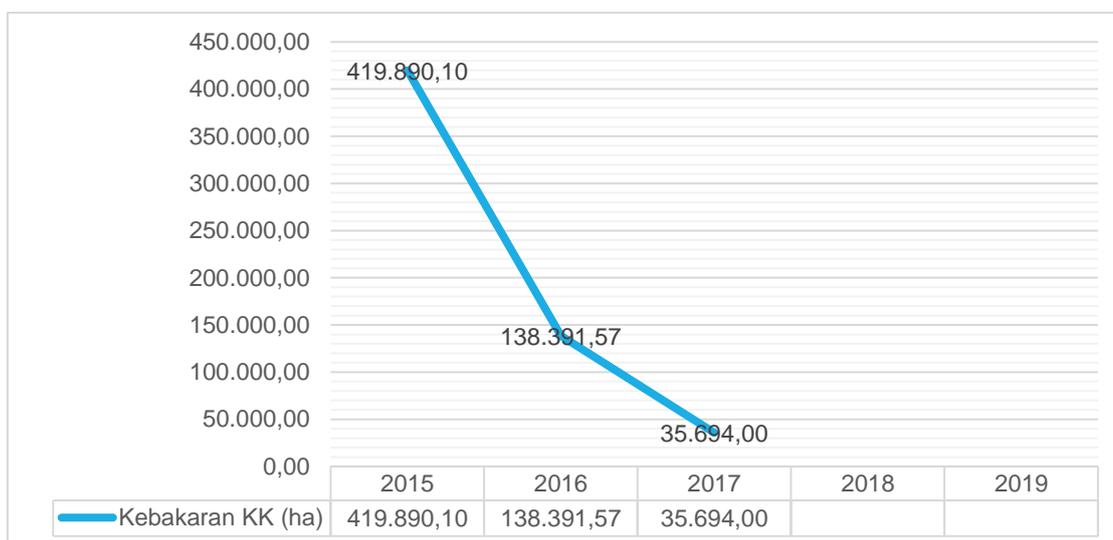
**Gambar 58. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran di SM Rawa Singkil**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



**Gambar 59. Upaya Pemadaman oleh Bridalkarhut dan MPA**

Luas kawasan konservasi yang terbakar dari tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagaimana pada grafik dibawah ini.



**Gambar 60. Grafik Trend Kejadian Kebakaran di Kawasan Konservasi**

Dari grafik di atas dapat diinterpretasikan bahwa kejadian kebakaran di dalam kawasan konservasi pada tahun 2015 s.d. 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kegiatan preventif yang dilakukan oleh UPT Lingkup Ditjen KSDAE seperti : penyuluhan, patroli fungsional, patroli bersama masyarakat (MMP), papan peringatan dan informasi telah memberikan hasil nyata untuk menekan kejadian kebakaran. Selain itu juga kondisi iklim basah atau bulan basah pada tahun 2016 dan 2017 yang memang membuat semakin kecilnya kejadian kebakaran hutan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja IKK “Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK”, diantaranya :

1. IKK “Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK” ini adalah IKK baru yang muncul pada RKP 2017, sehingga cukup sulit untuk mengkompilasi data dan informasi terkait dengan capaian kerjanya. ada IKK serupa dengan nomenklatur “Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi”, IKK ini sesuai dengan Renstra KSDAE 2015-2019.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2. Masa transisi dari Direktorat PKH, Ditjen KSDAE ke Direktorat PKHL, Ditjen PPI di tingkat tapak masih memberikan situasi yang sulit, mengingat belum tuntasnya pembagian tugas untuk penanggulangan kebakaran di kawasan konservasi, sarana dan prasarana pemadaman kebakaran, personil pemadam (MPA dan Brigdalkarhut).
3. Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan di kawasan konservasi pada UPT Lingkup Ditjen KSDAE yang rawan kebakaran masih belum memadai, karena sebagian besar sarana dan prasarana pemadaman milik DAOPS ditarik oleh Ditjen PPI.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja IKK ini, antara lain:

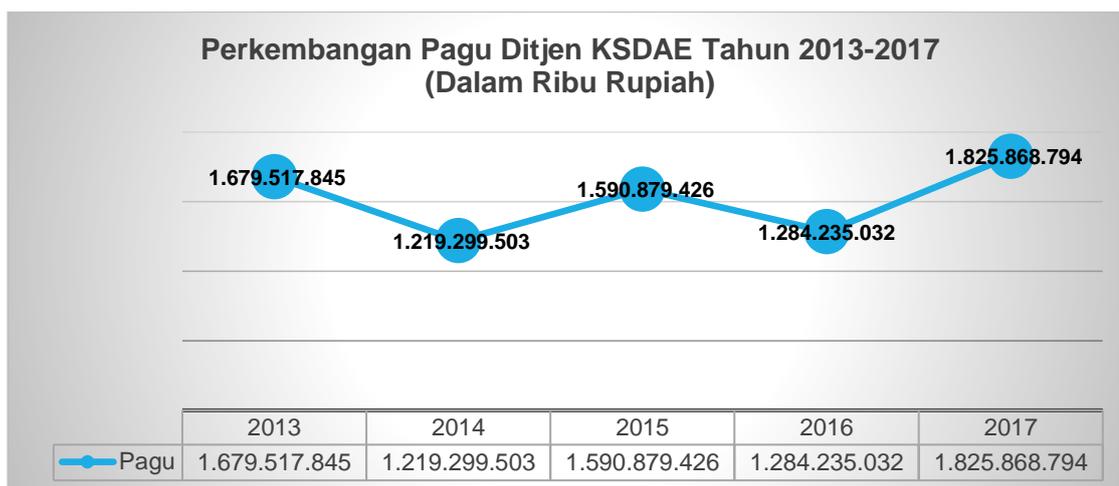
1. Perlu koordinasi dan komunikasi yang intensif kepada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE terkait dengan konsistensi nomenklatur IKK.
2. UPT Lingkup Ditjen KSDAE dapat mengadopsi SOP penanggulangan kebakaran hutan yang disusun oleh Direktorat PKHL, Ditjen PPI.
3. Direktorat Jenderal KSDAE perlu mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan di kawasan konservasi yang didistribusikan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE yang rawan kebakaran.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### B. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

#### 1. Pagu Anggaran 2017

Kegiatan pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2017 didukung oleh anggaran sebesar **Rp. 1.812.007.141.000,-** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 029. Pagu anggaran tahun 2017 meningkat sebesar 42,18% jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2016 (Rp. 1.284.235.032.000,-). Gambaran selengkapnya perkembangan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2013-2017 (dalam Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut.



**Gambar 61. Perkembangan Pagu Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017**

Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 digunakan untuk membiayai satu program dan 8 kegiatan. Alokasi anggaran per kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2017 disampaikan pada tabel berikut.

**Tabel 51. Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Kegiatan Tahun 2017**

No	Kode   Nama Kegiatan	Pagu	%
1	5419 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	936.053.558.000	51,27
2	5420 Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	19.627.745.000	1,07
3	5421 Pengelolaan Kawasan Konservasi	17.380.954.000	0,95
4	5422 Konservasi Spesies dan Genetik	26.432.505.000	1,45
5	5423 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	9.142.082.000	0,50
6	5424 Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	5.300.000.000	0,29
7	5425 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	273.876.319.000	15,00
8	5426 Pengelolaan Taman Nasional	538.055.631.000	29,47
	<b>Jumlah</b>	<b>1.825.868.794.000</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan data di atas, alokasi pagu anggaran terbesar adalah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (51,27%) diikuti oleh Pengelolaan Taman Nasional (29,47%), sedangkan yang terendah adalah pada kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial (0,29%). Delapan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Satker lingkup Ditjen KSDAE baik

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

di pusat maupun di daerah. Alokasi anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan Satker Pusat dan UPT di daerah. Alokasi anggaran per jenis Satker adalah sebagai berikut.

**Tabel 52. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Satker**

No.	Satker	Anggaran (Rp)	%	Jumlah Satker
<b>A. Satker Pusat</b>				
1	Setditjen KSDAE	70.306.043.000	3,85	1
2	Direktorat PIKA	20.627.745.000	1,13	1
3	Direktorat BPEE	6.050.000.000	0,33	1
4	Direktorat KKH	28.894.805.000	1,58	1
5	Direktorat KK	20.155.954.000	1,10	1
6	Direktorat PJLHK	11.302.655.000	0,62	1
<b>Jumlah A</b>		<b>157.337.202.000</b>	<b>8,61</b>	<b>6</b>
<b>B. Satker Daerah</b>				
1	Balai/Balai Besar TN	1.012.802.167.000	55,47	48
2	Balai/Balai Besar KSDA	655.729.425.000	35,91	26
<b>Jumlah B</b>		<b>1.668.531.592.000</b>	<b>91,38</b>	<b>74</b>
<b>JUMLAH A + B</b>		<b>1.825.868.794.000</b>	<b>100</b>	<b>80</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran Ditjen KSDAE terbesar digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di satker daerah yaitu mencapai 91,38%, sedangkan untuk satker pusat hanya 8,61%. Besarnya anggaran Ditjen KSDAE yang digunakan untuk membiayai kegiatan di daerah karena dari 74 satker Ditjen KSDAE, hanya 6 satker yang ada di Pusat dan selebihnya yaitu 74 satker berada di daerah baik berupa UPT Taman Nasional dan UPT KSDA. Berdasarkan jenis kegiatannya, alokasi anggaran paling besar adalah untuk kegiatan Pengelolaan Taman Nasional sebesar 55,47% dan yang kedua yaitu untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam sebesar 35,91%. Besarnya alokasi anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam disebabkan karena jumlah UPT Taman Nasional banyak yaitu 48 satker, sedangkan jumlah UPT KSDA sebanyak 26 satker.

Dilihat dari jenis belanjanya, anggaran Direktorat Jenderal KSDA tahun 2017 terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Komposisi pagu anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 53. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDA Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja**

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	752.414.004.000	41,21
2	Belanja Barang	699.230.135.000	38,30
3	Belanja Modal	374.224.655.000	20,50
<b>JUMLAH</b>		<b>1.825.868.794.000</b>	<b>100</b>

Sumber: Setditjen KSDAE, 2017

Berdasarkan komposisi pagu anggaran 2017 berdasarkan jenis belanja, dapat dilihat bahwa belanja pegawai mempunyai alokasi anggaran terbesar dibandingkan dengan jenis belanja yang lainnya, yaitu sebesar 41,21%, terbesar kedua yaitu anggaran untuk belanja

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

barang yaitu sebesar 38,30%, dan terendah pada belanja modal sebesar 20,50%. Sedangkan alokasi anggaran per sumber dana, anggaran terbesar berasal dari sumber dana RM (82,97%), sedangkan terendah bersumber dana HLLN (0,87%). Alokasi pagu anggaran Ditjen KSDAE tahun 2017 disampaikan pada tabel berikut.

**Tabel 54. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal KSDA Tahun 2017 Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	%
1	Rupiah Murni	1.515.007.123.000	82,97
2	PNBP	259.589.800.000	14,22
3	HLN	35.345.336.000	1,94
4	HLLN	15.926.535.000	0,87
	<b>Jumlah</b>	<b>1.825.868.794.000</b>	<b>100</b>

### 2. Realisasi Anggaran 2017

Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 adalah sebesar **Rp 1.687.895.930.765,-** atau **92,44%** (SAKPA tanggal 5 Februari 2018), dari pagu anggaran sebesar Rp 1.825.868.794.000,-,.

Berdasarkan realisasi perjenis belanja dapat diketahui bahwa realisasi terbesar pada belanja modal sebesar 94,42%, sedangkan yang terendah yaitu belanja pegawai yaitu sebesar 91,89%. Realisasi perjenis belanja selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 55. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja**

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	752.414.004.000	691.362.076.346	91,89
2	Belanja Barang	699.230.135.000	643.187.610.594	91,99
3	Belanja Modal	374.224.655.000	353.346.243.825	94,42
	<b>Jumlah</b>	<b>1.825.868.794.000</b>	<b>1.687.895.930.765</b>	<b>92,44</b>

Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana, penyerapan terbesar adalah pada sumber dana Rupiah Murni (RM) (93,11%), sedangkan realisasi terendah adalah pada sumber dana PNBP (88,56%). Realisasi anggaran dengan sumber dana RM terbesar karena sebagian besar anggaran bersumber dari RM termasuk kebutuhan gaji. Anggaran dengan sumber dana PNBP rendah karena SE Maksimal Pencairan PNBP Tahap VI terbit pada akhir tahun (Desember), sehingga waktu sudah tidak mencukupi untuk direalisasikan. Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana disampaikan dalam tabel berikut.

**Tabel 56. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni	1.515.007.123.000	1.410.602.701.210	93,11
2	PNBP	259.589.800.000	229.882.524.125	88,56
3	HLN	35.345.336.000	32.701.509.061	92,52
4	HLLN	15.926.535.000	14.709.196.369	92,36
	<b>Jumlah</b>	<b>1.825.868.794.000</b>	<b>1.687.895.930.765</b>	<b>92,44</b>

Selanjutnya realisasi anggaran berdasarkan jenis satker, bahwa penyerapan anggaran tertinggi untuk satker pusat yaitu Direktorat Kawasan Konservasi sebesar 96,36% dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi sebesar 95,69%. Untuk satker

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

daerah yang mempunyai realisasi tertinggi yaitu Balai Besar/Balai Taman Nasional sebesar 92,65%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada Balai/Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam sebesar 91,65%. Realisasi anggaran per jenis satker disampaikan pada tabel berikut. Sedangkan realisasi anggaran per Satker Lingkup Ditjen KSDAE disampaikan pada Lampiran 6.

**Tabel 57. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Satker**

No.	Satker	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>A. Satker Pusat</b>				
1	Setditjen KSDAE	70.306.043.000	65.613.884.960	93,33
2	Direktorat PIKA	20.627.745.000	19.359.062.129	93,85
3	Direktorat BPEE	6.050.000.000	5.701.162.968	94,23
4	Direktorat KKH	28.894.805.000	27.585.215.457	95,47
5	Direktorat KK	20.155.954.000	19.422.888.570	96,36
6	Direktorat PJLHK	11.302.655.000	10.816.006.228	95,69
<b>Jumlah A</b>		<b>157.337.202.000</b>	<b>148.498.220.312</b>	<b>94,38</b>
<b>B. Satker Daerah</b>				
1	Balai/Balai Besar TN	1.012.802.167.000	938.391.268.597	92,65
2	Balai/Balai Besar KSDA	655.729.425.000	601.006.441.856	91,65
<b>Jumlah B</b>		<b>1.668.531.592.000</b>	<b>1.539.397.710.453</b>	<b>92,26</b>
<b>JUMLAH A + B</b>		<b>1.825.868.794.000</b>	<b>1.687.895.930.765</b>	<b>92,44</b>

Penganggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 digunakan untuk membiayai delapan kegiatan. Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 58. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2017 Berdasarkan Delapan Kegiatan**

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelolaan dan Informasi Konservasi Alam	19.627.745.000	18.437.222.197	93,93
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	17.380.954.000	16.847.336.590	96,93
3	Konservasi Spesies dan Genetik	26.432.505.000	25.123.443.873	95,05
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	9.142.082.000	8.835.853.110	96,65
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	5.300.000.000	4.960.891.186	93,60
6	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	273.876.319.000	252.618.967.176	92,24
7	Pengelolaan Taman Nasional	538.055.631.000	497.391.308.842	92,44
8	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	936.053.558.000	863.680.907.791	92,27
<b>Jumlah</b>		<b>1.825.868.794.000</b>	<b>1.687.895.930.765</b>	<b>92,44</b>

## BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan atas program dan kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2017 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Ditjen KSDAE tahun 2017. Dalam laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian sasaran Ditjen KSDAE sebagaimana telah diamanatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019.

Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 2017 adalah sebesar **121,26%**. Capaian indikator kinerja program pada tahun 2017 ini meningkat jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 (109,16%), dengan peningkatan sebesar 11,07%. Peningkatan kinerja tidak terlepas dari meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan baik di tingkat Pusat ataupun UPT sebagai ujung tombak pencapaian target-target kinerja.

Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2017, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE sebesar **Rp. 1.825.868.794.000,-**, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 1.687.895.930.765,-** atau **92,44%**. Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain pada tahun 2017, realisasi anggaran tidak dapat optimal, penyebabnya antara lain penyerapan anggaran melalui sumber dana PNBPN yang ditetapkan melalui Maksimal Pencairan (MP) PNBPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mencapai 100% dari total pagu sumber dana PNBPN dan Surat Edaran MP PNBPN ke VI baru terbit pada bulan Desember 2017.

Beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

1. Pada IKK Peningkatan populasi 25 satwa prioritas terancam punah, terdapat kendala diantaranya lama waktu perkembangbiakan spesies satu dengan spesies lainnya tidak sama, karena banyak faktor yang menentukan diantaranya seks rasio, struktur umur pada populasi tersebut dan juga gangguan luar seperti kerusakan habitat, ketersediaan pakan dan sebagainya.
2. Pada IKK Penilaian METT terdapat permasalahan antara lain minimnya alokasi budget dan personil, lemahnya implementasi rencana kelola yang telah ada, tidak cukup informasi esensial yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, sistem perlindungan kawasan masih lemah, pengelolaan belum dikembangkan berbasis riset, pelibatan dan komunikasi dengan para pihak lemah, pengelolaan intensif terhadap nilai-nilai kawasan minimal, dan masih terbatas pengelola yang melakukan monitoring sistematis dan berkelanjutan terhadap nilai-nilai penting kawasan.
3. Beberapa UPT masih dalam proses penyusunan dan revisi zonasi sehingga belum dapat memfasilitasi kerjasama kemitraan di zona tradisional.
4. Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan di kawasan konservasi pada UPT Lingkup Ditjen KSDAE yang rawan kebakaran masih belum memadai, karena sebagian besar sarana dan prasarana pemadaman milik DAOPS ditarik oleh Ditjen PPI.
5. Beberapa rancangan dokumen zona dan blok yang disampaikan untuk dinilai dan disahkan masih memiliki permasalahan tenurial dilapangan seperti perambahan, tumpang tindih sertifikat, pemukiman illegal, fasilitas sosial dan fasilitas umum di dalam kawasan.
6. Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur tracking, shelter, menara pengamat, dan lain sebagainya.

## BAB IV PENUTUP

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain: Komitmen pimpinan, dukungan para pihak dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dukungan SDM, anggaran, sarana dan prasarana bagi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan pembangunan bidang KSDAE.

Rekomendasi untuk peningkatan pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengupayakan percepatan pemantapan kawasan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak
2. Optimalisasi pemanfaatan komitmen dan jejaring kerja yang selama ini sudah terbangun dengan berbagai pihak dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem
3. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak dalam hal penyelesaian konflik satwa dengan manusia serta penyelesaian kasus kebakaran hutan
4. Mengupayakan penambahan jumlah dan kemampuan SDM baik melalui pelatihan maupun pendidikan formal
5. Melengkapi juklak dan juknis peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kehutanan bidang KSDAE.
6. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja harus dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
7. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah perlu dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
8. Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

**MATRIKS TARGET KINERJA  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN  
EKOSISTEM  
TAHUN 2015-2019**

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>029.05.08</b>	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>					
	<i>Sasaran Program 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati</i>					
	1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50 KK	100 KK	150 KK	200 KK	260 KK
	2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> ) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	4. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13 Unit	26 Unit	39 Unit	43 Unit	48 Unit
	5. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	<i>Sasaran Program 2: Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati</i>					
	1. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Triliun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	3. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	4. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan <i>Geothermal</i> sebanyak 5 Unit)	25 Unit	51 Unit	77 Unit	103 Unit	130 Unit
<b>5420</b>	<b>Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam</i>					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
<b>5421</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru</i>					
	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa
	5. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	6. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	7. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
<b>5422</b>	<b>Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik</b>					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik</i>					
	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T
	5. Besaran PNBPN dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	7. Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1 PIC	3 PIC	5 PIC	7 PIC	10 PIC
	8. Jumlah hasil <i>assessment</i> Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG	8 PRG	12 PRG	16 PRG	20 PRG
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	10. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa ( <i>sanctuary</i> ) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
<b>5423</b>	<b>Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi</b>					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</i>					
	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit
<b>5424</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial</b>					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial</i>					
	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE	26 KEE	39 KEE	43 KEE	48 KEE
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	16 Paket Data	30 Paket Data	44 Paket Data	48 Paket Data
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direvisi sebanyak 48 Dokumen	3 Dokumen	16 Dokumen	30 Dokumen	44 Dokumen	48 Dokumen
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolannya pada 6 Kawasan	-	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolannya pada 6 Ekoregion	-	1 Ekoregion	2 Ekoregion	4 Ekoregion	6 Ekoregion
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	120 Spesies	180 Spesies	240 Spesies	300 Spesies
<b>5425</b>	<b>Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati</b>					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan</i>					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	12.Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	13.Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies
	14.Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M
	15.Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	16.Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa ( <i>sanctuary</i> ) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	17.Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	18.Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	19.Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	20.Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	21.Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	22.Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	23.Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang
	24.Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin
<b>5426</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional</b>					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional</i>					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan <i>reliable</i> pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	10. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
	11. Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	12. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	13. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa ( <i>sanctuary</i> ) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	14. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	15. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	16. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	17. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	18. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	19. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	20. Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+</i> pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit
	21. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang
	22. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin
<b>5419</b>	<b>Kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE</b>					
	<i>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE</i>					
	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin

## LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR JENDERAL KSDAE TAHUN 2017



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.

Jabatan : Plt. DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc



Jakarta, Desember 2016

Pihak Pertama,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M  
NIP. 19640930 198903 1 001

**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
a.	Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati.	Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik ke kawasan konservasi Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air, dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	2.500.000 orang atau Rp.90,8 Milyar 30 unit atau Rp.3,7 Milyar Rp.10 Milyar Rp. 5,3 T
b.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM dan TWA) memperoleh nilai Indeks METT minimal 70% (kategori baik) Jumlah taman nasional memperoleh nilai Indeks METT minimal 70% (kategori baik) Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) Luas KEE yang telah dikelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran	17 Unit KK 30 unit Taman Nasional 2 % 7 paket data 300.000 Ha dalam 13 unit KEE 10 unit 20.000 Ha 551 unit KK

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000,-) 1.811.768.570
1.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	
2.	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	
3.	Pengelolaan Kawasan Konservasi	
4.	Konservasi Spesies dan Genetik	
5.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	
6.	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	
7.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	
8.	Pengelolaan Taman Nasional	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	

Jakarta, Desember 2016

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pt. DIREKTUR JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M. **A**  
NIP. 19640930 198903 1 001

LAMPIRAN 3.

JUMLAH WISATAWAN PADA KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2017

A. Data Pengunjung Taman Nasional 2017

NO.	TAMAN NASIONAL	PENELITIAN		PENDIDIKAN		REKREASI		BERKEMAH		LAIN-LAIN		JUMLAH		
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	TOTAL
<b>I. BALAI BESAR TAMAN NASIONAL</b>														
1	Gunung Leuser	59	7	246	11	3.058	8.132	3	4	921	2.117	4.287	10.271	14.558
2	Kerinci Seblat	34	1	13	400	8.060	42	135	-	302	-	8.544	443	8.987
3	Bukit Barisan Selatan	42	-	113	-	5.217	103	-	-	74	-	5.446	103	5.549
4	Bromo Tengger Semeru	-	-	-	-	381.460	18.010	177.797	3.466	-	-	559.257	21.476	580.733
5	Gunung Gede Pangrango	120	-	1.405	-	110.135	546	16.206	-	514	-	128.380	546	128.926
6	Betung Kerihun	11	-	-	-	2.054	95	-	-	-	-	2.065	95	2.160
7	Lore Lindu	43	1	-	-	26.229	241	12.860	-	18	-	39.150	242	39.392
8	Teluk Cenderawasih	10	-	-	-	307	1.339	-	-	-	-	317	1.339	1.656
<b>II. BALAI TAMAN NASIONAL</b>														
9	Batang Gadis	-	-	-	-	92	5	-	-	-	-	92	5	97
10	Siberut	2	1	24	-	7	-	-	-	-	-	33	1	34
11	Bukit Tigapuluh	3	-	53	-	298	1	-	-	268	2	622	3	625
12	Berbak	31	-	69	-	51	1	-	-	80	8	231	9	240
13	Bukit Dua Belas	53	-	9	1	79	9	-	-	-	3	141	13	154
14	Sembilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Way Kambas	-	-	-	-	43.392	283	-	-	-	-	43.392	283	43.675
16	Kepulauan Seribu	18	-	-	-	12.550	357	-	-	-	-	12.568	357	12.925
17	Ujung Kulon	53	-	686	5	7.644	710	33	2	2.657	9	11.073	726	11.799
18	Gunung Halimun	35	-	3.017	-	140.628	164	14.272	-	-	-	157.952	164	158.116
19	Karimun Jawa	97	-	617	6	7.346	165	-	-	227	-	8.287	171	8.458
20	Meru Betiri	6	-	1.791	-	35.013	2.838	437	-	3.834	1	41.081	2.839	43.920
21	Baluran	401	-	3.301	-	74.210	1.036	-	-	15	-	77.927	1.036	78.963
22	Alas Purwo	17	-	5.444	-	69.385	16.338	287	-	18.692	-	93.825	16.338	110.163
23	Bali Barat	28	1	680	-	16.696	37.169	400	-	-	-	17.804	37.170	54.974
24	Gunung Rinjani	6	-	-	-	47.200	38.325	-	-	-	-	47.206	38.325	85.531
25	Manupeu Tanadaru	1	3	-	6	452	2.270	-	-	-	-	453	2.279	2.732
26	Laiwangi Wanggameti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Komodo	-	-	-	-	41.383	73.145	-	-	-	-	41.383	73.145	114.528
28	Kelimutu	-	-	-	-	53.567	12.084	-	-	-	-	53.567	12.084	65.651
29	Gunung Palung	7	4	-	-	618	55	109	-	-	-	734	59	793
30	Bukit Baka Bukit Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	124	28	124	28	152
31	Danau Sentarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tanjung Puting	-	-	-	-	6.550	10.130	-	-	-	-	6.550	10.130	16.680
33	Kutai	91	1	-	-	8.163	286	-	-	-	-	8.254	287	8.541
34	Kayan Mentarang	-	-	3	-	-	2	-	-	4	-	7	2	9

NO.	TAMAN NASIONAL	PENELITIAN		PENDIDIKAN		REKREASI		BERKEMAH		LAIN-LAIN		JUMLAH		
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	TOTAL
35	Bunaken	-	-	-	-	34.670	2.575	-	-	-	-	34.670	2.575	37.245
36	Bogani Nani Wartabone	-	-	-	-	5.173	197	-	-	-	-	5.173	197	5.370
37	Taka Bone Rate	-	-	-	-	2.259	85	-	-	1.435	-	3.694	85	3.779
38	Rawa Aopa Watumohai	30	-	394	-	38	2	190	-	-	-	652	2	654
39	Kepulauan Wakatobi	36	2	130	-	226	1.007	-	-	1	2	393	1.011	1.404
40	Manusela	30	7	-	-	-	1	276	7	17	1	323	16	339
41	Lorentz	-	-	-	-	31	17	-	-	-	-	31	17	48
42	Wasur	-	-	-	-	250	2	-	-	-	-	250	2	252
43	Gunung Ciremai	-	-	-	-	425.338	18	376	-	3.650	-	429.364	18	429.382
44	Gunung Merbabu	-	-	-	-	61.395	-	1.603	-	68.055	270	131.053	270	131.323
45	Tesso Nillo	5	2	-	-	157	20	-	-	-	-	162	22	184
46	Sebangau	73	2	-	-	1.389	211	-	-	-	-	1.462	213	1.675
47	Bantimurung Bulusaraung	38	2	510	-	347.535	419	-	-	66	-	348.149	421	348.570
48	Aketajawe Lolobata	-	-	90	-	25	4	-	-	-	-	115	4	119
49	Kepulauan Togean	-	-	-	-	450	116	-	-	2	-	452	116	568
50	Gunung Merapi	71	-	553	-	201.637	1.371	70	-	60	-	202.391	1.371	203.762
51	Tambora	-	-	4	17	1.790	173	-	-	-	-	1.794	190	1.984
52	Zamrud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.451</b>	<b>34</b>	<b>19.152</b>	<b>446</b>	<b>2.184.207</b>	<b>230.099</b>	<b>225.054</b>	<b>3.479</b>	<b>101.016</b>	<b>2.441</b>	<b>2.530.880</b>	<b>236.499</b>	<b>2.767.379</b>

## B. Data Pengunjung Taman Wisata Alam 2017

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN	PENELITI AN		PENDIDIKAN		REKREASI		BERKEMAH		LAIN-LAIN		JUMLAH		
			DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	DARAT														
1	SUMATERA UTARA	1	Holiday Resort	-	-	-	-	240	-	-	10	-	250	-	250
		2	Sিকেহ-cikeh	-	-	61	-	46	-	-	-	-	107	-	107
		3	Sijaba Hutaginjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Deleng Lancuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Lau debuk-debuk	-	-	100	-	750	-	-	-	-	850	-	850
		6	Sibolangit	-	-	575	-	867	12	-	14	-	1.456	12	1.468
2	SUMATERA BARAT	7	Lembah Harau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	Mega Mendung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	Rimbo Panti	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
		10	Btg Pangeran Satu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	Gunung Merapi	-	-	10	-	-	-	1.650	-	-	1.660	-	1.660
		12	Gunung Sago Malintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	Salbi Sarabua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN		PENELITIAN		PENDIDIKAN		REKREASI		BERKEMAH		LAIN-LAIN		JUMLAH		
				DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	TOTAL
		14	Singgalang Tandikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	Air Putih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RIAU	16	Sungai Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	Buluh Cina													
4	KEP. RIAU	18	Muka Kuning	314	-	-	-	-	-	502	-	-	-	816	-	816
5	JAMBI	19	Bukit Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENGGULU	20	Bukit Kaba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21	Lubuk Tapi-Kayu Ajaran	-	-	192	800	6.763	18	6.689	-	6.763	-	20.407	818	21.225
		22	Pantai Panjang & P. Baai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		23	Air Hitam	-	-	396	10	6.046	36	41	-	785	-	7.268	46	7.314
		24	Way Hawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25	Seblat													
7	SUMATERA SELATAN	26	Punti Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		27	Bukit Serelo	-	-	-	-	93	56	37	-	97	-	227	56	283
8	DKI JAKARTA	28	Angke Kapuk	-	-	-	-	149.914	-	-	-	-	-	149.914	-	149.914
9	BANTEN	29	Carita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30	Pulau Sangiang	-	-	-	-	268.900	247	-	-	-	-	268.900	247	269.147
10	JAWA BARAT	31	Telaga Warna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		32	Gunung Pancar	-	-	-	-	6.692	10	-	-	-	-	6.692	10	6.702
		33	Jember	2	-	-	-	25.825	1.362	-	-	-	-	25.827	1.362	27.189
		34	Sukawayana	-	-	-	-	76.182	154	-	-	-	-	76.182	154	76.336
		35	Cimanggu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		36	Tangkuban Perahu	-	-	-	-	7.924	-	-	-	-	-	7.924	-	7.924
		37	Telaga Patenggang	1	-	-	-	83.084	5	-	-	-	-	83.085	5	83.090
		38	Gunung Tampomas	2	-	337	-	1.196.937	60.291	-	-	-	-	1.197.276	60.291	1.257.567
		39	Telaga Bodas	-	-	114	-	89.878	204	-	-	-	-	89.992	204	90.196
		40	G.Papandayan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		41	Kawah Kamojang	-	-	-	-	24.162	9	-	-	-	-	24.162	9	24.171
		42	Gunung Guntur	-	-	45	-	67.950	1.999	2.015	15	-	-	70.010	2.014	72.024
		43	P.Pangandaran	1	-	-	-	34.485	86	-	-	-	-	34.486	86	34.572
		44	Linggarjati	-	-	-	-	9.522	-	-	-	-	-	9.522	-	9.522
11	JAWA TENGAH	45	Grojogan Sewu	8	-	-	-	47.335	220	-	-	-	-	47.343	220	47.563
		46	Gunung Selok	-	-	-	-	32.385	-	-	-	-	-	32.385	-	32.385
		47	Sumber Semen	-	-	-	-	332.792	453	-	-	-	-	332.792	453	333.245
		48	Telogo Warno/Pengilon	-	-	-	-	6.221	-	-	-	-	-	6.221	-	6.221
12	D.I. YOGYAKARTA	49	Gunung Gamping	-	-	-	-	625	-	-	-	-	-	625	-	625

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN		PENELITIAN		PENDIDIKAN		REKREASI		BERKEMAH		LAIN-LAIN		JUMLAH		
				DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	TOTAL
13	JAWA TIMUR	50	Gunung Baung	-	-	-	-	236.594	716	-	-	-	-	236.594	716	237.310
		51	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	-	-	60	-	36	-	-	-	-	-	96	-	96
		52	Tretes	-	-	-	-	2.584	-	-	-	-	-	2.584	-	2.584
14	BALI	53	Panelokan	-	-	-	-	227.962	25.923	-	-	-	-	227.962	25.923	253.885
		54	Danau Buyan /D. Tamblingan	-	-	-	-	10.453	-	-	-	-	-	10.453	-	10.453
		55	Sangeh	-	-	-	-	12.420	-	-	-	-	-	12.420	-	12.420
		56	Gunung Batur Bukit Payang	-	-	-	-	20.992	927	-	-	-	-	20.992	927	21.919
15	NUSA TENGGARA BARAT	57	Suranadi	-	-	-	-	1.704	9.261	305	-	104	-	2.113	9.261	11.374
		58	Pelangan	-	-	-	-	7.857	66.623	-	-	-	-	7.857	66.623	74.480
		59	Kerandangan	-	-	-	-	1.729	59	1.815	-	651	50	4.195	109	4.304
		60	Bangko-bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		61	Tanjung Tampa	-	-	-	-	1.062	610	183	-	253	-	1.498	610	2.108
		62	Semongkat	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	220	-	220
		63	Gn. Tunak	-	-	-	-	270	69	-	-	-	-	270	69	339
		64	Danau Rawa Taliwang	-	-	-	-	2.029	-	-	-	-	-	2.029	-	2.029
		65	Madapangga	-	-	-	-	2.165	45	-	-	-	-	2.165	45	2.210
16	NUSA TENGGARA TIMUR	66	Tuti Adigae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		67	Pulau Batang	-	-	-	-	778	1	-	-	-	-	778	1	779
		68	Pulau Manipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		69	Kemang Beleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70	Ruteng (Pucuk Ranaka)	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-	3
			Ruteng (Ranamase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71	Bipolo	-	-	-	2	78	24	-	-	-	-	78	26	104
		72	Pulau Besar	-	-	-	-	962	42	-	-	77	-	1.039	42	1.081
		73	Pulau Rusa	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	64	-	64
		74	legon llemedo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75	Pulau Lapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Baumata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
77	Camplong (RTK.12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	KALIMANTAN BARAT	78	Baning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		79	Bukit Kelam	-	-	64	-	2.975	-	-	-	868	-	3.907	-	3.907
		80	Asuansang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
		81	Gunung Dungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		82	Sungai Liku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		83	Tanjung Belimbing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		84	Gn. Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KALIMANTAN TENGAH	85	Bukit Tangkiling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN		PENELITIAN		PENDIDIKAN		REKREASI		BERKEMAH		LAIN-LAIN		JUMLAH		
				DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	TOTAL
		86	Tanjung Keluang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KALIMANTAN SELATAN	87	Pleihari Tanah Laut	-	-	-	-	2.080	115	-	-	-	-	2.080	115	2.195
		88	Pulau Kembang	-	-	-	-	10.900	-	-	-	-	-	10.900	-	10.900
		89	Pulau Bakut	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
20	SULAWESI UTARA	90	Batu Angus	-	-	-	-	56.965	97	-	-	-	-	56.965	97	57.062
		91	Batu Putih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SULAWESI TENGAH	92	Air Terjun Wera	-	-	-	-	1.732	2.478	54	-	-	1	1.786	2.479	4.265
		93	Bancea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SULAWESI SELATAN	94	Danau Matano	-	-	9	-	2.500	-	-	-	2	-	2.511	-	2.511
		95	Sidrap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	Nanggala III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	Danau Matalano-Mahalano	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	17
		98	Danau Towuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	Cani Sirenreng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	Lejja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	Malino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SULAWESI TENGGARA	102	Tirta Rimba Air Jatuh	-	-	-	-	93.874	-	-	-	-	-	93.874	-	93.874
		103	Mangolo	-	-	-	-	680	-	-	-	-	-	680	-	680
24	MALUKU	104	Gunung Api Banda	1	-	-	-	-	18	-	-	-	1	18	19	
25	PAPUA	105	Teluk Yotefa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		106	Nabire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	PAPUA BARAT	107	Bariat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		108	Klamono	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	750	-	750
		109	Gunung Meja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		110	Pasir Putih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		111	Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH A</b>				<b>339</b>	<b>-</b>	<b>1.964</b>	<b>812</b>	<b>3.180.052</b>	<b>172.170</b>	<b>13.291</b>	<b>15</b>	<b>9.624</b>	<b>51</b>	<b>3.205.270</b>	<b>173.048</b>	<b>3.378.318</b>
<b>B.</b>	<b>PERAIRAN / LAUT</b>															
1	NANGROE ACEH DARUSALAM	112	Jatho	-	-	4	-	-	-	-	-	83	53	87	53	140
		113	Kepulauan Banyak	-	-	-	-	64	37	-	-	-	-	64	37	101
		114	Kuta Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		115	Pulau Weh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTEN	116	Pulau Sangiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	NUSA TENGGARA BARAT	117	Pulau Moyo	-	-	-	-	99	345	56	-	418	-	573	345	918
		118	P.Satonda	-	-	-	-	290	820	-	-	539	-	829	820	1.649
4	NUSA TENGGARA TIMUR	119	Teluk Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		120	Teluk Maumere	-	-	-	-	40	87	-	-	-	-	40	87	127
		121	Pulau Riung	-	-	-	-	5.426	2.574	40	-	416	140	5.882	2.714	8.596

NO	PROVINSI	NAMA KAWASAN		PENELITIAN		PENDIDIKAN		REKREASI		BERKEMAH		LAIN-LAIN		JUMLAH		
				DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	TOTAL
5	KALIMANTAN TIMUR	122	Pulau Sangalaki	-	-	-	-	10.086	1.366	-	-	-	-	10.086	1.366	11.452
6	SULAWESI TENGGARA	123	Teluk Lasolo	1	-	-	-	147	-	-	-	9	-	157	-	157
		124	Pulau Padamarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MALUKU	125	Pulau Kassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		126	Pulau Pombo	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20
		127	P. Marsegu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH B</b>				1	-	4	-	16.152	5.249	96	-	1.465	193	17.718	5.442	23.160
<b>Jumlah A + B</b>				340	-	1.968	812	3.196.204	177.419	13.387	15	11.089	244	3.222.988	178.490	3.401.478

LAMPIRAN 4.

**DATA PENINGKATAN POPULASI 25 SATWA TERANCAM PUNAH PRIORITAS TAHUN 2017**

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2017 (jml)	Penurunan/Peningkatan (jml)	Persentase 2017 (%)	%
1	Harimau Sumatera	Tambling	28	37	9	32,14	32,14
		PT. REKI Harapan Rain Forest, Kabupaten Batanghari, BKSDA Jambi	6	7	1	16,67	16,67
		Resort Talang Lakat, SPTN Wilayah II Belilas, BTN. Bukit Tiga Puluh	7	10	3	42,86	42,86
		TN Berbak	15	4	-11	-73,33	-73,33
		TERMA, BTN Way Kambas	15	16	1	6,67	6,67
2	Gajah Sumatera	Site monitoring 1 dan site monitoring 2 TN Tesso Nilo	128	148	20	15,63	15,63
		TERMA, BTN Way Kambas	39	247	208	533,33	150,00
		Lansekap Kabupaten Aceh Tengah -Bener Meriah-Bireuen	41	61	20	48,78	48,78
		Lansekap Bukit 30 Kab. Tebo, BKSDA Jambi	73	74	1	1,37	1,37
		Way Haru - Way Canguk, TNBBS	21	12	-9	-42,86	-42,86
		Semenanjung Ujung Kulon	58	64	6	10,34	10,34
3	Badak	TERMA, BTN Way Kambas	10	33	23	230,00	150,00
		Tenumbang - Way Krui - Liwa, TNBBS	12	3	-9	-75,00	-75,00
4	Banteng	Perkebunan Trebasala (Banyuwangi), BBKSDA Jatim	22	20	-27	-122,73	-122,73
		Hutan Lindung Londo lampesan Perum Perhutani BKPH Wuluhan KPH Jember, BBKSDA Jatim	20				0,00
		Hutan Lindung Lebakharjo Perum Perhutani KPH malang BKPH Dampit Blok Kaloloro dan Blok Kaliganteng, BBKSDA Jatim	5				0,00
		Blok Lodadi, Manung dan sekitarnya (Resort Bandalit, SPTN II ambulul), BTN Meru Betiri	43	43	0	0,00	0,00
		Blok 90an, Blok 60an, Blok Pantai dan sekitarnya (resort Sukamade, SPTN Wilayah I sarongan), BTN Meru Betiri	17	20	3	17,65	17,65
		Blok Bekol, Bama dan sekitarnya (resort Bama SPTN I Bekol); Blok Palongan, Semiang, Dungbiru dan sekitarnya (resort Perengan, SPTN I Bekol); Blok Panjaitan, Curah Tangis dan sekitarnya (resort Bitakol, SPTN Wilayah II karangtekok), BTN. Baluran	33	77	44	133,33	133,33
		Feeding ground sadengan, TN. Alas Purwo	117	126	9	7,69	7,69
		Padang rumput long tua SPTN wilayah II Long Alango, BTN. Kayang Mentarang	13	11	-2	-15,38	-15,38
5	Owa	Pusat Penelitian Konservasi Alam Bodogol (PPKAB), Resort PTN Bodogol, seksi PTN Wilayah V Bodogol, bidang PTN wilayah III Bogor, BBTN. G. Gede Pangrango	31	96	65	209,68	150,00
		CA gunung Tilu, BBKSDA Jabar	31	50	19	61,29	61,29
		CA Burangrang, BBKSDA Jabar	8	10	2	25,00	25,00
		CA Luwung Sancang, BBKSDA Jabar	19	22	3	15,79	15,79
		Cikanikir, BTN. G Halimun Salak	26	30	4	15,38	15,38
		Ciptarasa-Ciptagelar, BTN. G Halimun Salak	20	23	3	15,00	15,00
		G. Luhurr, BTN. G Halimun Salak	15	20	5	33,33	33,33
		HL Petungkriyono, BKPH Doro, KPH Pekalongan Timur, Kab. Pekalongan, BKSDA Jateng	25	34	9	36,00	36,00
		Linggoasri, BPKH Kesesi, KPH Pekalongan Timur, Kabupaten Pekalongan, BKSDA Jateng	10	8	-2	-20,00	-20,00
		Daerah Bojokan, BTN Siberut	14	25	11	78,57	78,57
		Daerah Cimpungan, BTN Siberut	10	3	-7	-70,00	-70,00
		Daerah simabugai, BTN Siberut	10	10	0	0,00	0,00
		Daerah matotonan, BTN Siberut	0	0	0	0,00	0,00
		Mongan Tepu, Sagulubek, BTN Siberut	15	12	-3	-20,00	-20,00
		Daerah Kaleak, Sagulubek, BTN Siberut	8	10	2	25,00	25,00
		Stasiun riset cabang panti, BTN. G. Palung	21	25	4	19,05	19,05
6	Orangutan	DAS Embaloh (sebabal dan Camp Derian), BBTN BKDS	361	11	-350	-96,95	-96,95
		Sangkima, BTN Kutai	341	589	248	72,73	72,73
		Mentoko, BTN Kutai	188	992	804	427,66	150,00
		Menamang, BTN Kutai	280	420	140	50,00	50,00
		Resort Belaban (SPTN Wilayah I Nanga Pinoh), BTN. BKBR	25	15	-10	-40,00	-40,00
		Stasiun riset Cabang Panti, BTN Gunung Palung	63	67	4	6,35	6,35
		Sungai Lesan, HL Sungai Lesan, Kab. Barau, BKSDA. Kaltim	277	3	-274	-98,92	-98,92
		Cagar Alam Hutan Pinus Jhantoi, BKSDA Aceh	55	86	31	56,36	56,36

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2017 (jml)	Penurunan/Peningkatan (jml)	Persentase 2017 (%)	%
7	Bekantan	TWA P.Bakut, BKSDA Kalsel	30	55	25	83,33	83,33
		TWA P. Kembang, BKSDA Kalsel	21	36	15	71,43	71,43
		SM P. Kaget, BKSDA Kalsel	74	93	19	25,68	25,68
		Kedang Rantau Kepala, CA Muara kaman Sedulang, Kab. Kukar, BKSDA Kaltim	158	334	176	111,39	111,39
		Kuaro Mayang, CA Teluk Adang, Kab. Paser, BKSDA Kaltim	103	176	73	70,87	70,87
		Sungai Batu Barat-Matan, BTN. G. Palung	455	368	-87	-19,12	-19,12
		Sungai Pari, Teluk Lombok, BTN. Kutai	16	35	19	118,75	118,75
		Sungai Sanggata, BTN. Kutai	24	49	25	104,17	104,17
		Sungai Teluk Pandan, sungai selimpus dan sungai kanduung, BTN. Kutai	22	76	54	245,45	150,00
		S. Sangkima - S. Padang, BTN. Kutai	25	53	28	112,00	112,00
		Sungai Musang dan Sungai Bulan, SPTN Wilayah III, BTN. Sebangau	123	147	24	19,51	19,51
		Cermai, Kab. Sambas, APL (kawasan essensial), BKSDA Kalbar	24	24	-47	-66,20	-66,20
Setinggak, APL (kawasan essensial), Kab. Sambas, BKSDA Kalbar	47						
Air Hitam, CA Muara Kendawangan, Kab. Ketapang, BKSDA Kalbar	73	207	134	183,56	150,00		
8	Komodo	CA Wae Wuul, BBKSDA NTT	7	19	12	171,43	150,00
		Kawasan Ekosistem Essensial Pota, BBKSDA NTT	6	3	-3	-50,00	-50,00
		Pulau Ontobe TWA 17 Pulau, BBKSDA NTT	6	4	-2	-33,33	-33,33
9	Jalak Bali	Lampu Merah/ Segara Rupek, BTN Bali Barat	22	12	-10	-45,45	-45,45
		Teluk Brumbun, BTN Bali Barat	7	21	14	200,00	150,00
		Tanjung Gelap, BTN Bali Barat	9	28	19	211,11	150,00
		Teluk Kotai, BTN Bali Barat	1	0	-1	-100,00	-100,00
10	Maleo	Saluki (BPTNW I Saluki), BTN. Lore Lindu	499	1054	555	111,22	111,22
		Pakuli dan Hukurawa, BBTN Lore Lindu	87	417	330	379,31	150,00
		SM Bangkiriang, Kabupaten Banggai, BKSDA Sulteng	22	24	2	9,09	9,09
		SM Pinjan Tanjung Matop, Kabupaten Tolitoli, BKSDA Sulteng	36	40	4	11,11	11,11
		Blok Hutan Maleo, SM Tanjung Batiko, BKSDA Sutra	30	35	5	16,67	16,67
		Sungai Pampaea (62,6 Ha);Savana Pampaea (12,6 Ha);dan Mempaho (9,6 Ha), BTN. Rawa Aopa Watumohai	24	33	9	37,50	37,50
		Tambun/SPTN Wilayah II Doloduo, BTN. Boganinani Wartabone	168	605	437	260,12	150,00
		Muara Pusian/SPTN Wilayah I Suwawa, BTN. Boganinani Wartabone	156	495	339	217,31	150,00
Hungayono/SPTN Wilayah I Suwawa, BTN. Boganinani Wartabone	122	616	494	404,92	150,00		
11	Babirusa	Lindu (Tumavu), BBTN Lore Lindu	13	6	-7	-53,85	-53,85
		Rahmat dan Bobo (BPTNW II), BBTN Lore Lindu	11	14	3	27,27	27,27
		Tuare (BPTNW III Poso), BBTN Lore Lindu	53	106	53	100,00	100,00
		CA Gunung Tinombala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, BKSDA Sulteng	55	55	0	0,00	0,00
		Lereng Poniki/SPTN Wilayah II Doloduo, BTN Bogani	3	8	5	166,67	150,00
		Lokasi Ongka Desa lolanan/SPTN Wilayah III Maelang, BTN Bogani	26	9	-17	-65,38	-65,38
		Pinogu/SPTN Wilayah I Suwawa, BTN Bogani	10	6	-4	-40,00	-40,00
		Pulau Togean, BTN. Togean	46	416	29	6,52	6,52
Pulau Batudaka, BTN. Togean	399						
12	Anoa	Site Pongko, cagar alam Faruhumpenai, BBKSDA Sulsel	162	101	-61	-37,65	-37,65
		Site Balabba, cagar alam Faruhumpenai, BBKSDA Sulsel	32	37	5	15,63	15,63
		Toro (gunung Hananau - Kanawanto) BPTNW I Saluki, BTN. Lore Lindu	11	7	-4	0,00	0,00
		Gunung Sombu, Gunung Rorekatimbu, Gunung Tokoso (BPTNW II makmur), BTN. Lore Lindu	33	4	-29	0,00	0,00
		Torire (BPTNW III Poso), BTN. Lore Lindu	33	0	-33	-100,00	-100,00
		Blok Hutan Elehaji SM Buton Utara, BKSDA Sultra	75	77	2	2,67	2,67
		Blok Hutan Betau Ronta SM Buton Utara, BKSDA Sultra	44	40	-4	-9,09	-9,09
		Blok Hutan Tanjung Gomo SM Tanjung Peropa, BKSDA Sultra	38	41	3	7,89	7,89
Blok Hutan Tambeanga SM Tj Peropa, BKSDA Sultra	24	31	7	29,17	29,17		

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2017 (jml)	Penurunan/Peningkatan (jml)	Persentase 2017 (%)	%
		Rawa Mandu-Mandula (4,3 Ha);Laea (4,1 Ha);Lahalo (4,2 Ha);Boolo (4,1 Ha);Rawa Lappopala (4,2 Ha), BTN. Rawa Aopa Watumohai	10	12	2	20,00	20,00
		Gunung Imandi/SPTN Wilayah III Maelang, BTN. Boganinani Wartabone	19	3	-16	-84,21	-84,21
		Lereng Poniki/SPTN Wilayah II Doloduo, BTN. Boganinani Wartabone	25	24	-1	-4,00	-4,00
		Pinogu/SPTN Wilayah I Suwawa, BTN. Boganinani Wartabone	15	7	-8	-53,33	-53,33
13	<b>Elang</b>	CA Telaga Warna, BBKSDA Jawa Barat	9	11	2	22,22	22,22
		CA/TWA Kamojang, BBKSDA Jawa Barat	2	9	7	350,00	150,00
		CA/TWA Tangkuban Parahu, BBKSDA Jawa Barat	3	6	3	100,00	100,00
		Blok Banyulinu, CA/TWA Kawah Ijen, Banyuwangi, BBKSDA Jatim	3	14	3	100,00	100,00
		Cagar Alam Gunung Picis, kabupaten Ponorogo, BBKSDA Jatim	3				
		Blok Pancur, Perkebunan Kaliasat-Jampit, PTPN XII, Situbondo, BBKSDA Jatim	5				
		Citugunung, resort PTN Situgunung, seksi PTN wilayah IV Situgunung, bidang PTN wilayah II Sukabumi, BTN. G. Halimun Salak	4	17	13	325,00	150,00
		Cikaniki, BTN Halimun Salak, BTN. G. Halimun Salak	8	10	0	0,00	0,00
		Jalur pengamatan burung resort rowobendo, BTN Alas Purwo	2				
		Blok Cilengkrang (5,29 ha) dan blok awilwga (3,12 Ha), Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha, ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha, BTN. G. Ciremai	7	10	3	42,86	42,86
		Blok Pringtali (resort Bandalit, resort Andongrejo) SPTN Wilayah II ambul, BTN Meru Betiri	3	2	-1	-33,33	-33,33
		Blok Teparan (resort Sukamade, resort rejegwesi) SPTN Wilayah I sarongan, BTN Meru Betiri	3	6	3	100,00	100,00
		Plawangan-Turgo, BTN Merapi	2	7	4	133,33	133,33
		Tegal Mulyo, BTN Merapi	1				
		HL Petungkriyono, BKPH Doro, KPH Pekalongan Timur, Kab. Pekalongan	3	3	0	0,00	0,00
		Pos Moin (96,5 Ha), Waturaka (210 Ha), Wolojita (193 Ha) SPTN Wilayah ! Moni, BTN. Kelimutu	2	6	4	200,00	150,00
		Wolokoro (29,5 Ha), Okisobe (70 Ha) SPTN wilayah II Detusoko, BTN. Kelimutu	2	1	-1	-50,00	-50,00
		Senaru (130 Ha), Torean (130 Ha), Sembalun (130 Ha), Sajang (130 Ha), BTN. G. Rinjani	3	3	0	0,00	0,00
14	<b>Kakatua</b>	SM Harlu, BBKSDA NTT	35	47	12	34,29	34,29
		Pulau Manipo, BBKSDA NTT	8	35	27	337,50	150,00
		Pulau Masakambing, Kab. Sumenep, BBKSDA Jatim	23	24	1	4,35	4,35
		Pura Sedihing, BKSDA Bali	1	1	0	0,00	0,00
		Ai Manis, BTN NTB	32	38	6	18,75	18,75
		Brang Sedo, BTN NTB	73	76	3	4,11	4,11
		Brang Singa, BTN NTB	32	34	2	6,25	6,25
		Pulau Komodo, BTN. Komodo	524	773	91	14,09	14,09
		Pulau Rinca, BTN. Komodo	40				
		Pulau Bero, BTN. Komodo	82				
		Hoki-Hokio (8,5 Ha);Tali-Taliawa-Hukaea (8,2 Ha); pampaea (8,1 Ha), BTN. Rawa Aopa Watumohai	19	19	0	0,00	0,00
		Suaka Alam Gunung Sahuwai di kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku	187	3298	3111	1663,64	150,00
		Resort Binagara /Subaim (SPTN Wilayah III Subaim), kawasan hutan Akejawi	21	364	343	1633,33	150,00
		Resort Akejira/SPTN I Weda, Kawasan Hutan Wuekob	17	651	634	3729,41	150,00
		Resort Buli/SPTN II Maba/kawasan Hutan Uni-Uni	29	84	55	189,66	150,00
		CA. Pulau Waegio Timur, BBKSDA Papua Barat	140	20	-120	-85,71	-85,71
		Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I), BTN. Manusela	4	12	8	200,00	150,00
		Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II), BTN. Manusela	6	10	4	66,67	66,67
		Billa, BTN. Laiwangi Wanggameti	17	16	-1	-5,88	-5,88
		Praingkareha, BTN. Laiwangi Wanggameti	10	17	7	70,00	70,00
		Mahaniwa, BTN. Laiwangi Wanggameti	9	7	-2	-22,22	-22,22
15	<b>Macan Tutul Jawa</b>	Jublegan, resort PTN Tagellega, Seksi PTN Wilayah II Gedeh, Bidang PTN Wilayah I Cianjur, BBTN. G. Gede Pangrango	2	2	0	0,00	0,00

No	Satwa	Site monitoring	Baseline	2017 (jml)	Penurunan/ Peningkatan (jml)	Persentase 2017 (%)	%
		Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha, BTN. G. Ciremai	1	2	1	100,00	100,00
		Cikaniki, TNGHS	3	3	0	0,00	0,00
		Gunung Luhur (luas 975.5), TNGHS	3	3	0	0,00	0,00
		Wates Cisoka (luas 271.6), TNGHS	2	4	2	100,00	100,00
		Blok Pantai, Blok Parangkulon dan sekitarnya (resort Sukamade, SPTN Wilayah I Sarongan), BTN. Meru Betiri	1	3	2	200,00	150,00
		Resort Pancur, TN. Alas Purwo	4	4	0	0,00	0,00
		Blok Evergreen, Blok Sumur Tua dan sekitarnya (resort Bama, SPTN Wilayah I Bekol)	2	39	37	1850,00	150,00
16	Rusa Bawean	Blok Gunung Nangka (CA Pulau Bawean); blok Kumasala, Blok gunung batu, Blok Gunung Besar, Blok Tanah Poteh (SM Pulau Bawean), BBKSDA Jatim	275	311	36	13,09	13,09
17	Cendrawasih	Dusun Yakyu, BTN. Wasur	0	11	11	150,00	150,00
		Dusun Samleber, BTN. Wasur	4	2	-2	-50,00	-50,00
		Dusun Tabutar, BTN. Wasur	16	5	-11	-68,75	-68,75
		Dusun Yadri, BTN. Wasur	18	19	1	5,56	5,56
		Dusun Mbetnai, BTN. Wasur	6	5	-1	-16,67	-16,67
		CA Pulau Waigeo barat, BBKSDA Papua Barat	10	11	1	10,00	10,00
		Danau Haberna, Kabupaten Jayawijaya, BTN Lorentz	8	8	0	0,00	0,00
		Baraway, BBKSDA Papua	16	22	6	37,50	37,50
		Amay, BBKSDA Papua	9	10	1	11,11	11,11
18	Surili	Blok Sikendi (Jalur Pendakian Wekas), BTN. G. Merbabu	10	2	-8	0,00	0,00
		Blok Pandean (Jalur pendakian Selo), BTN. G. Merbabu	5	17	12	240,00	150,00
		Kawasan TN Gunung Ciremai (ekosistem dataran rendah 1.000 luas 4.531,09 Ha), ekosistem sub pegunungan (ketinggian 1.000-1.500 luas 4.885,52 Ha), ekosistem hutan pegunungan (ketinggian 1.500-2.400 luas 5.986,51 Ha, BTN. G. Ciremai	169	177	8	4,73	4,73
19	Tarsius	Sungai Pattanuang, luas 86,75 Ha, TN Babul	82	106	24	29,27	29,27
20	Monyet Hitam Sulawesi	Karaenta, BBKSDA Sulsel	31	36	5	16,13	16,13
		Mario, BBKSDA Sulsel	17	38	21	123,53	123,53
		Lejja, BBKSDA Sulsel	15	67	52	346,67	150,00
21	Julang sumba	Billa, BTN Laiwengi Wanggameti	10	16	6	60,00	60,00
22	Nuri kepala Hitam	Blok Hutan Ilie (Seksi PTN Wilayah I), BTN. Manusela	4	6	2	50,00	50,00
		Blok Hutan Waelomatan (Seksi PTN Wilayah II), BTN. Manusela	4	8	4	100,00	100,00
24	Penyu	Pulau Wairundi, BTN Teluk Cenderawasih	71	36	-35	-49,30	-49,30
		SPTN Wilayah I Tarupa, TN. Taka Bonerate, BTN. Taka Bonerate	135	12	-123	-91,11	-91,11
		Pulau Peteloran Barat, BTN. Kepri	1819	0	-1819	-100,00	-100,00
		Pulau Peteloran Timur, BTN. Kepri	2272	3782	1510	66,46	66,46
		Seluruh pulau di kawasan TN Karimunjawa	42	102	60	142,86	142,86
		Pantai Sukamade (resort Sukamade, SPTN Wilayah I Sarongan), BTN. Meru Betiri	2662	3368	706	26,52	26,52
25	Celepuk Rinjani	Senaru kembang Kuning, BTN. G. Rinjani	27	155	128	474,07	150,00
<b>Rata-rata % Peningkatan</b>							<b>36,40</b>

LAMPIRAN 5.

**DAFTAR KAWASAN KONSERVASI YANG DAPAT DILINDUNGI DARI ANCAMAN  
KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2017**

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
1	CA	CA Aek Liang Balik	Sumatera Utara	100211009	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	0,36
2	CA	CA Air Alas	Bengkulu	100211036	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	80,33
3	CA	CA Air Seblat	Bengkulu	100211037	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	89,76
4	CA	CA Bantarbolang	Jawa Tengah	100212079	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	24,56
5	CA	CA Baringin Sati	Sumatera Barat	100211014	Cagar Alam	BKSDA Sumatera Barat	0,03
6	CA	CA Batang Palupuh	Sumatera Barat	100211012	Cagar Alam	BKSDA Sumatera Barat	3,5
7	CA	CA Batang Pangean I	Sumatera Barat	100211224	Cagar Alam	BKSDA Sumatera Barat	27.093,20
8	CA	CA Batang Pangean II	Sumatera Barat	100211013	Cagar Alam	BKSDA Sumatera Barat	20.985,80
9	CA	CA Batu Gajah	Sumatera Utara	100211003	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	0,89
10	CA	CA Batu Ginurit	Sumatera Utara	100211004	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	0,48
11	CA	CA Batukahu I-III	Bali	100213228	Cagar Alam	BKSDA Bali	1.964,15
12	CA	CA Bekau Huhun	Maluku	100216191	Cagar Alam	BKSDA Maluku	46.023,30
13	CA	CA Bekutuk	Jawa Tengah	100212080	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	25,52
14	CA	CA Besowo Gadungan	Jawa Timur	100212109	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	6,11
15	CA	CA Biak Utara	Papua	100217213	Cagar Alam	BBKSDA Papua	5.662,31
16	CA	CA Bojong Larang Jayanti	Jawa Barat	100212053	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	733,91
17	CA	CA Bukit Barisan Selatan	Lampung	100211047	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	10.591,10
18	CA	CA Bukit Bungkok	Riau	100211018	Cagar Alam	BBKSDA Riau	13.972,70
19	CA	CA Bukit Sapat Hawung	Kalimantan Tengah	100214155	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Tengah	190.415,00
20	CA	CA Bukit Tangkiling	Kalimantan Tengah	100214153	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Tengah	282,16
21	CA	CA Bupul	Papua	100217214	Cagar Alam	BBKSDA Papua	83.440,50
22	CA	CA Cabak	Jawa Tengah	100212081	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	31,24
23	CA	CA Cadas Malang	Jawa Barat	100212054	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	19,87
24	CA	CA Ceding	Jawa Timur	100212110	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	4,64
25	CA	CA Cibanteng	Jawa Barat	100212055	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	467,53
26	CA	CA Cigenteng Cipanyi	Jawa Barat	100212056	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	18,79
27	CA	CA Curah Manis Sempolan I-VII	Jawa Timur	100212111	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	17,72
28	CA	CA Curug Bengkawah	Jawa Tengah	100212082	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	2,53
29	CA	CA Danau Dusun Besar	Bengkulu	100211038	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	614,7
30	CA	CA Danau Menghijau	Bengkulu	100211039	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	154,37
31	CA	CA Dolok Saut	Sumatera Utara	100211006	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	126,99
32	CA	CA Dolok Sibual-Buali	Sumatera Utara	100211008	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	5.021,19
33	CA	CA Dolok Sipirok	Sumatera Utara	100211007	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	7.220,15
34	CA	CA Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara	100211005	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	203,09
35	CA	CA Donoloyo	Jawa Tengah	100212083	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	9,43
36	CA	CA Dungus Iwul	Jawa Barat	100212057	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	9,22
37	CA	CA Durian Luncuk I	Jambi	100211022	Cagar Alam	Balai KSDA Jambi	74,24
38	CA	CA Durian Luncuk II	Jambi	100211023	Cagar Alam	Balai KSDA Jambi	48,73
39	CA	CA Enarotali	Papua	100217216	Cagar Alam	BBKSDA Papua	281.676,00
40	CA	CA Faruhumpenai	Sulawesi Selatan	100215179	Cagar Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	91.044,60
41	CA	CA Gebugan	Jawa Tengah	100212084	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	1,85
42	CA	CA Gua Nglirip	Jawa Timur	100212112	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	1,96
43	CA	CA Gunung Abang	Jawa Timur	100212113	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	51,79
44	CA	CA Gunung Ambang	Sulawesi Utara	100215165	Cagar Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	15.006,60
45	CA	CA Gunung Api Kisar	Maluku	100216192	Cagar Alam	BKSDA Maluku	79,86
46	CA	CA Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	100212107	Cagar Alam	BKSDA Yogyakarta	0,06
47	CA	CA Gunung Burangrang	Jawa Barat	100212058	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	3.075,85
48	CA	CA Gunung Butak	Jawa Tengah	100212085	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	48,2
49	CA	CA Gunung Celing	Jawa Tengah	100212086	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	1.365,93
50	CA	CA Gunung Dako	Sulawesi Tengah	100215172	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	19.734,80
51	CA	CA Gunung Dua Sudara	Sulawesi Utara	100215164	Cagar Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	7.270,06
52	CA	CA Gunung Jagat	Jawa Barat	100212059	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	135,37
53	CA	CA Gunung Kentawan	Kalimantan Selatan	100214156	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Selatan	249,95
54	CA	CA Gunung Lokon	Sulawesi Utara	100215166	Cagar Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	776,14
55	CA	CA Gunung Mutis	Nusa Tenggara Timur	100213138	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	12.668,00
56	CA	CA Gunung Papandayan	Jawa Barat	100212060	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	7.617,09
57	CA	CA Gunung Picis	Jawa Timur	100212114	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	29,97
58	CA	CA Gunung Raya Pasi	Kalimantan Barat	100214150	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Barat	3.289,04

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
59	CA	CA Gunung Sibela Pulau Obi	Maluku Utara	100216185	Cagar Alam	BKSDA Maluku	22.679,80
60	CA	CA Gunung Sigogor	Jawa Timur	100212115	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	194,89
61	CA	CA Gunung Simpang	Jawa Barat	100212061	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	14.983,10
62	CA	CA Gunung Sojol	Sulawesi Tengah	100215173	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	68.536,90
63	CA	CA Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	100212062	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	1.219,57
64	CA	CA Gunung Tilu	Jawa Barat	100212063	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	7.568,90
65	CA	CA Gunung Tinombala	Sulawesi Tengah	100215174	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	35.969,80
66	CA	CA Gunung Tukung Gede	Banten	100212049	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	1.128,48
67	CA	CA Hutan Bakau Maubesi	Nusa Tenggara Timur	100213141	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	3.268,43
68	CA	CA Hutan Bakau Pantai Timur	Jambi	100211025	Cagar Alam	BBKSDA Riau	5.101,67
69	CA	CA Imogiri	DI Yogyakarta	100212108	Cagar Alam	BKSDA Yogyakarta	12,06
70	CA	CA Janggangan Rogojampi I	Jawa Timur	100212116	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	5,06
71	CA	CA Janggangan Rogojampi II	Jawa Timur	100212117	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	2,54
72	CA	CA Janthoi	Aceh	100211001	Cagar Alam	BKSDA Aceh	15.474,30
73	CA	CA Jatinegara	Jawa Tengah	100212102	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	6,77
74	CA	CA Junghuhn	Jawa Barat	100212064	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	0,76
75	CA	CA Kakenauwe	Sulawesi Tenggara	100215182	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tenggara	819,37
76	CA	CA Kalaena	Sulawesi Selatan	100215180	Cagar Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	109,07
77	CA	CA Karang Bolong	Jawa Tengah	100212087	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	0,01
78	CA	CA Karimata	Kalimantan Barat	100214152	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Barat	191.179,00
79	CA	CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	Jawa Timur	100212118	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Timur	2.642,99
80	CA	CA Kawah Kamojang	Jawa Barat	100212065	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	4.319,56
81	CA	CA Kecubung Ulo Lanang	Jawa Tengah	100212088	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	84,59
82	CA	CA Keling I	Jawa Tengah	100212089	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	8,73
83	CA	CA Keling II/III	Jawa Tengah	100212090	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	58,15
84	CA	CA Kemang Boleng I	Nusa Tenggara Timur	100213139	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	158,49
85	CA	CA Kemang Boleng II	Nusa Tenggara Timur	100213140	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	827,12
86	CA	CA Kembang	Jawa Tengah	100212091	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	1,75
87	CA	CA kepulauan Krakatau	Lampung	100251004	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	11.771,40
88	CA	CA Kioyo I dan II	Bengkulu	100211040	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	761,16
89	CA	CA Lamedae	Sulawesi Tenggara	100215183	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tenggara	643,85
90	CA	CA Lembah Anai	Sumatera Barat	100211015	Cagar Alam	BKSDA Sumatera Barat	276,69
91	CA	CA Lembah Harau	Sumatera Barat	100211016	Cagar Alam	BKSDA Sumatera Barat	284,71
92	CA	CA Leuweung Sancang	Jawa Barat	100212066	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	3.389,92
93	CA	CA Lifamatola	Maluku Utara	100216186	Cagar Alam	BKSDA Maluku	2.076,93
94	CA	CA Lo Pat Foen Pi	Kalimantan Barat	100214148	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Barat	7,95
95	CA	CA Lubuk Raya	Sumatera Utara	100211223	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	2.985,76
96	CA	CA Malabar	Jawa Barat	100212067	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	29,33
97	CA	CA Mandor	Kalimantan Barat	100214149	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Barat	2.879,09
98	CA	CA Manggis Gadungan	Jawa Timur	100212119	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	13,61
99	CA	CA Maninjau	Sumatera Barat	100211225	Cagar Alam	BKSDA Sumatera Barat	21.900,80
100	CA	CA Martelu Purba	Sumatera Utara	100211010	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	205,02
101	CA	CA Mas Popaya Raja	Gorontalo	100215168	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Utara	152,96
102	CA	CA Moga	Jawa Tengah	100212092	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	3,95
103	CA	CA Morowali	Sulawesi Tengah	100215175	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	213.617,00
104	CA	CA Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur	100214160	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Timur	65.355,70
105	CA	CA Muara Kendawangan	Kalimantan Barat	100214151	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Barat	148.217,00
106	CA	CA Muko-muko	Bengkulu	100211222	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	101,49
107	CA	CA Napabalano	Sulawesi Tenggara	100215184	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tenggara	11,23
108	CA	CA Ndeti Kelikima	Nusa Tenggara Timur	100213142	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	1.002,19
109	CA	CA Nusa Gede Panjalu	Jawa Barat	100212068	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	8,76
110	CA	CA Nusakambangan Barat	Jawa Tengah	100212093	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	667,78
111	CA	CA Nusakambangan Timur	Jawa Tengah	100212094	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	214,74
112	CA	CA Nyiut Penrisen	Kalimantan Barat	100214147	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Barat	91.827,90
113	CA	CA Padang Luway	Kalimantan Timur	100214161	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Timur	4.786,95
114	CA	CA Pagar Gunung I	Bengkulu	100211027	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	5,81
115	CA	CA Pagar Gunung II	Bengkulu	100211028	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	2,44
116	CA	CA Pagar Gunung III	Bengkulu	100211029	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	0,29
117	CA	CA Pagar Gunung IV	Bengkulu	100211030	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	0,23
118	CA	CA Pagar Gunung V	Bengkulu	100211031	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	0,1
119	CA	CA Pager Wunung Darupono	Jawa Tengah	100212095	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	34,55
120	CA	CA Pamona	Sulawesi Tengah	100215176	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	27.343,00

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
121	CA	CA Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	100212069	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	872,87
122	CA	CA Pancur Ijen I	Jawa Timur	100212120	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	2,01
123	CA	CA Pancur Ijen II	Jawa Timur	100212121	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	1,96
124	CA	CA Pangi Binangga	Sulawesi Tengah	100215177	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	6.151,78
125	CA	CA Pantai Sausafor	Papua Barat	100217211	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	1.326,36
126	CA	CA Pantodomas	Jawa Tengah	100212096	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	4,3
127	CA	CA Panua	Gorontalo	100215169	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Utara	36.601,70
128	CA	CA Pararawen I dan II	Kalimantan Tengah	100214154	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Tengah	5.925,28
129	CA	CA Pasar Ngalam	Bengkulu	100211041	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	295,53
130	CA	CA Pasar Seluma	Bengkulu	100211042	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	206,08
131	CA	CA Pasar Talo	Bengkulu	100211043	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	413,52
132	CA	CA Pedauh	Nusa Tenggara Barat	100213133	Cagar Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	523,53
133	CA	CA Pegunungan Arfak	Papua Barat	100217199	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	83.308,60
134	CA	CA Pegunungan Cycloops	Papua	100217215	Cagar Alam	BBKSDA Papua	31.563,50
135	CA	CA Pegunungan Fakfak	Papua Barat	100217200	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	33.217,50
136	CA	CA Pegunungan Kumawa	Papua Barat	100217198	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	129.455,00
137	CA	CA Pegunungan Tamrau Selatan	Papua Barat	100217206	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	475.293,00
138	CA	CA Pegunungan Tamrau Utara	Papua Barat	100217207	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	355.693,00
139	CA	CA Pegunungan Wayland	Papua	100217217	Cagar Alam	BBKSDA Papua	137.899,00
140	CA	CA Pegunungan Wondiboy	Papua Barat	100217201	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	72.119,60
141	CA	CA Peson Subah I	Jawa Tengah	100212097	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	9,86
142	CA	CA Peson Subah II	Jawa Tengah	100212098	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	10,77
143	CA	CA Pombo	Maluku	100216196	Cagar Alam	BKSDA Maluku	6,95
144	CA	CA Ponda-ponda	Sulawesi Selatan	100215181	Cagar Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	81,41
145	CA	CA Pringombo I	Jawa Tengah	100212099	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	10,84
146	CA	CA Pringombo II	Jawa Tengah	100212100	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	54,85
147	CA	CA Pulau Angwarmase	Maluku	100216193	Cagar Alam	BKSDA Maluku	301,83
148	CA	CA Pulau Batanta Barat	Papua Barat	100217202	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	16.984,50
149	CA	CA Pulau Bawean	Jawa Timur	100212122	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	615,31
150	CA	CA Pulau Berkeh	Riau	100211019	Cagar Alam	BBKSDA Riau	7.454,77
151	CA	CA Pulau Bokor	DKI Jakarta	100212052	Cagar Alam	BKSDA DKI Jakarta	18,46
152	CA	CA Pulau Dua	Banten	100212050	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	34,92
153	CA	CA Pulau Kofiau	Papua Barat	100217203	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	14.262,40
154	CA	CA Pulau Misool	Papua Barat	100217204	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	115.894,00
155	CA	CA Pulau Noko	Jawa Timur	100212123	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	49,57
156	CA	CA Pulau Nusa	Jawa Timur	100212124	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	3,25
157	CA	CA Pulau Nustaram	Maluku	100216194	Cagar Alam	BKSDA Maluku	2.532,15
158	CA	CA Pulau Nuswotar	Maluku	100216195	Cagar Alam	BKSDA Maluku	2.215,76
159	CA	CA Pulau Obi	Maluku Utara	100216187	Cagar Alam	BKSDA Maluku	16.143,90
160	CA	CA Pulau Salawati Utara	Papua Barat	100217205	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	62.503,20
161	CA	CA Pulau Sangiang	Nusa Tenggara Barat	100213135	Cagar Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	8.140,76
162	CA	CA Pulau Seho	Maluku Utara	100216188	Cagar Alam	BKSDA Maluku	1.328,24
163	CA	CA Pulau Sempu	Jawa Timur	100212127	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	1.003,40
164	CA	CA Pulau Supiori	Papua	100217219	Cagar Alam	BBKSDA Papua	38.756,80
165	CA	CA Rawa Danau	Banten	100212051	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	3.996,16
166	CA	CA Rimbo Panti	Sumatera Barat	100211017	Cagar Alam	BKSDA Sumatera Barat	925,44
167	CA	CA Riung	Nusa Tenggara Timur	100213143	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	915,89
168	CA	CA Saobi	Jawa Timur	100212126	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	443,44
169	CA	CA Sepakung	Jawa Tengah	100212101	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	10,67
170	CA	CA Serbojadi	Aceh	100211002	Cagar Alam	BKSDA Aceh	313,49
171	CA	CA Sibolangit	Sumatera Utara	100211011	Cagar Alam	BBKSDA Sumatera Utara	94,95
172	CA	CA Sukawayana	Jawa Barat	100212070	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	32,87
173	CA	CA Sungai Bahewo	Bengkulu	100211044	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	662,33
174	CA	CA Sungai Batara	Jambi	100211026	Cagar Alam	Balai Konservasi SumberDaya Alam Jambi	660,33
175	CA	CA Sungai Bulan dan Sungai Lulan	Kalimantan Selatan	100214159	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Selatan	3.055,83
176	CA	CA Sungai Kolbu Iyang Plateau	Jawa Timur	100257033	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	19,12
177	CA	CA Taba Pananjung I	Bengkulu	100211032	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	2,04
178	CA	CA Taba Pananjung II	Bengkulu	100211033	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	1,71
179	CA	CA Takokak	Jawa Barat	100212071	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	60,99
180	CA	CA Talaga Bodas	Jawa Barat	100212073	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	252,88
181	CA	CA Talang Ulu I	Bengkulu	100211034	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	0,55
182	CA	CA Talang Ulu II	Bengkulu	100211035	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	0,06

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
183	CA	CA Taliabu	Maluku Utara	100216190	Cagar Alam	BKSDA Maluku	9.729,84
184	CA	CA Tangale	Gorontalo	100215170	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Utara	100,54
185	CA	CA Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	Jawa Barat	100212072	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	12,49
186	CA	CA Tanjung Api	Sulawesi Tengah	100215178	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	3.306,56
187	CA	CA Tanjung Laksaha	Bengkulu	100211045	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	359,96
188	CA	CA Tanjung Panjang	Gorontalo	100215171	Cagar Alam	BKSDA Sulawesi Utara	3.129,48
189	CA	CA Tanjung Sial	Maluku	100216197	Cagar Alam	BKSDA Maluku	4.833,88
190	CA	CA Tanjung Wiay	Papua	100217220	Cagar Alam	BBKSDA Papua	4.414,14
191	CA	CA Telaga Patengan	Jawa Barat	100212074	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	123,04
192	CA	CA Telaga Warna	Jawa Barat	100212075	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	498,01
193	CA	CA Telogo Dringo	Jawa Tengah	100212104	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	29,09
194	CA	CA Telogo Ranjeng	Jawa Tengah	100212103	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	54,42
195	CA	CA Telogo Sumurup	Jawa Tengah	100212105	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	20,28
196	CA	CA Teluk Adang	Kalimantan Timur	100214163	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Timur	59.744,60
197	CA	CA Teluk Apar	Kalimantan Timur	100214162	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Timur	50.102,60
198	CA	CA Teluk Bintuni	Papua Barat	100217208	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	106.828,00
199	CA	CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	Kalimantan Selatan	100214157	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Selatan	59.085,00
200	CA	CA Teluk Klowe	Bengkulu	100211221	Cagar Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	687,09
201	CA	CA Teluk Pamukan	Kalimantan Selatan	100214158	Cagar Alam	BKSDA Kalimantan Selatan	21.322,70
202	CA	CA Tobalai	Maluku Utara	100216189	Cagar Alam	BKSDA Maluku	3.551,63
203	CA	CA Toffo Kota Lambu	Nusa Tenggara Barat	100213134	Cagar Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	3.447,26
204	CA	CA Torobi	Papua Barat	100217221	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	2.325,58
205	CA	CA Wae Wuul	Nusa Tenggara Timur	100213144	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	60.945,50
206	CA	CA Wagura Kote	Papua Barat	100217210	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	19.332,90
207	CA	CA Waigeo Barat	Papua Barat	100217227	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	97.878,90
208	CA	CA Waigeo Timur	Papua Barat	100217226	Cagar Alam	BBKSDA Papua Barat	105.758,00
209	CA	CA Watangan Puger	Jawa Timur	100212129	Cagar Alam	BKSDA Jawa Timur	3,28
210	CA	CA Watu Ata	Nusa Tenggara Timur	100213145	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	4.436,03
211	CA	CA Wijaya Kusuma	Jawa Tengah	100212106	Cagar Alam	BKSDA Jawa Tengah	0,04
212	CA	CA Wolo Tado	Nusa Tenggara Timur	100213146	Cagar Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	4.364,56
213	CA	CA Yanlapa	Jawa Barat	100212076	Cagar Alam	BBKSDA Jawa Barat	35,62
214	CA	CA Yapen Tengah	Papua	100217218	Cagar Alam	BBKSDA Papua	112.873,00
215	KSA/KPA	KSA/KPA Asam-asam	Kalimantan Selatan	100204034	KSA/KPA	BKSDA Kalimantan Selatan	514,38
216	KSA/KPA	KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG II)	Kalimantan Tengah	100204029	KSA/KPA	BKSDA Kalimantan Tengah	10.601,80
217	KSA/KPA	KSA/KPA Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	Jambi	100201048	KSA/KPA	Balai KSDA Jambi	456,03
218	KSA/KPA	KSA/KPA Calon Tahura Mesawa	Sulawesi Barat	100205038	KSA/KPA	BKSDA Sulawesi Selatan	988,35
219	KSA/KPA	KSA/KPA Daab	Maluku	100206039	KSA/KPA	BKSDA Maluku	18.174,90
220	KSA/KPA	KSA/KPA Danau Tihu	Maluku	100206045	KSA/KPA	BKSDA Maluku	5.925,06
221	KSA/KPA	KSA/KPA Danuera	Nusa Tenggara Barat	100203053	KSA/KPA	BKSDA Nusa Tenggara Barat	1.823,43
222	KSA/KPA	KSA/KPA Gunung Kijang	Kepulauan Riau	100201050	KSA/KPA	BBKSDA Riau	462,94
223	KSA/KPA	KSA/KPA Gunung Lengkuas	Kepulauan Riau	100201051	KSA/KPA	BBKSDA Riau	689,16
224	KSA/KPA	KSA/KPA Gunung Sahuwai	Maluku	100206040	KSA/KPA	BKSDA Maluku	18.395,50
225	KSA/KPA	KSA/KPA Hutan Pendidikan Tuan Wowi	Papua	100207046	KSA/KPA	BBKSDA Papua	9.087,96
226	KSA/KPA	KSA/KPA Jereweh	Nusa Tenggara Barat	100203027	KSA/KPA	BKSDA Nusa Tenggara Barat	4.103,73
227	KSA/KPA	KSA/KPA Mahato	Riau	100201019	KSA/KPA	BBKSDA Riau	1.353,99
228	KSA/KPA	KSA/KPA Mapia	Papua	100207047	KSA/KPA	BBKSDA Papua	332,91
229	KSA/KPA	KSA/KPA Marang (Eks PLG I)	Kalimantan Tengah	100204028	KSA/KPA	BKSDA Kalimantan Tengah	1.759,65
230	KSA/KPA	KSA/KPA Pulau Kerasian, Kerayaan dan Kerumputan	Kalimantan Selatan	100204058	KSA/KPA	BKSDA Kalimantan Selatan	440,72
231	KSA/KPA	KSA/KPA Pulau Larat	Maluku	100206043	KSA/KPA	BKSDA Maluku	4.601,49
232	KSA/KPA	KSA/KPA Rawa Kandis	Lampung	100201026	KSA/KPA	BKSDA Bengkulu Lampung	1.382,87
233	KSA/KPA	KSA/KPA Sei Ledong	Sumatera Utara	100201005	KSA/KPA	BBKSDA Sumatera Utara	423,66
234	KSA/KPA	KSA/KPA Sisimeni Sanam	Nusa Tenggara Timur	100203060	KSA/KPA	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	4.000,31
235	KSA/KPA	KSA/KPA Sungai Barito	Kalimantan Tengah	100204055	KSA/KPA	BKSDA Kalimantan Tengah	60.811,30
236	KSA/KPA	KSA/KPA Sungai Kapuas	Kalimantan Tengah	100204056	KSA/KPA	BKSDA Kalimantan Tengah	86.571,10
237	KSA/KPA	KSA/KPA Sungai Niff	Maluku	100206044	KSA/KPA	BKSDA Maluku	1.220,36
238	KSA/KPA	KSA/KPA Sungai Pulai	Kepulauan Riau	100201052	KSA/KPA	BBKSDA Riau	71,84
239	KSA/KPA	KSA/KPA Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	Jambi	100201049	KSA/KPA	BKSDA Jambi	717,71
240	KSA/KPA	KSA/KPA Tafermaar	Maluku	100206042	KSA/KPA	BKSDA Maluku	2.971,92

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
241	KSA/KPA	KSA/KPA Tanjung Malatayur	Kalimantan Tengah	100204057	KSA/KPA	BKSDA Kalimantan Tengah	65.246,40
242	KSA/KPA	KSA/KPA Tanjung Pengharapan - Sungai Embung	Kalimantan Selatan	100204059	KSA/KPA	BKSDA Kalimantan Selatan	1.234,24
243	KSA/KPA	KSA/KPA Pulau Panjang	Nusa Tenggara Barat	100203054	KSA/KPA	BKSDA Nusa Tenggara Barat	1.699,21
244	SM	SM Ale Aisio	Nusa Tenggara Timur	100223038	Suaka Margasatwa	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	5.605,13
245	SM	SM Arau Hilir dan Air Tarusan	Sumatera Barat	100221077	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Barat	90.888,00
246	SM	SM Bakiriang	Sulawesi Tengah	100225048	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tengah	11.488,90
247	SM	SM Balai Raja	Riau	100221006	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	15.339,70
248	SM	SM Barisan	Sumatera Barat	100221078	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Barat	4.143,72
249	SM	SM Barumon	Sumatera Utara	100221002	Suaka Margasatwa	BBKSDA Sumatera Utara	40.068,30
250	SM	SM Bentayan	Sumatera Selatan	100221017	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Selatan	23.684,90
251	SM	SM Bukit Batu	Riau	100221007	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	21.641,70
252	SM	SM Bukit Rimbang Bukit Baling	Riau	100221008	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	141.651,00
253	SM	SM Buton Utara	Sulawesi Tenggara	100225055	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tenggara	91.812,40
254	SM	SM Cikepuh	Jawa Barat	100222025	Suaka Margasatwa	BBKSDA Jawa Barat	8.261,62
255	SM	SM Danau Bian	Papua	100227069	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua	112.317,00
256	SM	SM Danau Tuadale	Nusa Tenggara Timur	100223036	Suaka Margasatwa	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	980,6
257	SM	SM Dangku	Sumatera Selatan	100221018	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Selatan	48.095,60
258	SM	SM Dataran Tinggi Yang	Jawa Timur	100222031	Suaka Margasatwa	BKSDA Jawa Timur	13.438,60
259	SM	SM Dolok Surungan	Sumatera Utara	100221003	Suaka Margasatwa	BBKSDA Sumatera Utara	21.541,30
260	SM	SM Egon Ilmedo	Nusa Tenggara Timur	100223081	Suaka Margasatwa	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	1.734,65
261	SM	SM Giam Siak Kecil	Riau	100221010	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	78.287,60
262	SM	SM Gumai Pasemah	Sumatera Selatan	100221019	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Selatan	48.177,00
263	SM	SM Gunung Manembo-nembo	Sulawesi Utara	100225044	Suaka Margasatwa	BBKSDA Sulawesi Selatan	6.187,35
264	SM	SM Gunung Raya	Sumatera Selatan	100221020	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Selatan	45.339,60
265	SM	SM Gunung Sawal	Jawa Barat	100222026	Suaka Margasatwa	BBKSDA Jawa Barat	5.620,33
266	SM	SM Gunung Tunggangan	Jawa Tengah	100222028	Suaka Margasatwa	BKSDA Jawa Tengah	104,33
267	SM	SM Harlu	Nusa Tenggara Timur	100223035	Suaka Margasatwa	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	2.315,05
268	SM	SM Isau-isau Pasemah	Sumatera Selatan	100221021	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Selatan	16.826,50
269	SM	SM Karakelang	Sulawesi Utara	100225083	Suaka Margasatwa	BBKSDA Sulawesi Selatan	28.859,80
270	SM	SM Karang Gading Langkat Timur Laut	Sumatera Utara	100221004	Suaka Margasatwa	BBKSDA Sumatera Utara	13.474,00
271	SM	SM Kateri	Nusa Tenggara Timur	100223034	Suaka Margasatwa	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	4.674,36
272	SM	SM Kerumutan	Riau	100221011	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	94.694,80
273	SM	SM Komara	Sulawesi Selatan	100225054	Suaka Margasatwa	BBKSDA Sulawesi Selatan	4.029,49
274	SM	SM Kuala Lupak	Kalimantan Selatan	100224041	Suaka Margasatwa	BKSDA Kalimantan Selatan	3.196,24
275	SM	SM Lamandau	Kalimantan Tengah	100224039	Suaka Margasatwa	BKSDA Kalimantan Tengah	61.610,90
276	SM	SM Lambusango	Sulawesi Tenggara	100225056	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tenggara	27.840,30
277	SM	SM Lombuyan	Sulawesi Tengah	100225049	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tengah	2.966,37
278	SM	SM Malampah Alahan Panjang	Sumatera Barat	100221076	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Barat	39.189,50
279	SM	SM Masbait	Maluku	100226084	Suaka Margasatwa	BKSDA Maluku	6.872,59
280	SM	SM Memberamo Foja	Papua	100227071	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua	1.772.560,00
281	SM	SM Muara Angke	DKI Jakarta	100222023	Suaka Margasatwa	BKSDA DKI Jakarta	24,58
282	SM	SM Mubrani - Kaironi	Papua Barat	100227065	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua Barat	191,6
283	SM	SM Nantu	Gorontalo	100225047	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Utara	51.710,00
284	SM	SM Padang Sugihan	Sumatera Selatan	100221022	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Selatan	88.447,40
285	SM	SM Pagai Selatan	Sumatera Barat	100221079	Suaka Margasatwa	BKSDA Sumatera Barat	2.808,46
286	SM	SM Paliyan	DI Yogyakarta	100222029	Suaka Margasatwa	BKSDA Yogyakarta	443,49
287	SM	SM Pati-pati	Sulawesi Tengah	100225050	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tengah	3.069,66
288	SM	SM Pegunungan Jayawijaya	Papua	100227072	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua	788.871,00
289	SM	SM Perhatu	Nusa Tenggara Timur	100223037	Suaka Margasatwa	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	469,3
290	SM	SM Pinjan (Tanjung Matop)	Sulawesi Tengah	100225051	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tengah	1.788,08
291	SM	SM Pleihari Tanah Laut	Kalimantan Selatan	100224042	Suaka Margasatwa	BKSDA Kalimantan Selatan	6.717,91
292	SM	SM PLG Sebanga	Riau	100221012	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	5.729,75
293	SM	SM Pulau Baun	Maluku	100226060	Suaka Margasatwa	BKSDA Maluku	9.904,11
294	SM	SM Pulau Bawean	Jawa Timur	100222032	Suaka Margasatwa	BKSDA Jawa Timur	3.958,80
295	SM	SM Pulau Dolangan	Sulawesi Tengah	100225052	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tengah	159,3
296	SM	SM Pulau Dolok	Papua	100227073	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua	722.660,00
297	SM	SM Pulau Kaget	Kalimantan Selatan	100224040	Suaka Margasatwa	BKSDA Kalimantan Selatan	293,15
298	SM	SM Pulau Kasa	Maluku	100226064	Suaka Margasatwa	BKSDA Maluku	53,28
299	SM	SM Pulau Kobror	Maluku	100226061	Suaka Margasatwa	BKSDA Maluku	58.137,00
300	SM	SM Pulau Komolon	Papua	100227074	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua	69.733,30

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
301	SM	SM Pulau Manuk	Maluku	100226063	Suaka Margasatwa	BKSDA Maluku	103,56
302	SM	SM Pulau Nusa Barung	Jawa Timur	100222080	Suaka Margasatwa	BKSDA Jawa Timur	8.047,89
303	SM	SM Pulau Pombo	Papua	100256115	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua	185,11
304	SM	SM Pulau Rambut	DKI Jakarta	100222024	Suaka Margasatwa	BKSDA DKI Jakarta	93,67
305	SM	SM Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	Papua Barat	100227068	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua Barat	16.841,60
306	SM	SM Pulau Semama	Kalimantan Timur	100224043	Suaka Margasatwa	BKSDA Kalimantan Timur	220,48
307	SM	SM Pulau Venu	Papua Barat	100227067	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua Barat	18,16
308	SM	SM Rawa Singkil	Aceh	100221001	Suaka Margasatwa	BKSDA Aceh	81.630,20
309	SM	SM Savan	Papua	100227075	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua	7.056,51
310	SM	SM Sermo	DI Yogyakarta	100222030	Suaka Margasatwa	BKSDA Yogyakarta	188,57
311	SM	SM Sidei Wibain	Papua Barat	100227066	Suaka Margasatwa	BBKSDA Papua Barat	177,33
312	SM	SM Sindangkerta	Jawa Barat	100222027	Suaka Margasatwa	BBKSDA Jawa Barat	86,51
313	SM	SM Siranggag	Sumatera Utara	100221005	Suaka Margasatwa	BBKSDA Sumatera Utara	5.631,78
314	SM	SM Tanimbar	Maluku	100226062	Suaka Margasatwa	BKSDA Maluku	65.807,30
315	SM	SM Tanjung Amolengo	Sulawesi Tenggara	100225057	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tenggara	623,7
316	SM	SM Tanjung Batikolo	Sulawesi Tenggara	100225058	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tenggara	3.930,87
317	SM	SM Tanjung Peropa	Sulawesi Tenggara	100225059	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tenggara	39.717,40
318	SM	SM Tanjung Santigi	Sulawesi Tengah	100225053	Suaka Margasatwa	BKSDA Sulawesi Tengah	1.840,03
319	SM	SM Tasik Belat	Riau	100221013	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	2.519,01
320	SM	SM Tasik Besar (Serkap)	Riau	100221014	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	5.039,63
321	SM	SM Tasik Serkap (Tasik Sarang Burung)	Riau	100221015	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	6.668,68
322	SM	SM Tasik Tanjung Padang	Riau	100221016	Suaka Margasatwa	BBKSDA Riau	5.288,74
323	TB	TB Dataran Bena	Nusa Tenggara Timur	100233009	Taman Buru	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	1.865,48
324	TB	TB Gunung Nanu'ua	Bengkulu	100231004	Taman Buru	BKSDA Bengkulu Lampung	7.799,78
325	TB	TB Komara	Sulawesi Selatan	100235012	Taman Buru	BBKSDA Sulawesi Selatan	2.725,33
326	TB	TB Landusa Tomata	Sulawesi Tengah	100235011	Taman Buru	BKSDA Sulawesi Tengah	4.053,20
327	TB	TB Lingga Isaq	Aceh	100231001	Taman Buru	BKSDA Aceh	86.796,10
328	TB	TB Masigit Kareumbi	Jawa Barat	100232006	Taman Buru	BBKSDA Jawa Barat	12.703,50
329	TB	TB Pulau Moyo	Nusa Tenggara Barat	100233008	Taman Buru	BKSDA Nusa Tenggara Barat	26.121,00
330	TB	TB Pulau Ndana	Nusa Tenggara Timur	100233010	Taman Buru	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	1.472,78
331	TB	TB Pulau Pini	Sumatera Utara	100231002	Taman Buru	BBKSDA Sumatera Utara	8.230,06
332	TB	TB Pulau Rempang	Kepulauan Riau	100231003	Taman Buru	BBKSDA Riau	10.223,10
333	TB	TB Semidang Bukit Kabu	Bengkulu	100231005	Taman Buru	BKSDA Bengkulu Lampung	9.259,67
334	Tahura	Tahura Abdul Latief (Sinjai)	Sulawesi Selatan	100265024	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Sulawesi Selatan	745,82
335	Tahura	Tahura Banten	Banten	100262010	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Banten	1.615,93
336	Tahura	Tahura Bontobahari	Sulawesi Selatan	100265025	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Sulawesi Selatan	3.515,16
337	Tahura	Tahura Bukit Barisan	Sumatera Utara	100261002	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Sumatera Utara	39.944,40
338	Tahura	Tahura Bukit Rabang - Gluguran	Bengkulu	100261007	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Bengkulu	588,99
339	Tahura	Tahura Bukit Soeharto	Kalimantan Timur	100264021	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Kalimantan Timur	64.865,00
340	Tahura	Tahura Dr. Muhammad Hatta	Sumatera Barat	100261003	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Sumatera Barat	30,88
341	Tahura	Tahura Gunung Bunder	DI Yogyakarta	100262015	Taman Hutan Raya	Pemda Prov DI Yogyakarta	627,4
342	Tahura	Tahura Gunung Lalang	Kepulauan Bangka Belitung	100261030	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Kepulauan Bangka Belitung	2.559,69
343	Tahura	Tahura Gunung Mangkol	Kepulauan Bangka Belitung	100261031	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Kepulauan Bangka Belitung	6.021,13
344	Tahura	Tahura Gunung Menumbing	Kepulauan Bangka Belitung	100261032	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Kepulauan Bangka Belitung	3.339,90
345	Tahura	Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	Jawa Barat	100262013	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Jawa Barat	35,31
346	Tahura	Tahura Gunung Tumpa (Haweworang)	Sulawesi Utara	100265034	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Sulawesi Utara	208,91
347	Tahura	Tahura Ir. H. Juanda	Jawa Barat	100262011	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Jawa Barat	535,23
348	Tahura	Tahura KGPA Mangkunegoro I (Ngargoyoso)	Jawa Tengah	100262014	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Jawa Tengah	254,32
349	Tahura	Tahura Lapak Jaru	Kalimantan Tengah	100264033	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Kalimantan Tengah	4.119,81
350	Tahura	Tahura Lati Petangis	Kalimantan Timur	100264022	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Kalimantan Timur	3.451,80
351	Tahura	Tahura Murhum (Nipa-nipa)	Sulawesi Tenggara	100265026	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Sulawesi Tenggara	7.892,78
352	Tahura	Tahura Ngurah Rai	Bali	100263017	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Bali	1.106,61
353	Tahura	Tahura Nuraksa	Nusa Tenggara Barat	100263018	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Nusa Tenggara Barat	2.797,73
354	Tahura	Tahura Pancoran Mas	Jawa Barat	100262012	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Jawa Barat	7
355	Tahura	Tahura Pocut Meurah Intan	Aceh	100261001	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Aceh	6.255,56
356	Tahura	Tahura Prof. Ir. Herman Johannes	Nusa Tenggara Timur	100263019	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Nusa Tenggara Timur	2.007,03
357	Tahura	Tahura R. Soeryo	Jawa Timur	100262016	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Jawa Timur	28.160,30
358	Tahura	Tahura Rajo Lelo (Pungguk Menakat)	Bengkulu	100261008	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Bengkulu	1.165,00

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
359	Tahura	Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)	Jambi	100261005	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Jambi	18.271,70
360	Tahura	Tahura Simeulue	Aceh	100261027	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Aceh	919,57
361	Tahura	Tahura Subulussalam	Aceh	100261028	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Aceh	1.489,40
362	Tahura	Tahura Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	100265023	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Sulawesi Tengah	7.326,21
363	Tahura	Tahura Sultan Adam	Kalimantan Selatan	100264020	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Kalimantan Selatan	116.547,00
364	Tahura	Tahura Sultan Syarif Kasim (Minas)	Riau	100261004	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Riau	6.451,80
365	Tahura	Tahura Sultan Thaha Syaifuddin	Jambi	100261006	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Jambi	15.924,80
366	Tahura	Tahura Wan Abdul Rahman	Lampung	100261009	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Lampung	21.915,40
367	TN	TN Aketajawe Lolobata	Maluku Utara	100246046	Taman Nasional	BTN Aketajawe Lolobata	163.592,00
368	TN	TN Alas Purwo	Jawa Timur	100242023	Taman Nasional	BTN Alas Purwo	45.069,60
369	TN	TN Bali Barat	Bali	100243024	Taman Nasional	BTN Bali Barat	18.414,90
370	TN	TN Baluran	Jawa Timur	100242020	Taman Nasional	BTN Baluran	30.266,10
371	TN	TN Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	100245042	Taman Nasional	BTN Bantimurung Bulusaraung	43.741,00
372	TN	TN Batang Gadis	Sumatera Utara	100241002	Taman Nasional	BTN Batang Gadis	72.714,30
373	TN	TN Berbak	Jambi	100241007	Taman Nasional	BTN Berbak Sembilang	141.432,00
374	TN	TN Betung Kerihun	Kalimantan Barat	100244032	Taman Nasional	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	817.678,00
375	TN	TN Bogani Nani Wartabone	Gorontalo	100245039	Taman Nasional	BTN Bogani Nani Wartabone	283.429,00
376	TN	TN Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	100242021	Taman Nasional	BBTN Bromo Tengger Semeru	51.493,00
377	TN	TN Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat	100244033	Taman Nasional	BTN Bukit Baka-Bukit Raya	236.677,00
378	TN	TN Bukit Barisan Selatan	Lampung	100241010	Taman Nasional	BBTN Bukit Barisan Selatan	318.267,00
379	TN	TN Bukit Dua Belas	Jambi	100241008	Taman Nasional	BTN Bukit Duabelas	54.792,00
380	TN	TN Bukit Tiga Puluh	Riau	100241005	Taman Nasional	BTN Bukit Tigapuluh	144.223,00
381	TN	TN Bunaken	Sulawesi Utara	100245038	Taman Nasional	BTN Bunaken	74.001,50
382	TN	TN Danau Sentarum	Kalimantan Barat	100244030	Taman Nasional	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	127.640,00
383	TN	TN Gandang Dewata	Sulawesi Barat	100245054	Taman Nasional	BBKSDA Sulawesi Selatan	213.962,00
384	TN	TN Gunung Ciremai	Jawa Barat	100242016	Taman Nasional	BTN Gunung Ciremai	15.044,10
385	TN	TN Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	100242015	Taman Nasional	BBTN Gunung Gede Pangrango	24.619,60
386	TN	TN Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	100242014	Taman Nasional	BTN Gunung Halimun Salak	88.922,20
387	TN	TN Gunung Leuser	Sumatera Utara	100241001	Taman Nasional	BBTN Gunung Leuser	833.546,00
388	TN	TN Gunung Maras	Kepulauan Bangka Belitung	100241052	Taman Nasional	BKSDA Sumatera Selatan	16.887,20
389	TN	TN Gunung Merapi	DI Yogyakarta	100242019	Taman Nasional	BTN Gunung Merapi	6.559,16
390	TN	TN Gunung Merbabu	Jawa Tengah	100242017	Taman Nasional	BTN Gunung Merbabu	5.923,50
391	TN	TN Gunung Palung	Kalimantan Barat	100244031	Taman Nasional	BTN Gunung Palung	108.245,00
392	TN	TN Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	100243025	Taman Nasional	BTN Gunung Rinjani	39.049,30
393	TN	TN Gunung Tambora	Nusa Tenggara Barat	100243053	Taman Nasional	BTN Gunung Tambora	80.383,00
394	TN	TN Karimunjawa	Jawa Tengah	100242018	Taman Nasional	BTN Karimunjawa	120.245,00
395	TN	TN Kayan Mentarang	Kalimantan Utara	100244036	Taman Nasional	BTN Kayan Mentarang	1.276.080,00
396	TN	TN Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	100243028	Taman Nasional	BTN Kelimutu	5.451,21
397	TN	TN Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	100242013	Taman Nasional	BTN Kepulauan Seribu	114.039,00
398	TN	TN Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	100245041	Taman Nasional	BTN Kepulauan Togean	363.428,00
399	TN	TN Kerinci Seblat	Jambi	100241006	Taman Nasional	BBTN Kerinci Seblat	1.358.680,00
400	TN	TN Komodo	Nusa Tenggara Timur	100243029	Taman Nasional	BTN Komodo	123.414,00
401	TN	TN Kutai	Kalimantan Timur	100244037	Taman Nasional	BTN Kutai	192.644,00
402	TN	TN Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	100243027	Taman Nasional	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti	47.762,00
403	TN	TN Lore Lindu	Sulawesi Tengah	100245040	Taman Nasional	BBTN Lore Lindu	215.504,00
404	TN	TN Lorentz	Papua	100247049	Taman Nasional	BTN Lorentz	2.360.710,00
405	TN	TN Manupeu Tanah Daru	Nusa Tenggara Timur	100243026	Taman Nasional	BTN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti	51.463,20
406	TN	TN Manusela	Maluku	100246047	Taman Nasional	BTN Manusela	175.169,00
407	TN	TN Meru Betiri	Jawa Timur	100242022	Taman Nasional	BTN Meru Betiri	66.833,10
408	TN	TN Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	100245044	Taman Nasional	BTN Rawa Aopa Watumohai	108.089,00
409	TN	TN Sebangau	Kalimantan Tengah	100244034	Taman Nasional	BTN Sebangau	595.249,00
410	TN	TN Sembilang	Sumatera Selatan	100241009	Taman Nasional	BTN Berbak Sembilang	268.102,00
411	TN	TN Siberut	Sumatera Barat	100241003	Taman Nasional	BTN Siberut	177.633,00
412	TN	TN Taka Bonerate	Sulawesi Selatan	100245043	Taman Nasional	BTN Taka Bonerate	567.159,00
413	TN	TN Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	100244035	Taman Nasional	BTN Tanjung Puting	412.799,00
414	TN	TN Teluk Cenderawasih	Papua Barat	100247048	Taman Nasional	BTN Teluk Cenderawasih	1.449.620,00
415	TN	TN Tesso Nilo	Riau	100241004	Taman Nasional	BTN Tesso Nilo	81.656,00
416	TN	TN Ujung Kulon	Banten	100242012	Taman Nasional	BTN Ujung Kulon	112.164,00
417	TN	TN Wakatobi	Sulawesi Tenggara	100245045	Taman Nasional	BTN Wakatobi	1.330.120,00

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
418	TN	TN Wasur	Papua	100247050	Taman Nasional	BTN Wasur	440.812,00
419	TN	TN Way Kambas	Lampung	100241011	Taman Nasional	BTN Way Kambas	129.300,00
420	TN	TN Zamrud	Riau	100241051	Taman Nasional	BBKSDA Riau	31.435,20
421	TWA	TWA Air Air Rami I/II	Bengkulu	100251021	Taman Wisata Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	261,2
422	TWA	TWA Air Hitam	Bengkulu	100251019	Taman Wisata Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	381,15
423	TWA	TWA Air Ketebat Danau Tes	Bengkulu	100251020	Taman Wisata Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	2.729,42
424	TWA	TWA Air Putih	Sumatera Barat	100251127	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Barat	6.437,91
425	TWA	TWA Angke Kapuk	DKI Jakarta	100252030	Taman Wisata Alam	BKSDA DKI Jakarta	103,23
426	TWA	TWA Asuansang	Kalimantan Barat	100254087	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Barat	4.850,31
427	TWA	TWA Bancea	Sulawesi Tengah	100255100	Taman Wisata Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	3.429,35
428	TWA	TWA Bangko Bangko	Nusa Tenggara Barat	100253061	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	2.227,72
429	TWA	TWA Baning	Kalimantan Barat	100254083	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Barat	212,27
430	TWA	TWA Batu Angus	Sulawesi Utara	100255096	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	647,82
431	TWA	TWA Batu Putih	Sulawesi Utara	100255097	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	657,02
432	TWA	TWA Baumata	Nusa Tenggara Timur	100253077	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	37,4
433	TWA	TWA Beriat	Papua Barat	100257118	Taman Wisata Alam	BBKSDA Papua Barat	12.051,30
434	TWA	TWA Bipolo	Nusa Tenggara Timur	100253072	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	318,35
435	TWA	TWA Bukit Kaba	Bengkulu	100251022	Taman Wisata Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	14.693,10
436	TWA	TWA Bukit Kelam	Kalimantan Barat	100254084	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Barat	1.127,98
437	Tahura	Tahura Bukit Sari	Jambi	100261029	Taman Hutan Raya	Pemda Prov Jambi	426,81
438	TWA	TWA Bukit Serelo (eks PLG KH Isau-isau)	Sumatera Selatan	100251017	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Selatan	173,71
439	TWA	TWA Bukit Tangkiling	Kalimantan Tengah	100254090	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Tengah	443,82
440	TWA	TWA Buluh Cina	Riau	100251131	Taman Wisata Alam	BBKSDA Riau	971,91
441	TWA	TWA Camplong	Nusa Tenggara Timur	100253073	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	734,76
442	TWA	TWA Cani Sirenreng	Sulawesi Selatan	100255102	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	3.787,66
443	TWA	TWA Cimunggu	Jawa Barat	100252031	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	164,9
444	TWA	TWA Danau Buyan / Danau Tamblingan	Bali	100253056	Taman Wisata Alam	BKSDA Bali	1.833,01
445	TWA	TWA Danau Mahalona	Sulawesi Selatan	100255103	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	2.294,21
446	TWA	TWA Danau Matano	Sulawesi Selatan	100255104	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	23.261,80
447	TWA	TWA Danau Rawa Taliwang	Nusa Tenggara Barat	100253065	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	562,37
448	TWA	TWA Danau Towuti	Sulawesi Selatan	100255105	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	62.286,40
449	TWA	TWA Deleng Lancuk	Sumatera Utara	100251005	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sumatera Utara	352,72
450	TWA	TWA Grojogan Sewu	Jawa Tengah	100252045	Taman Wisata Alam	BKSDA Jawa Tengah	65,33
451	TWA	TWA Guci	Jawa Tengah	100252049	Taman Wisata Alam	BKSDA Jawa Tengah	2,32
452	TWA	TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	Nusa Tenggara Timur	100253081	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	70.246,30
453	TWA	TWA Gunung Api Banda	Maluku	100256114	Taman Wisata Alam	BKSDA Maluku	717,53
454	TWA	TWA Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	100252050	Taman Wisata Alam	BKSDA Yogyakarta	1,05
455	TWA	TWA Gunung Batur Bukit Payang	Bali	100253057	Taman Wisata Alam	BKSDA Bali	2.125,20
456	TWA	TWA Gunung Baung	Jawa Timur	100252052	Taman Wisata Alam	BKSDA Jawa Timur	202,01
457	TWA	TWA Gunung Dungan	Kalimantan Barat	100254088	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Barat	1.678,00
458	TWA	TWA Gunung Guntur	Jawa Barat	100252032	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	267,92
459	TWA	TWA Gunung Marapi	Sumatera Barat	100251128	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Barat	8.011,15
460	TWA	TWA Gunung Meja	Papua Barat	100257119	Taman Wisata Alam	BBKSDA Papua Barat	462,4
461	TWA	TWA Gunung Melintang	Kalimantan Barat	100254089	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Barat	22.193,80
462	TWA	TWA Gunung Pancar	Jawa Barat	100252033	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	469,27
463	TWA	TWA Gunung Papandayan	Jawa Barat	100252034	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	225,27
464	TWA	TWA Gunung Permisian	Kepulauan Bangka Belitung	100251132	Taman Wisata Alam	Balai Konservasi Sumber Daya Sumatera Selatan	3.157,72
465	TWA	TWA Gunung Sago Malintang	Sumatera Barat	100251126	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Barat	5.268,77
466	TWA	TWA Gunung Selok	Jawa Tengah	100252047	Taman Wisata Alam	BKSDA Jawa Tengah	118,44
467	TWA	TWA Gunung Tampomas	Jawa Barat	100252035	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	1.087,79
468	TWA	TWA Gunung Tunak	Nusa Tenggara Barat	100253062	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	1.271,49
469	TWA	TWA Holiday Resort	Sumatera Utara	100251006	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sumatera Utara	2.081,75
470	TWA	TWA Janthoi	Aceh	100251002	Taman Wisata Alam	BKSDA Aceh	2.613,83
471	TWA	TWA Jember	Jawa Barat	100252036	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	53,18
472	TWA	TWA Jering Menduyung	Kepulauan Bangka Belitung	100251133	Taman Wisata Alam	Balai Konservasi Sumber Daya Sumatera Selatan	3.743,04
473	TWA	TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	100252037	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	348,76
474	TWA	TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur	100252053	Taman Wisata Alam	BKSDA Jawa Timur	94,38
475	TWA	TWA Kawah Kamojang	Jawa Barat	100252038	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	4.458,77

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
476	TWA	TWA Kepulauan Banyak	Aceh	100211046	Taman Wisata Alam	BKSDA Aceh	230.894,00
477	TWA	TWA Kepulauan Padamarang	Sulawesi Tenggara	100255110	Taman Wisata Alam	BKSDA Sulawesi Tenggara	36.083,50
478	TWA	TWA Kerandangan	Nusa Tenggara Barat	100253060	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	400,74
479	TWA	TWA Klamono	Papua Barat	100257120	Taman Wisata Alam	BBKSDA Papua Barat	1.893,40
480	TWA	TWA Kuta Malaka	Aceh	100251125	Taman Wisata Alam	BKSDA Aceh	1.555,71
481	TWA	TWA Lau Debuk-debuk	Sumatera Utara	100251007	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sumatera Utara	6,82
482	TWA	TWA Lejja	Sulawesi Selatan	100255106	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	1.428,62
483	TWA	TWA Lembah Harau	Sumatera Barat	100251011	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Barat	4.085,19
484	TWA	TWA Linggarjati	Jawa Barat	100252039	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	9,04
485	TWA	TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran	Bengkulu	100251023	Taman Wisata Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	11,28
486	TWA	TWA Madapangga	Nusa Tenggara Barat	100253066	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	255,46
487	TWA	TWA Malino	Sulawesi Selatan	100255107	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	3.515,49
488	TWA	TWA Mangolo	Sulawesi Tenggara	100255111	Taman Wisata Alam	BKSDA Sulawesi Tenggara	3.958,74
489	TWA	TWA Manipo	Nusa Tenggara Timur	100253070	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	2.392,12
490	TWA	TWA Mega Mendung	Sumatera Barat	100251012	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Barat	112,29
491	TWA	TWA Muka Kuning	Kepulauan Riau	100251015	Taman Wisata Alam	BBKSDA Riau	902,39
492	TWA	TWA Muko-muko	Bengkulu	100251024	Taman Wisata Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	438,38
493	TWA	TWA Nabire	Papua	100257122	Taman Wisata Alam	BBKSDA Papua	83,97
494	TWA	TWA Nanggala III	Sulawesi Selatan	100255108	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	968,58
495	TWA	TWA Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	100252040	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	35,68
496	TWA	TWA Panelokan	Bali	100253054	Taman Wisata Alam	BKSDA Bali	580,95
497	TWA	TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	Bengkulu	100251025	Taman Wisata Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	971,48
498	TWA	TWA Pelangan	Nusa Tenggara Barat	100253059	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	433,74
499	TWA	TWA Pleihari Tanah Laut	Kalimantan Selatan	100254093	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Selatan	1.369,11
500	TWA	TWA Pulau Bakut	Kalimantan Selatan	100254094	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Selatan	18,98
501	TWA	TWA Pulau Batang	Nusa Tenggara Timur	100253076	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	367,42
502	TWA	TWA Pulau Besar	Nusa Tenggara Timur	100253136	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	3.369,34
503	TWA	TWA Pulau Kasa	Maluku	100256117	Taman Wisata Alam	BKSDA Maluku	64,78
504	TWA	TWA Pulau Kembang	Kalimantan Selatan	100254092	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Selatan	84,12
505	TWA	TWA Pulau Lapang	Nusa Tenggara Timur	100253075	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	253,83
506	TWA	TWA Pulau Marsegu	Maluku	100256116	Taman Wisata Alam	BKSDA Maluku	9.084,32
507	TWA	TWA Pulau Moyo	Nusa Tenggara Barat	100253067	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	6.790,46
508	TWA	TWA Pulau Pasoso	Sulawesi Tengah	100255098	Taman Wisata Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	49,21
509	TWA	TWA Pulau Pombo	Maluku	100227070	Taman Wisata Alam	BKSDA Maluku	178,9
510	TWA	TWA Pulau Rusa	Nusa Tenggara Timur	100253078	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	1.421,65
511	TWA	TWA Pulau Sangalaki	Kalimantan Timur	100254095	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Timur	280,49
512	TWA	TWA Pulau Sangiang	Banten	100252028	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	1.188,39
513	TWA	TWA Pulau Satonda	Nusa Tenggara Barat	100253068	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	2.567,90
514	TWA	TWA Pulau Tokobae	Sulawesi Tengah	100255099	Taman Wisata Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	902,08
515	TWA	TWA Pulau Weh	Aceh	100251001	Taman Wisata Alam	BKSDA Aceh	6.570,38
516	TWA	TWA Pundi Kayu	Sumatera Selatan	100251018	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Selatan	50,5
517	TWA	TWA Rimbo Panti	Sumatera Barat	100251013	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Barat	2.279,85
518	TWA	TWA Rumpin	Jawa Barat	100252134	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	76,15
519	TWA	TWA Ruteng	Nusa Tenggara Timur	100253071	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	33.819,40
520	TWA	TWA Saibi Sarabua	Sumatera Barat	100251129	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Barat	3.089,60
521	TWA	TWA Sangeh	Bali	100253055	Taman Wisata Alam	BKSDA Bali	15,32
522	TWA	TWA Seblat	Bengkulu	100251026	Taman Wisata Alam	BBKSDA Bengkulu Lampung	7.770,98
523	TWA	TWA Semongkat	Nusa Tenggara Barat	100253063	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	97,27
524	TWA	TWA Sibolangit	Sumatera Utara	100251008	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sumatera Utara	23,48
525	TWA	TWA Sicike-cike	Sumatera Utara	100251009	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sumatera Utara	530,31
526	TWA	TWA Sidrap	Sulawesi Selatan	100255109	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	285
527	TWA	TWA Sijaba Hutaginjang	Sumatera Utara	100251010	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sumatera Utara	417
528	TWA	TWA Singgalang Tandikat	Sumatera Barat	100251130	Taman Wisata Alam	BKSDA Sumatera Barat	9.806,75
529	TWA	TWA Sorong	Papua Barat	100257121	Taman Wisata Alam	BBKSDA Papua Barat	1.080,37
530	TWA	TWA Sukawayana	Jawa Barat	100252041	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	21,6
531	TWA	TWA Sumber Semen	Jawa Tengah	100252046	Taman Wisata Alam	BKSDA Jawa Tengah	16,83
532	TWA	TWA Sungai Dumai	Riau	100251014	Taman Wisata Alam	BBKSDA Riau	3.566,70
533	TWA	TWA Sungai Liku	Kalimantan Barat	100254085	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Barat	747,11

No	Fungsi	Nama	Provinsi	Register Kawasan	Penunjukkan/Penetapan	Pengelola (UPT)	Luas GIS (Ha)
534	TWA	TWA Suranadi	Nusa Tenggara Barat	100253058	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	50,71
535	TWA	TWA Talaga Bodas	Jawa Barat	100252042	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	25,87
536	TWA	TWA Tanjung Belimbing	Kalimantan Barat	100254086	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Barat	993,65
537	TWA	TWA Tanjung Keluang	Kalimantan Tengah	100254091	Taman Wisata Alam	BKSDA Kalimantan Tengah	2.593,36
538	TWA	TWA Tanjung Tamba	Nusa Tenggara Barat	100253064	Taman Wisata Alam	BKSDA Nusa Tenggara Barat	983,4
539	TWA	TWA Telaga Patengan	Jawa Barat	100252043	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	64,98
540	TWA	TWA Telaga Warna	Jawa Barat	100252044	Taman Wisata Alam	BBKSDA Jawa Barat	4,65
541	TWA	TWA Telogo Warno / Telogo Pengilon	Jawa Tengah	100252048	Taman Wisata Alam	BKSDA Jawa Tengah	36,49
542	TWA	TWA Teluk Kupang	Nusa Tenggara Timur	100253082	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	66.138,00
543	TWA	TWA Teluk Lasolo	Sulawesi Tenggara	100255112	Taman Wisata Alam	BKSDA Sulawesi Tenggara	72.985,60
544	TWA	TWA Teluk Youtefa	Papua	100257123	Taman Wisata Alam	BBKSDA Papua	1.792,59
545	TWA	TWA Tirta Rimba / Air Jatuh	Sulawesi Tenggara	100255113	Taman Wisata Alam	BKSDA Sulawesi Tenggara	494,37
546	TWA	TWA Tretes	Jawa Timur	100252051	Taman Wisata Alam	BKSDA Jawa Timur	10,79
547	TWA	TWA Tujuh Belas Pulau	Nusa Tenggara Timur	100253080	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	6.954,44
548	TWA	TWA Tuti Adagae	Nusa Tenggara Timur	100253069	Taman Wisata Alam	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	5.823,14
549	TWA	TWA Way Hawang	Bengkulu	100251027	Taman Wisata Alam	BKSDA Bengkulu Lampung	94,1
550	TWA	TWA Wera	Sulawesi Tengah	100255101	Taman Wisata Alam	BKSDA Sulawesi Tengah	348,78
551	TWA	TWA Gunung Ambang	Sulawesi Utara	100255135	Taman Wisata Alam	BBKSDA Sulawesi Selatan	2.595,34
552	TWA	TWA Supiori	Papua	100257137	Taman Wisata Alam	BBKSDA Papua	1.551,57

## LAMPIRAN 6.

## PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER SATKER LINGKUP DITJEN KSDAE TAHUN 2017

No	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>SATUAN KERJA PUSAT</b>				
1	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	6.050.000.000	5.701.162.968	94,23
2	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	28.894.805.000	27.585.215.457	95,47
3	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	11.302.655.000	10.816.006.228	95,69
4	Direktorat Kawasan Konservasi	20.155.954.000	19.422.888.570	96,36
5	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	20.627.745.000	19.359.062.129	93,85
6	Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	70.306.043.000	65.613.884.960	93,33
	<b>JUMLAH PUSAT</b>	<b>157.337.202.000</b>	<b>148.498.220.312</b>	<b>94,38</b>
<b>SATUAN KERJA BALAI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM</b>				
1	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	48.204.120.000	44.089.987.509	91,47
2	Balai Besar KSDA Riau	26.443.986.000	25.335.079.977	95,81
3	Balai Besar KSDA Jawa Barat	48.342.007.000	46.467.587.067	96,12
4	Balai Besar KSDA Jawa Timur	40.998.900.000	37.472.804.598	91,40
5	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	35.670.600.000	32.502.656.843	91,12
6	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	27.434.000.000	26.296.658.941	95,85
7	Balai Besar KSDA Papua	25.953.800.000	23.581.547.423	90,86
8	Balai Besar KSDA Papua Barat	25.443.300.000	23.825.012.400	93,64
9	Balai KSDA DKI Jakarta	17.138.500.000	14.649.203.512	85,48
10	Balai KSDA Jawa Tengah	22.456.400.000	20.550.984.478	91,52
11	Balai KSDA Yogyakarta	18.387.400.000	16.442.995.348	89,43
12	Balai KSDA Aceh Darusalam	18.265.700.000	17.137.907.774	93,83
13	Balai KSDA Sumatera Barat	19.216.820.000	18.088.182.902	94,13
14	Balai KSDA Jambi	16.057.904.000	12.954.513.077	80,67
15	Balai KSDA Sumatera Selatan	32.602.500.000	27.788.797.573	85,24
16	Balai KSDA Bengkulu	27.353.988.000	26.943.217.635	98,50
17	Balai KSDA Kalimantan Barat	27.857.000.000	25.504.643.257	91,56
18	Balai KSDA Kalimantan Tengah	18.779.900.000	16.522.031.579	87,98
19	Balai KSDA Kalimantan Selatan	18.249.300.000	16.818.349.842	92,16
20	Balai KSDA Kalimantan Timur	18.391.800.000	16.876.876.707	91,76
21	Balai KSDA Sulawesi Utara	20.664.900.000	18.198.998.729	88,07
22	Balai KSDA Sulawesi Tengah	18.470.700.000	16.653.027.846	90,16
23	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	18.404.500.000	17.239.109.128	93,67
24	Balai KSDA Maluku	17.863.100.000	16.089.898.066	90,07
25	Balai KSDA Bali	21.703.900.000	20.498.953.799	94,45
26	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	25.374.400.000	22.477.415.846	88,58
	<b>JUMLAH KSDA</b>	<b>655.729.425.000</b>	<b>601.006.441.856</b>	<b>91,65</b>
<b>SATUAN KERJA BALAI TAMAN NASIONAL</b>				
1	Balai Besar TN Gunung Leuser	30.628.200.000	28.100.988.456	91,75
2	Balai Besar TN Kerinci Seblat	34.461.891.000	31.236.960.365	90,64
3	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	25.571.114.000	23.821.044.815	93,16
4	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	33.864.205.000	30.024.657.769	88,66
5	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru	41.299.200.000	39.369.978.818	95,33
6	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	24.879.399.000	23.417.154.209	94,12
7	Balai Besar TN Lore Lindu	25.311.456.000	23.283.736.076	91,99

No	Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
8	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	24.666.100.000	22.287.484.621	90,36
9	Balai TN Kepulauan Seribu	30.084.700.000	28.801.195.943	95,73
10	Balai TN Gunung Ceremai	15.218.900.000	13.991.424.421	91,93
11	Balai TN Gunung Halimun	25.625.300.000	24.861.622.025	97,02
12	Balai TN Gunung Merbabu	15.893.429.000	15.604.670.788	98,18
13	Balai TN Karimun Jawa	18.628.600.000	16.660.623.685	89,44
14	Balai TN Gunung Merapi	19.304.000.000	18.850.672.288	97,65
15	Balai TN Baluran	26.631.600.000	24.646.362.317	92,55
16	Balai TN Meru Betiri	18.877.500.000	18.301.469.433	96,95
17	Balai TN Alas Purwo	28.310.500.000	27.044.978.685	95,53
18	Balai TN Batang Gadis	10.122.300.000	9.168.525.962	90,58
19	Balai TN Siberut	12.523.360.000	12.110.565.387	96,70
20	Balai TN Teso Nilo	15.717.600.000	14.027.959.751	89,25
21	Balai TN Bukit Tiga Puluh	13.905.300.000	12.529.371.253	90,11
22	Balai TN Bukit Dua Belas	11.694.600.000	10.646.023.721	91,03
23	Balai TN Berbak dan Sembilang	20.381.182.000	18.747.375.996	91,98
24	Balai TN Way Kambas	34.111.338.000	32.287.972.776	94,65
25	Balai TN Gunung Palung	12.817.500.000	12.033.019.287	93,88
26	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	14.225.800.000	12.967.237.186	91,15
27	Balai TN Tanjung Putting	19.415.782.000	16.992.092.271	87,52
28	Balai TN Sebangau	14.454.500.000	13.768.819.603	95,26
29	Balai TN Kutai	20.558.900.000	19.990.151.133	97,23
30	Balai TN Kayan Mentarang	12.272.800.000	10.690.398.307	87,11
31	Balai TN Bogani Nani Wartabone	21.505.700.000	20.459.776.488	95,14
32	Balai TN Bunaken	20.171.900.000	19.300.834.865	95,68
33	Balai TN Kepulauan Togean	18.515.700.000	17.956.112.311	96,98
34	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	18.555.400.000	17.611.470.147	94,91
35	Balai TN Takabone Rate	20.322.400.000	18.710.527.932	92,07
36	Balai TN Rawa Aopa Watumohai	15.893.900.000	15.172.851.331	95,46
37	Balai TN Wakatobi	27.807.800.000	26.138.924.412	94,00
38	Balai TN Manusella	13.107.600.000	11.576.214.307	88,32
39	Balai TN Bali Barat	24.993.800.000	23.545.594.340	94,21
40	Balai TN Gunung Rinjani	21.574.600.000	20.144.845.832	93,37
41	Balai TN Komodo	39.999.400.000	32.233.841.012	80,59
42	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	15.948.200.000	15.344.992.968	96,22
43	Balai TN Kelimutu	15.479.100.000	13.805.226.403	89,19
44	Balai TN Lorentz	16.596.100.000	14.728.369.240	88,75
45	Balai TN Wasur	16.342.140.000	14.542.698.806	88,99
46	Balai TN Akatajawa Lolobata	16.610.800.000	14.951.045.996	90,01
47	Balai TN Ujung Kulon	23.701.700.000	22.793.344.881	96,17
48	Balai TN Tambora	14.218.871.000	13.110.059.979	92,20
	<b>JUMLAH TN</b>	<b>1.012.802.167.000</b>	<b>938.391.268.597</b>	<b>92,65</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.825.868.794.000</b>	<b>1.687.895.930.765</b>	<b>92,44</b>

LAMPIRAN 7.

PERBANDINGAN CAPAIAN IKP DITJEN KSDAE TAHUN 2015-2017

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Peningkatan/Penurunan Tahun 2017 Terhadap 2016 (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i>	Rp. Triliun	5	5,31	106,15	5	6,5	130,95	5,3	7,09	133,87	2,23
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan mancanegara	250.000	210.136	84,05	250.000	481.518	192,61 (150)	300.000	414.989	138,33	-28,18
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	orang wisatawan nusantara	3.500.000	4.038.070	115,37	4.000.000	7.698.550	192,46 (150)	4.000.000	5.753.868	143,85	-25,26
	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi (usaha pariwisata alam sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 1 Unit)	Unit	25	38	152 (150)	26	122	395 (150)	30	113	376,67 (150)	-4,641
	Jumlah PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam	Rp. Milyar	10	14,76	147,6	10	15,13	151,3	10	24,60	245,99 (150)	62,58
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik)	Unit KK	50	130	130	50	29	58	47	40	85,11	46,55
	a. 10 unit KK meningkat		10	11	110							
	b. 40 unit KK meningkat		40	119	297,5 (150)							
	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi	Unit	20	12	60	80	37	46,25	10	35	350 (150)	656,76
	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> )	%	2	26,89	1344,5 (150)	2	3,95	197,7 (150)	2	5,56	278	40,62
	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya	Unit	13	10	76,92	13	8	61,54	13	14	107,69	75,00
	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa,	Paket Data	7	1	14,29	7	6	85,71	7	6	85,71	0

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Peningkatan/Penurunan Tahun 2017 Terhadap 2016 (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)											
	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	Ha	10.000	33.346,03	333,46	30.000,00	3.531,890	11,77	20000	25728,79	128,64	993
	Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran	Unit KK							551	552	100,18	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Program</b>					<b>97,57</b>			<b>109,16</b>			<b>133,49</b>	<b>165,31</b>



## **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8

Jl.Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta, 10270

Telp.(021)573-0317

Email : [evaluator\\_phka@yahoo.co.id](mailto:evaluator_phka@yahoo.co.id), [evaluatorksdae@gmail.com](mailto:evaluatorksdae@gmail.com)